



BANDUNG, 10 JULI 2023



PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PROVINSI JAWA BARAT

Disampaikan Oleh:

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT





PENDAHULUAN

SISTEMATIKA

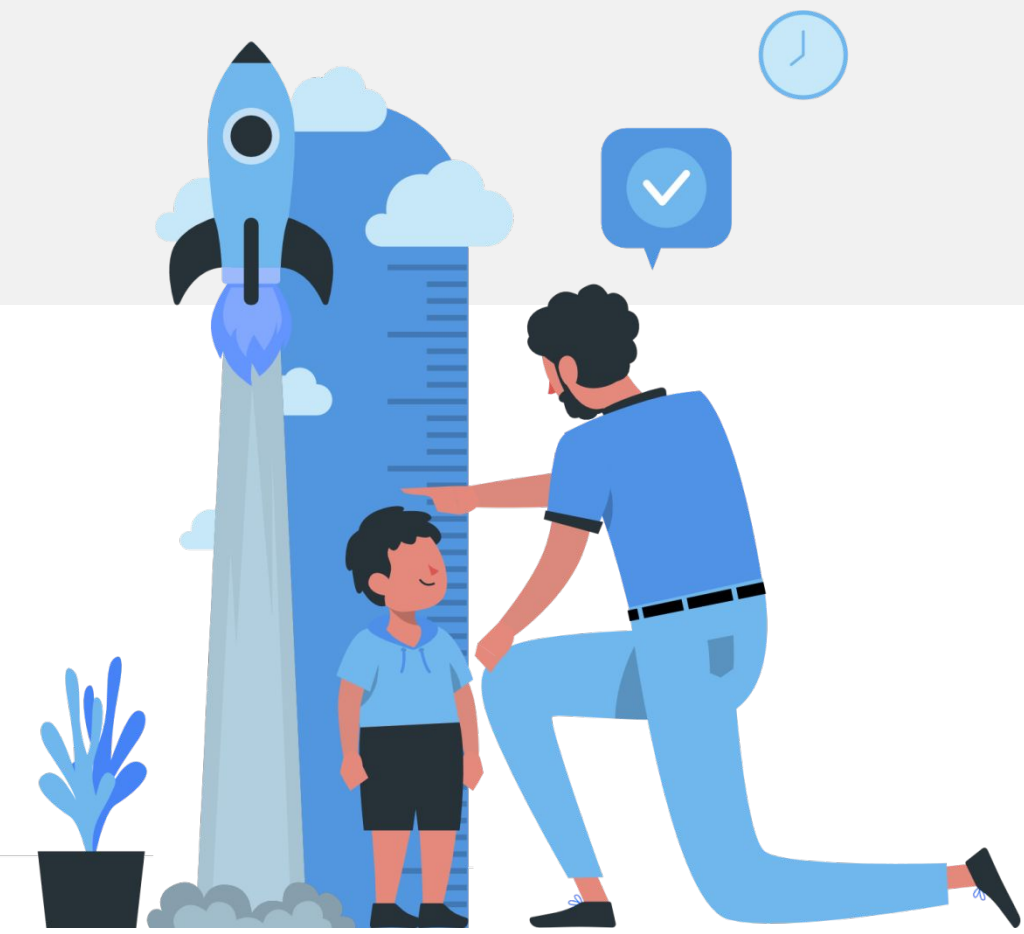


- 01 PENDAHULUAN
- 02 KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
PROVINSI JAWA BARAT
- 03 STRATEGI DAN TINDAK LANJUT DALAM PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING
- 04 PENUTUP

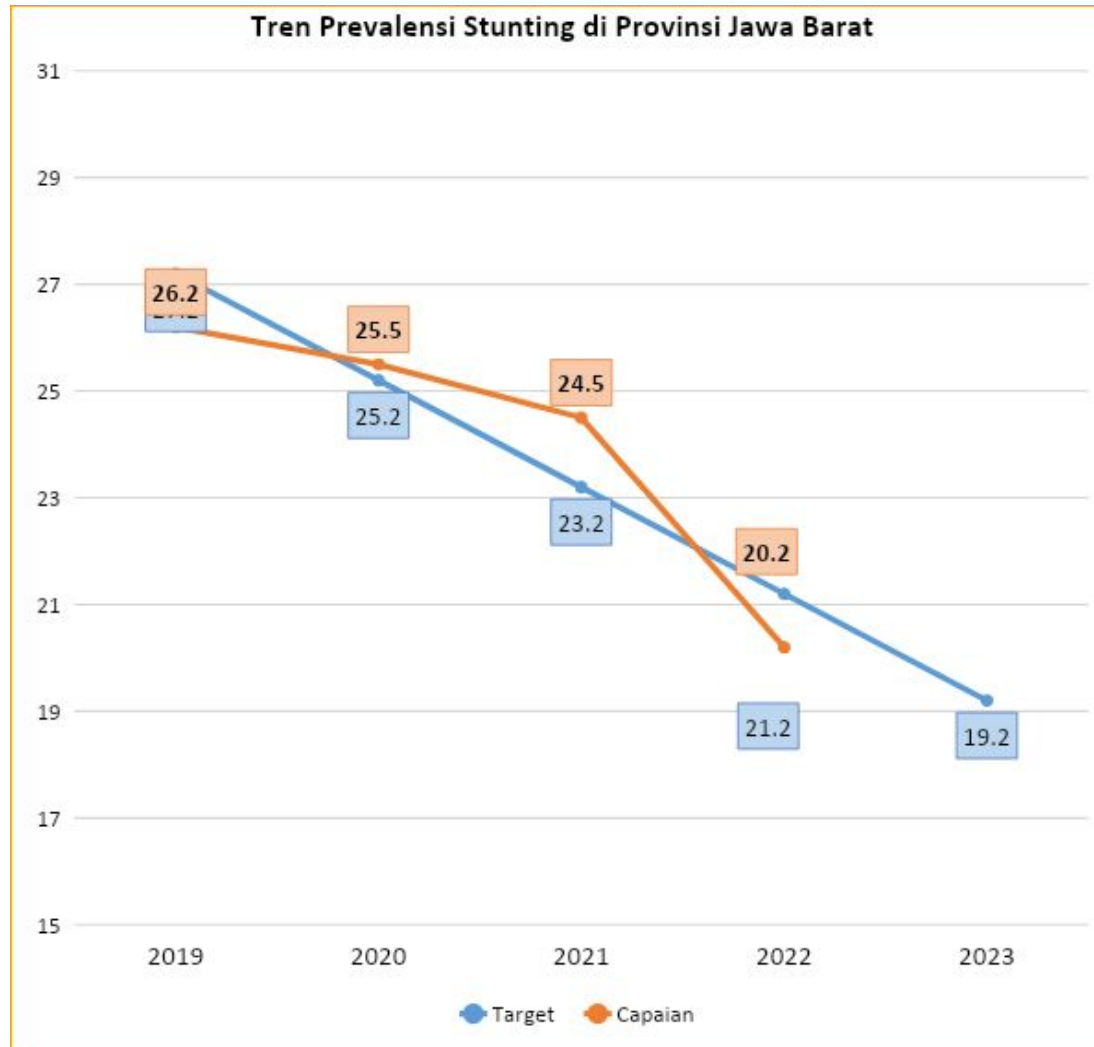




◀ PENDAHULUAN



PREVALENSI STUNTING DI PROVINSI JAWA BARAT



Rata-rata penurunan stunting dalam 3 tahun terakhir (2020,2021,2022) di Jawa Barat adalah 2% per tahun.

Data Sementara Tahun 2022 angka stunting di Jawa Barat sebesar 20,2 % dan mengalami penurunan sebesar 4,3% di banding tahun 2021

*Sumber data:
2019 (Survei SSGBI); 2020 (Laporan Prediksi); 2021 (Survei SSGI), 2022 (Survei SSGI)*

Perlu upaya inovasi agar terjadi penurunan 3-3,5% per tahun untuk mencapai target RPJMD 19% dan target RPJMN 14% pada tahun 2024

No	Kab/Kota	Survey Tahun					Selisih 2022-2021	Status
		2013	2018	2019	2021	2022		
1	Kota Bekasi	26,6	16,75	20,03	13,8	6,0	-7,8	Turun ↓
2	Kota Depok	25,7	23,21	16,09	12,3	12,6	0,3	Naik ↑
3	Cianjur	41,7	33,51	27,52	33,7	13,6	-20,1	Turun ↓
4	Karawang	34,9	33,11	24,01	20,6	14,0	-6,6	Turun ↓
5	Subang	40,4	28,64	25,73	18,1	15,7	-2,4	Turun ↓
6	Kota Cimahi	28,2	21,06	34,29	19,9	16,4	-3,5	Turun ↓
7	Kota Cirebon	28,4	31,18	22,04	30,6	17,0	-13,6	Turun ↓
8	Bekasi	30,3	26,37	20,93	21,5	17,8	-3,7	Turun ↓
9	Ciamis	41,4	33,39	24,21	16,0	18,6	2,6	Naik ↑
10	Cirebon							
11	Kota							
12	Kota							
13	Kota							
14	Kur							
15	Kota							
16	Par							
17	Ind							
18	Pur							
19	Kota							
20	Gar							
21	Maj							
22	Bog							
23	Ban							
24	Tasikm							
25	Bandung Barat	52,5	36,69	32,12	29,6	27,3	-2,3	Turun ↓
26	Sukabumi	37,1	41,35	21,93	24,2	27,5	3,3	Naik ↑
27	Sumedang	41,1	32,22	24,43	22,0	27,6	5,6	Naik ↑
Prov. Jawa Barat		35,3	31,1	26,2	24,50	20,2	-4,3	Turun ↓



STUNTED DI JAWA BARAT

Berdasarkan hasil survey
SSGI tahun 2022, Kab.
Cirebon,
menjadi
lensi
tahun 2

HARAPAN DI TAHUN 2023 TIDAK ADA LAGI KABUPATEN KOTA YANG
MENGALAMI KENAIKAN PREVALENSI STUNTING OLEH KARENA ITU
PERLU DUKUNGAN DARI SELURUH ELEMEN PENTAHELIX
PEMBANGUNAN UNTUK BERGERAK BERSAMA MEMBANTU
PENCAPAIAN TARGET INTERVENSI SPESIFIK SEHINGGA DAPAT
MEMBERIKAN DAMPAK YANG OPTIMAL PADA PENURUNAN
STUNTING

- Sumber : ■ ≥30% : Sangat tinggi
1. Riset Kesehatan Dasar (2013)
 2. Riset Kesehatan Dasar (2018)
 3. Survey Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2021
 4. Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021
 5. Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022

STATUS GIZI BALITA (0-59 BULAN)



BERDASARKAN LAPORAN SIGIZI TERPADU (E-PPGBM)

Balita dengan berat badan kurang dan balita dengan gizi kurang apabila tidak segera diintervensi akan berisiko menjadi stunting. Begitupun Balita **WEIGH Faltering**. Jumlah tahun 2023 sebanyak **511489**

Gizi Buruk

- 2021: 18.667 (0,7%)
- 2022: 11.029 (0,36%)
- 2023 : 16.866 (0,645)



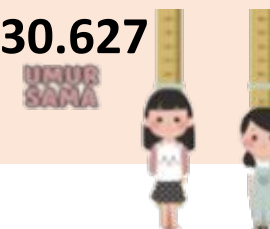
Berat Badan Kurang

- 2021: 166.294 (5,56%)
- 2022: 183.440 (5,89%)
- 2023 : 176582 (6,71%)



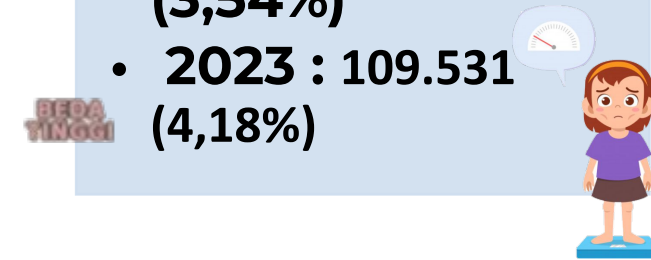
Pendek

- 2021: 206.514 (6,93%)
- 2022: 182.935 (5,89%)
- 2023 : 230.627 (8,82%)



Gizi Kurang

- 2021: 116.184 (3,90%)
- 2022: 110.099 (3,54%)
- 2023 : 109.531 (4,18%)

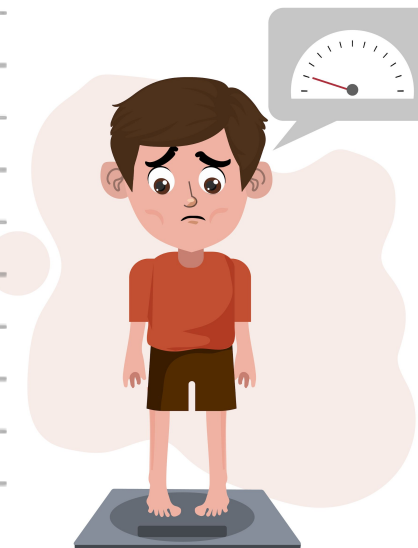
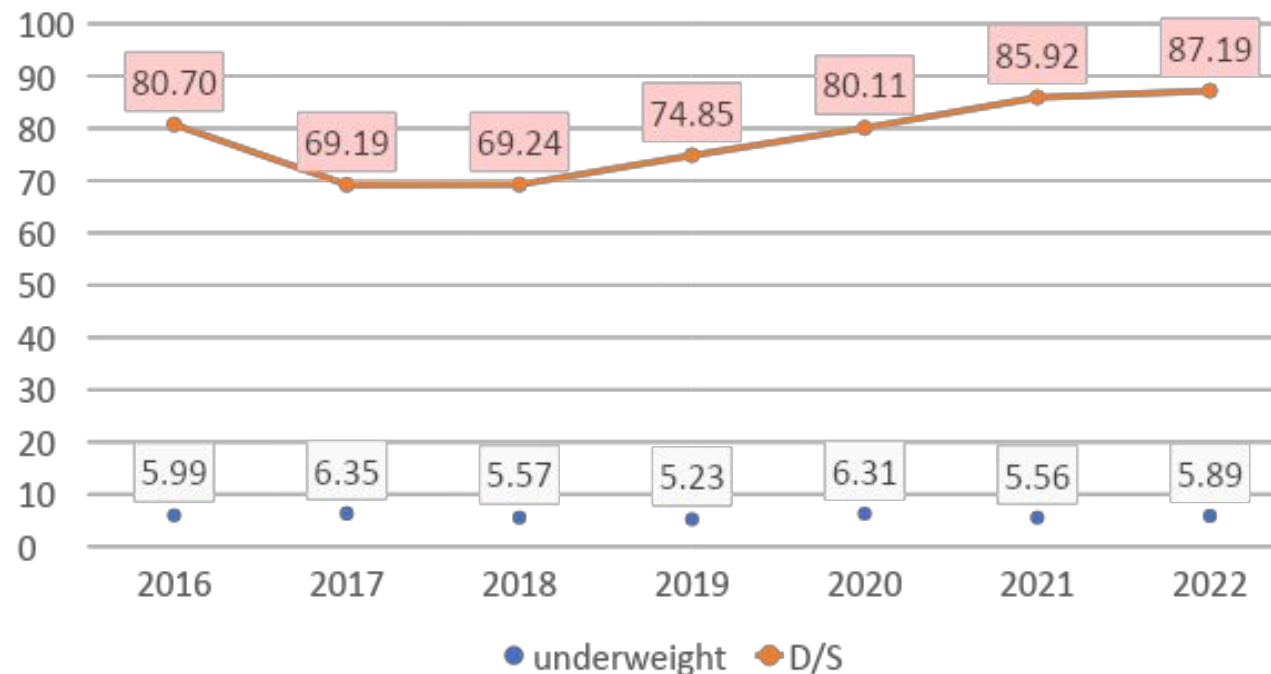
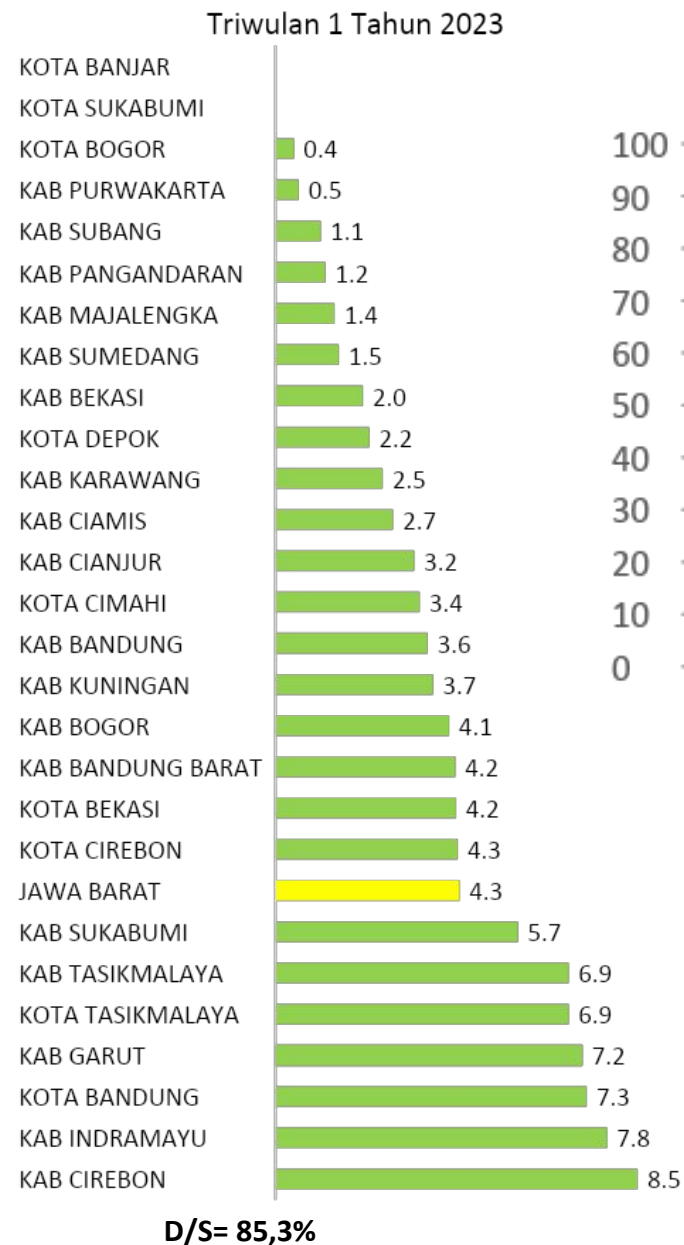


Sumber Data SIGIZI TERPADU:
Data 2021 per 31 Desember 2021
Data 2022 per 2 Feb 2023
Data 2023 per 17 Maret 2023

Data hasil survey digunakan untuk penentuan prevalensi besaran masalah gizi di suatu wilayah, sedangkan data hasil surveilans dari aplikasi SIGIZI TERPADU (e-PPGBM) digunakan untuk acuan intervensi sasaran karena diketahui data *by name by address*



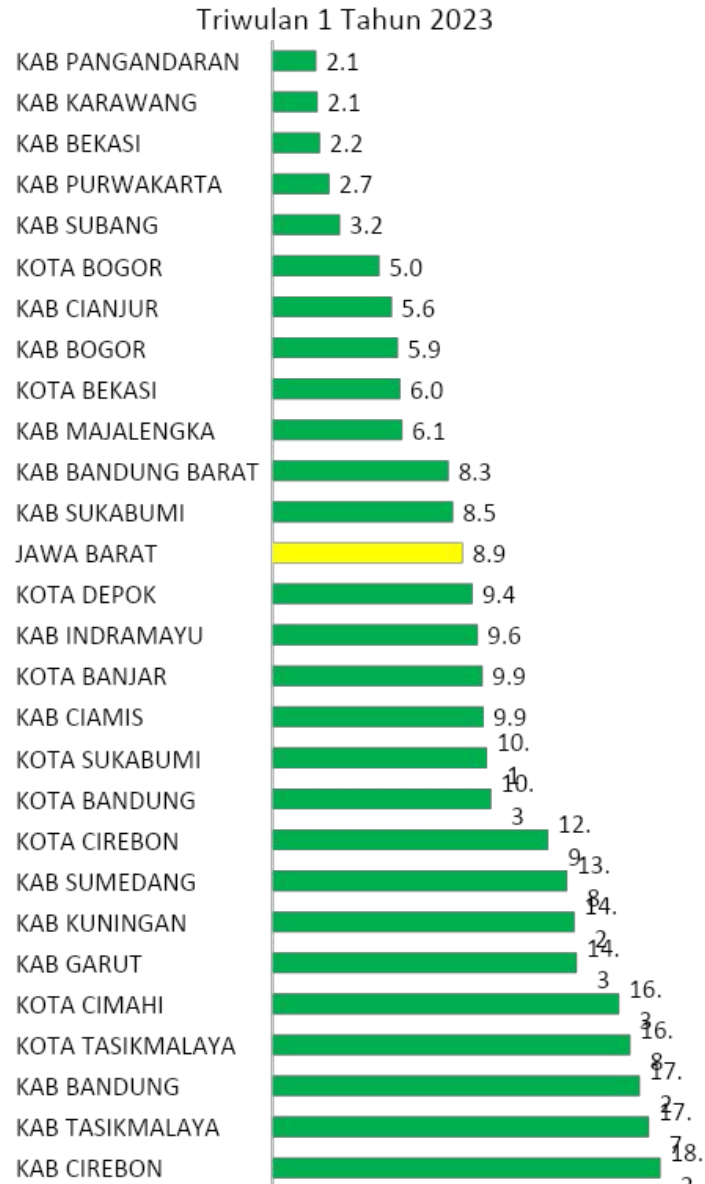
PRESENTASE UNDERWEIGHT



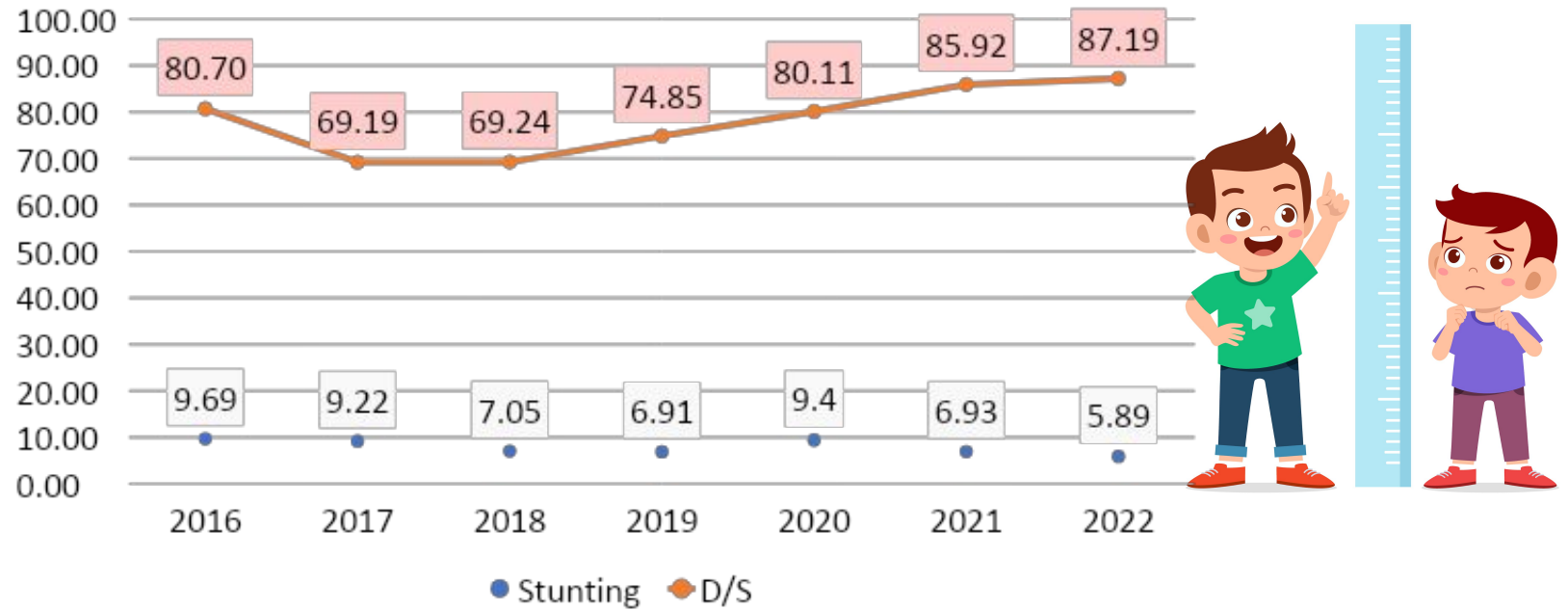
Setiap tahun, balita yang diukur Status Gizi BB/U mengalami kenaikan. Underweight tahun 2022 sebanyak 5,89% dari 87,19% balita yg diukur. Pada Triwulan 2 Tahun 2023 Mengalami penurunan 4,3% dari 85,3% balita yang diukur.

2023 Laporan Kabupaten Kota Melalui SIGIZI TERPADU data Triwulan II diunduh 15 Juni 2023

PRESENTASE STUNTING



D/S= 85,3%



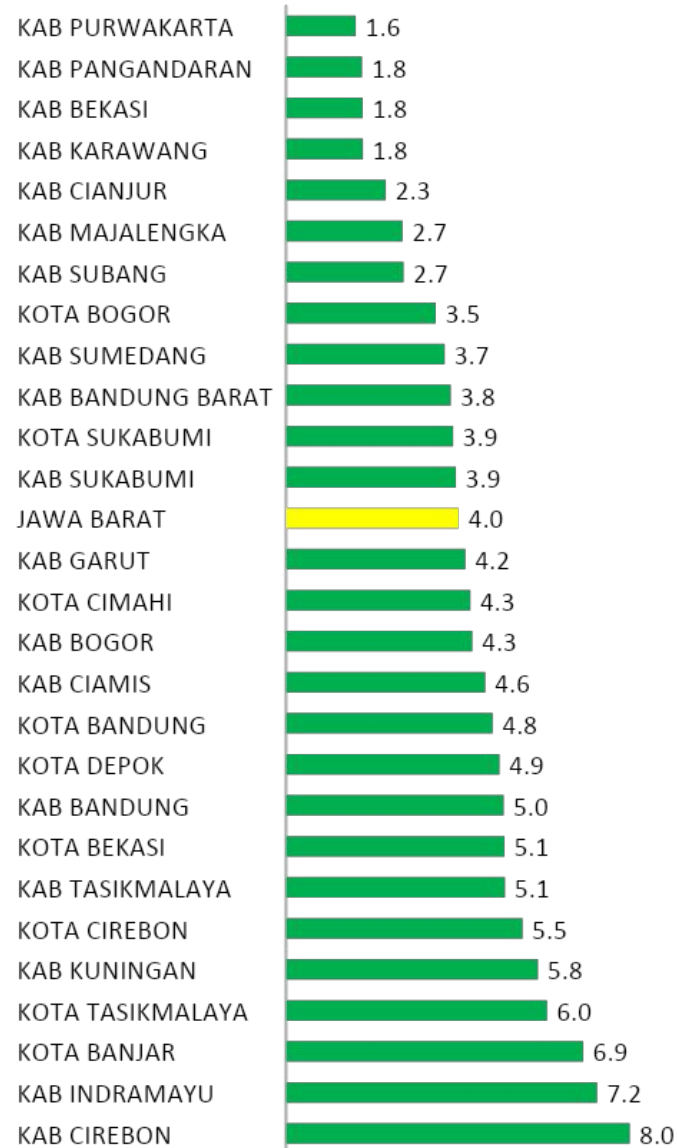
Setiap tahu balita yang diukur Status Gizi PB/U atau TB/U mengalami kenaikan. Stunting pada triwulan 2 Tahun 2023 sebanyak 8,9% dari 85,3% balita yg diukur

2023 Laporan Kabupaten Kota Melalui SIGIZI TERPADU data Triwulan II diunduh 15 Juni 2023

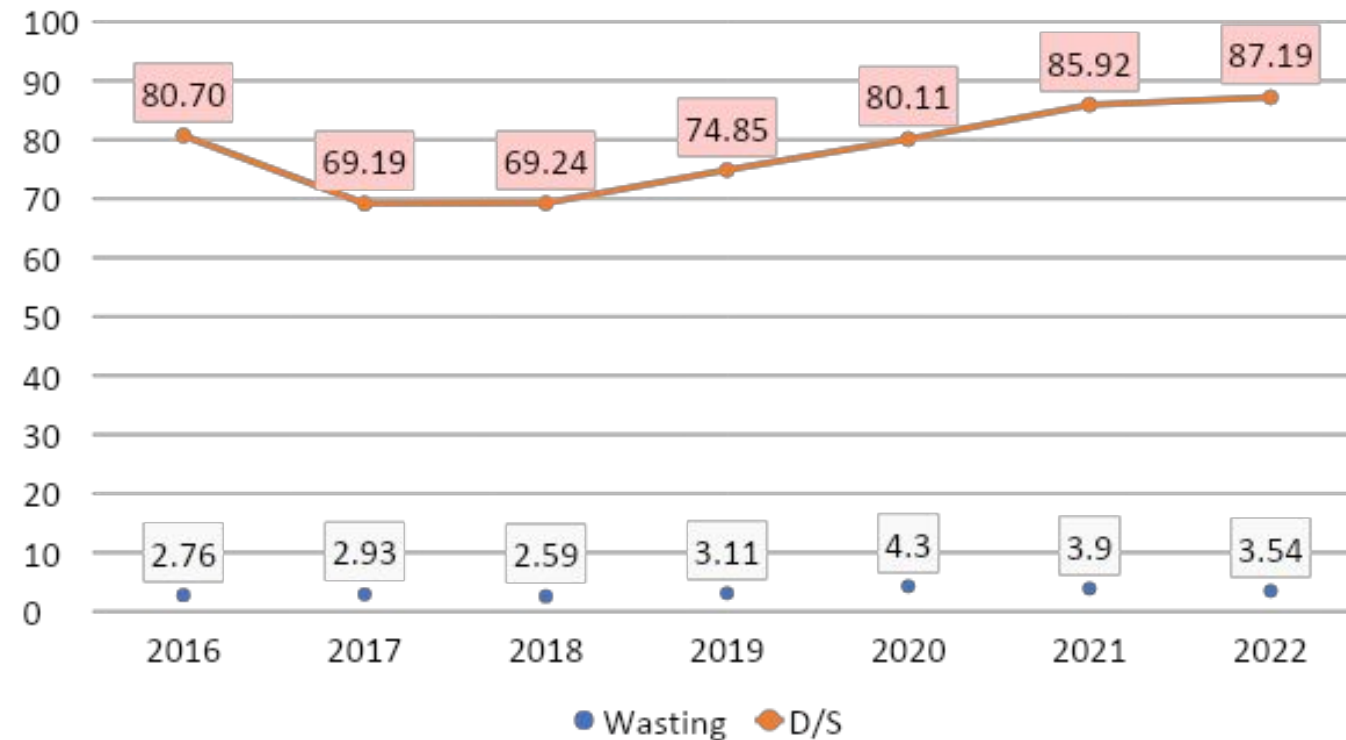
PRESENTASE WASTING



Triwulan 1 Tahun 2023

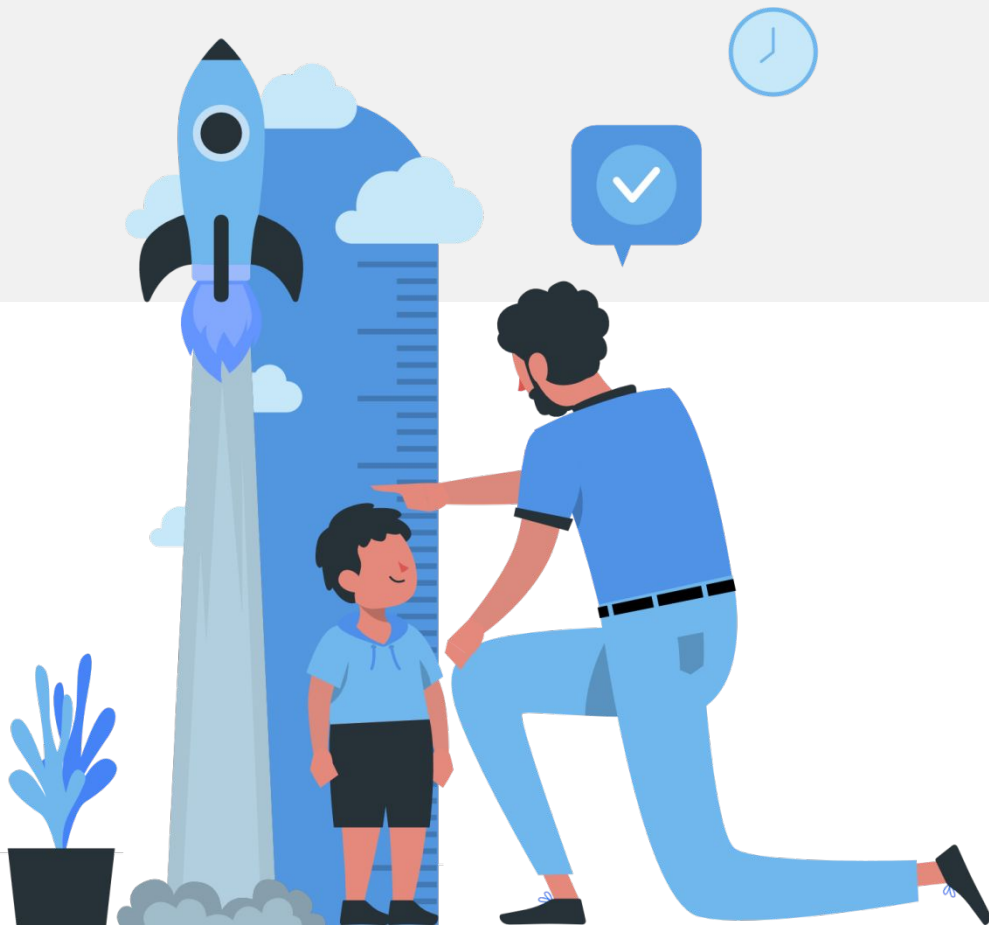


D/S= 85,3%



Setiap tahun balita yang diukur Status Gizi BB/TB atau BB/PB mengalami kenaikan. Wasting Triwulan 1 Tahun 2023 sebanyak 4,0% dari 85,3% balita yg diukur

2023 Laporan Kabupaten Kota Melalui SIGIZI TERPADU data Triwulan II diunduh 15 Juni 2023



◀ **KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PROVINSI JAWA BARAT**

KOMITMEN DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI JAWA BARAT



RIDWAN KAMIL

GUBERNUR JAWA BARAT

"Untuk mencapai target penurunan stunting 14 persen, mari kita harus bekerja 3x lipat lebih keras, karena negara kita tidak akan menjadi negara adidaya jika stuntingnya masih tinggi. Tahun 2045, 70 persen penduduk akan diisi oleh anak muda <40 Tahun, dan jika anak muda tersebut stunting maka akan menjadi generasi yang menjadi beban negara bukan mesin negara. Maka dari itu, saya titip agar kita semua bekerjasama untuk pencegahan stunting, karena cegah stunting itu penting!"

(Disampaikan pada Musrenbang Jabar 2022)

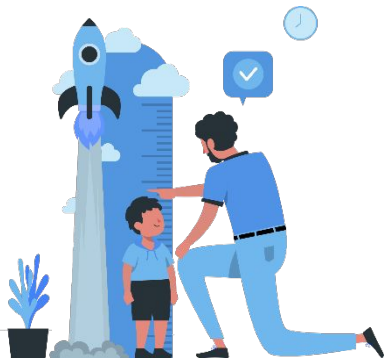
UU RUZHANUL ULUM

WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT (KETUA TPPS JABAR)

Konvergensi adalah kunci dalam upaya percepatan penurunan stunting di Jawa Barat. Konvergensi berarti semua pihak harus bergerak bersama dengan berbagai ikhtiar yang dapat dilaksanakan. Mulai dari kepala daerah hingga kader yang ada di desa-desa.

Mimpi kita Bersama untuk mewujudkan Jabar Zero New Stunting hanya dapat tercapai jika kita bekerja bersama-sama.

(Disampaikan pada Peringatan HGN Tahun 2022)



KOMITMEN DAN VISI KEPEMIMPINAN SERTA PERLIBATAN STAKEHOLDER PEMBANGUNAN DI PROVINSI JAWA BARAT

Provincial Government
Of West Java



Komitmen Menuju Jabar Zero New Stunting



Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat saat memberikan penghargaan kepada Vera Galuh Sugianto VP General Secretary Danone Indonesia. Piagam penghargaan ini sebagai bentuk dukungan Danone Indonesia dalam aksi deklarasi Gerakan Pencegahan Stunting yang digagas oleh Pemprov Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat, **Ridwan Kamil** pada kesempatan ini juga meresmikan pencanangan program Zero Stunting Jawa Barat. Acara ini dihadiri oleh Ketua TP PKK Jawa Barat, Kepala **Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat**, beberapa mitra dari sektor swasta, dan juga 5,000 kader posyandu, pengurus PKK, pendidik PAUD, mahasiswa hingga tokoh publik menargetkan dalam 5 (lima) tahun kedepan Jabar akan bebas dari stunting.

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN
PT. TIRTA INVESTAMA,
PT. SARIHUSADA GENERASI MAHARDHIKA,
PT. NUTRICIA INDONESIA SEJAHTERA,
DAN
PT. NUTRICIA MEDICAL NUTRITION
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN HIDUP
DI JAWA BARAT MELALUI PENCEGAHAN STUNTING DAN MALNUTRISI

NOMOR : 119/79/Dinkes

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua belas bulan November tahun dua ribu sembilan belas (12-11-2019), bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL : Gubernur Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 22, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. CORINE DANIELLE TAP : Presiden Direktur PT Tirta Investama, berkedudukan di Jakarta, Cyber 2 Tower Nomor 13 Lantai 12, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No.13, berdasarkan Akta Pendirian PT Tirta Investama Nomor 142 tanggal 16 Juni 1994 yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C2-10.060.HT.01.01.TH.94 tanggal 1 Juli 1994, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Tirta Investama.

Pasal 9 PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam *Addendum*, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 6 (enam), 5 (lima) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
PT. TIRTA INVESTAMA

CORINE DANIELLE TAP

PIHAK KESATU,
GUBERNUR
JAWA BARAT

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

PT. SARIHUSADA GENERASI
MAHARDHIKA

CONNIE ANG

PT. NUTRICIA INDONESIA SEJAHTERA

JULIE WENDY JONES

PT. NUTRICIA MEDICAL NUTRITION

ANTONIUS BOBBY HENDARTO

KEBIJAKAN PUSAT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
- b. bahwa percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan;
- c. bahwa Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* secara efektif sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN . . .



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1928/2022

TENTANG

PEDOMAN NASIONAL PELAYANAN KEDOKTERAN

TATA LAKSANA *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kedokteran yang disusun dalam bentuk pedoman nasional pelayanan kedokteran dan standar prosedur operasional;
- b. bahwa untuk memberikan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyusun standar prosedur operasional, perlu mengesahkan pedoman nasional pelayanan kedokteran yang disusun oleh organisasi profesi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana *Stunting*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1936/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/MENKES/1186/2022 TENTANG PANDUAN PRAKTIK KLINIS BAGI DOKTER DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam melakukan penapisan rujukan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan dan standar prosedur operasional untuk melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya dengan tetap memperhatikan keselamatan pasien;
- b. bahwa untuk memberikan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dalam menyusun standar prosedur operasional perlu mengesahkan panduan praktik klinis;
- c. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, perlu disesuaikan agar selaras dengan pelaksanaan program nasional bidang kesehatan;

KOMITMEN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI JAWA BARAT



- ❑ SURAT KEPGUB JAWA BARAT NOMOR 441.05/Kep.829-Bapp/2021 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Daerah Provinsi Jawa Barat;
- ❑ PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 107 TAHUN 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Provinsi Jawa Barat;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);

15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 107 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 441/Kep.1076-Yanbangsos/2019 Tentang Tim Koordinasi Pencegahan dan Penurunan Kematian Ibu, Kematian Bayi, dan Stunting, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut Tim Stunting dengan Susunan Personalia dan Urutan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Tim Stunting sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Stunting mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan pencegahan dan penanganan stunting sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, Instansi, dan Lembaga terkait;

b. koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta fasilitasi kegiatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, Instansi, dan Lembaga terkait dalam mendukung kegiatan percepatan penurunan stunting;

c. supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan

d. penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting kepada Gubernur.

KELIMA : Ketua Tim Stunting bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT.



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 441.05/Kep.829-Bapp/2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penurunan kematian ibu, kematian bayi, dan stunting, telah dibentuk tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 441/Kep.1076-Yanbangsos/2019;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan stunting serta untuk memindaklanjuti ketentuan Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Daerah Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Desember 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Nomor 107 Tahun 2020 Nomor 107

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 107 Tahun 2020
Tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



SETIAWAN WANGSAATMAJA



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 107 TAHUN 2020

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa stunting berisiko menghambat pertumbuhan fisik, kereنتanan anak terhadap penyakit, serta menghambat perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan;

b. bahwa pelaksanaan program dan kegiatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a memerlukan percepatan di daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian target nasional berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,



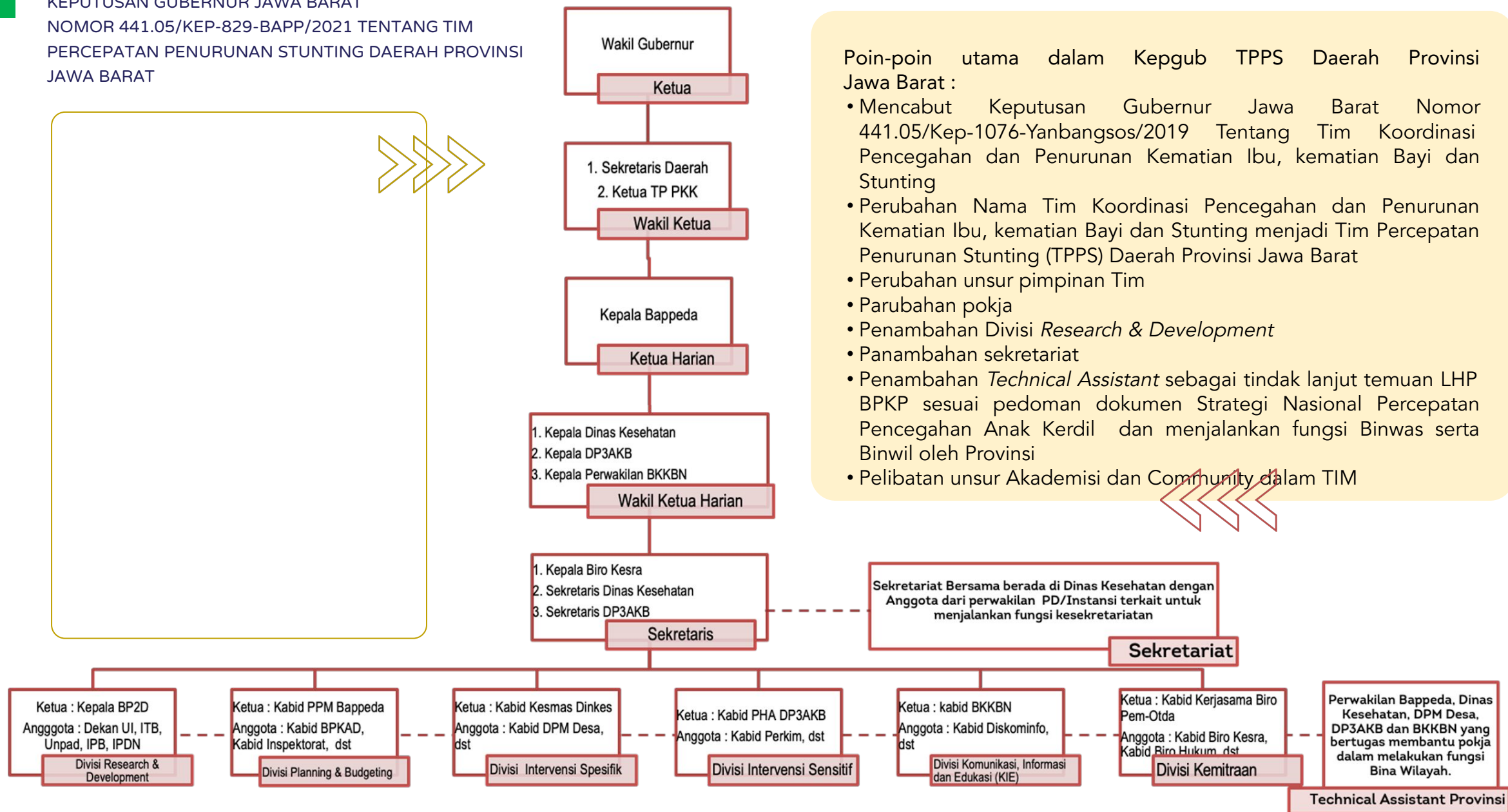
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 107

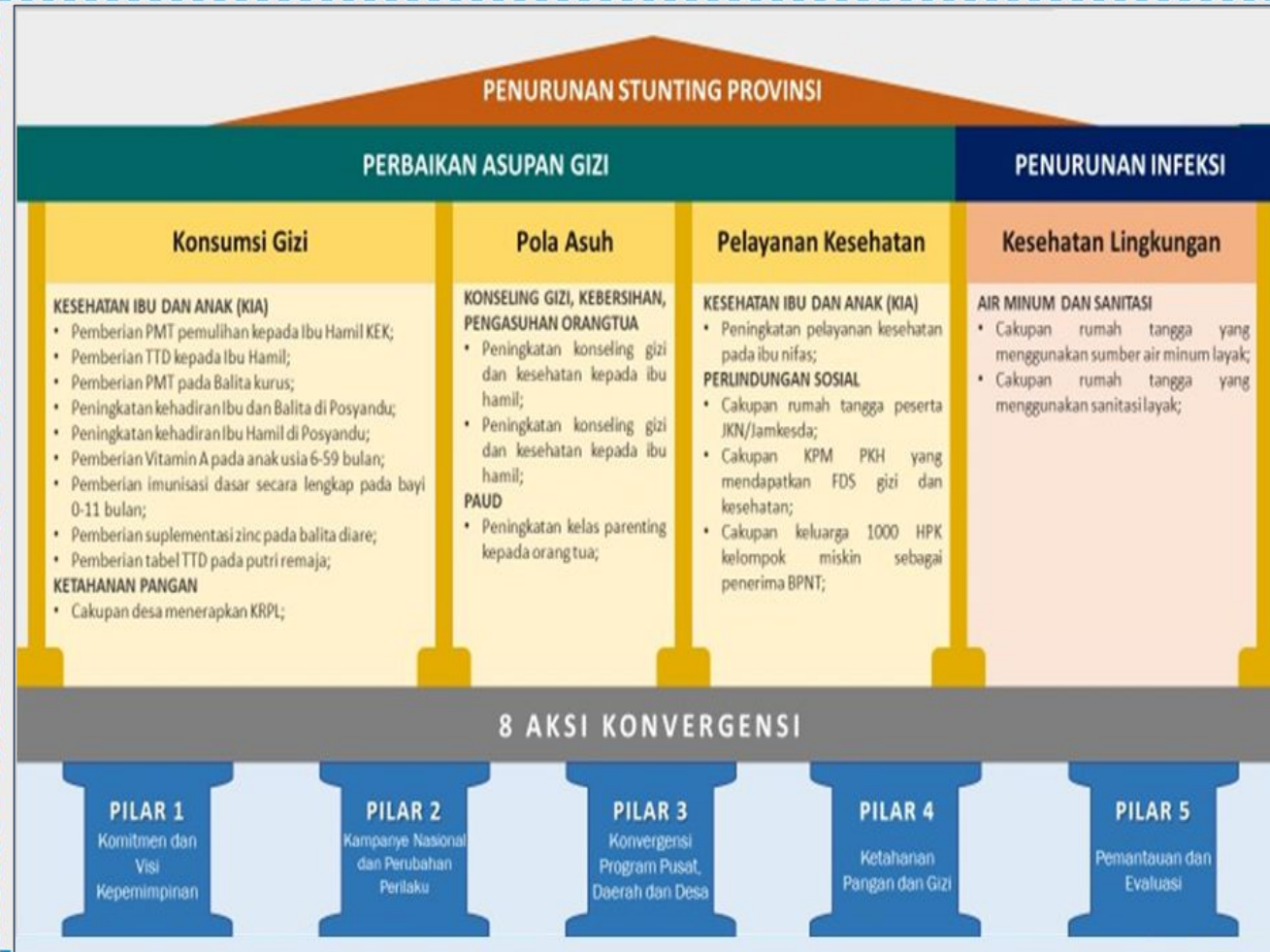
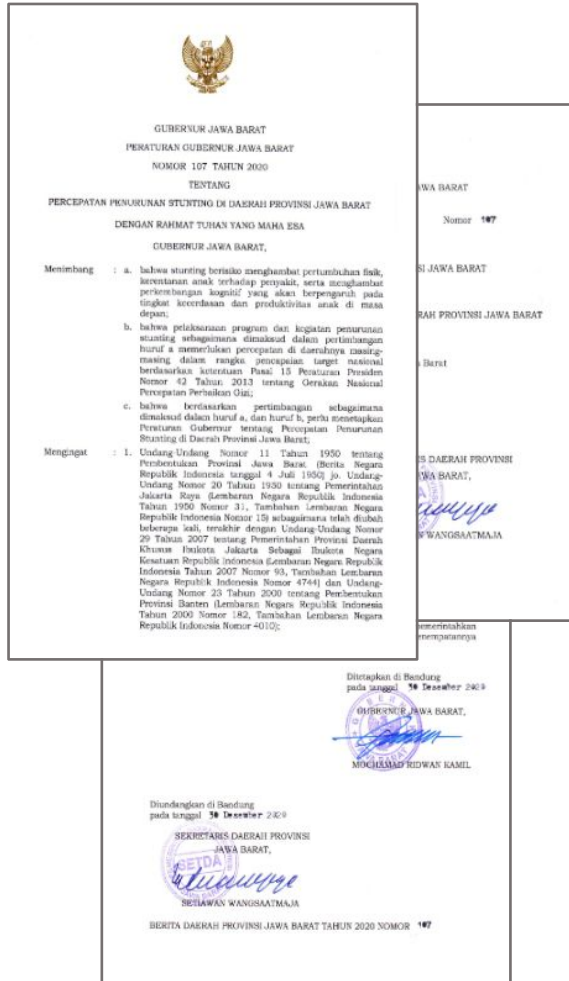
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



SETIAWAN WANGSAATMAJA



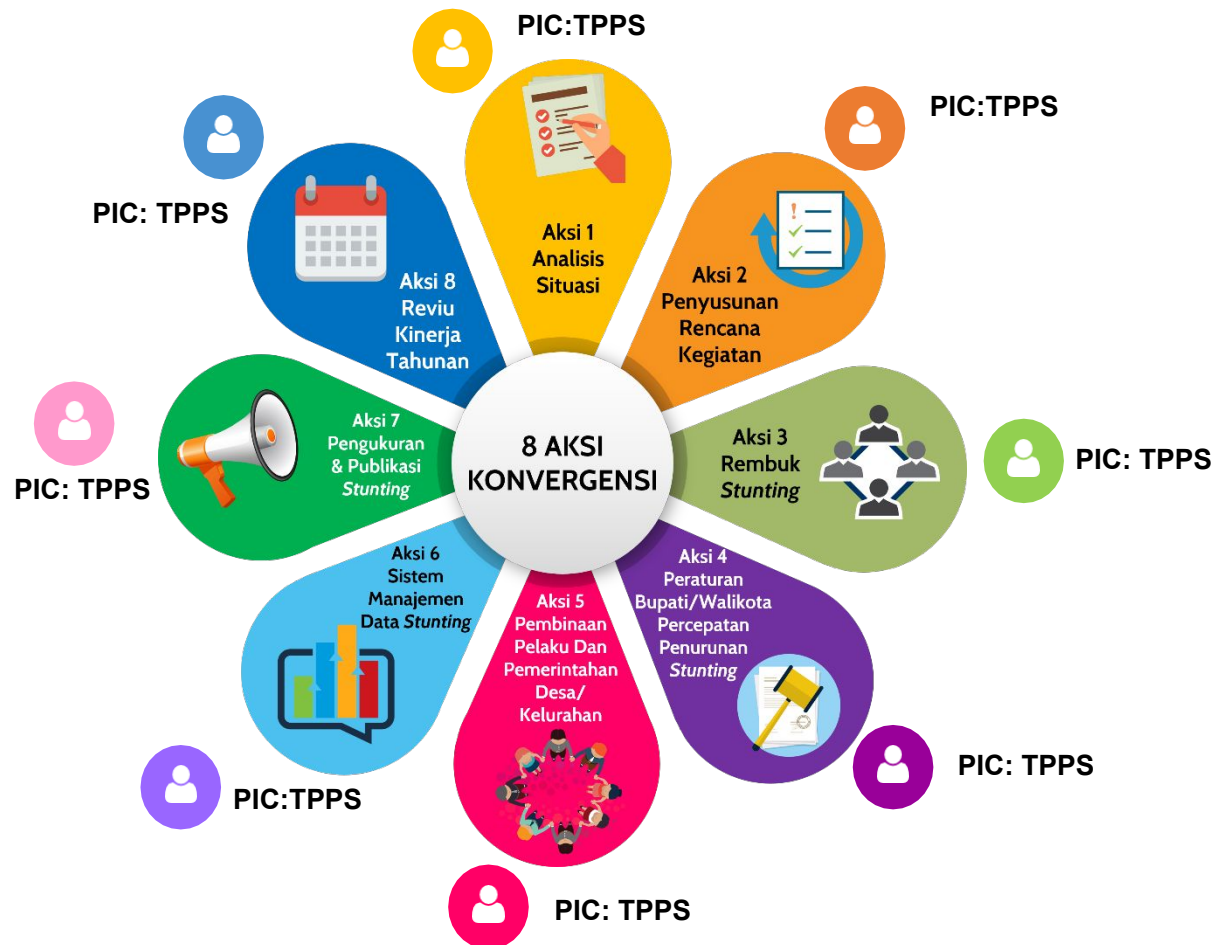
PERGUB JABAR NOMOR : 107 TAHUN 2020 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (LAMPIRAN I : RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING)



8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI

Percepatan Penurunan Stunting

“Merupakan instrumen dalam bentuk kegiatan untuk meningkatkan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif percepatan penurunan stunting”



Aksi 1: Mengidentifikasi **sebaran** prevalensi stunting, Keluarga berisiko stunting, kondisi cakupan layanan, **situasi** ketersediaan program, dan **praktik** manajemen layanan saat ini



Aksi 2: Rencana tindak lanjut kabupaten/kota dalam **merealisasikan** rekomendasi hasil analisis situasi dan 35 Indikator target



Aksi 3: Memastikan terjadinya **integrasi** pelaksanaan intervensi antara **OPD** dengan non-pemerintah dan masyarakat luas secara melalui Rembuk Stunting tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota



Aksi 4: Peraturan Bupati/Walikota Tentang upaya percepatan penurunan stunting dan pembagian peran pihak dari tingkat Desa/Kelurahan hingga tingkat Kabupaten/Kota



Aksi 5: Pembinaan pemerintah Desa/kelurahan dan masyarakat



Aksi 6: Upaya **pengelolaan data** di tingkat kabupaten/kota sampai tingkat desa/ kelurahan dalam mendukung pelaksanaan percepatan penurunan stunting.



Aksi 7: Publikasi hasil analisis prevalensi dan hasil audit *stunting*



Aksi 8: Review yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap **kinerja program** percepatan penurunan *stunting* selama satu tahun terakhir

KELEMBAGAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS) DAN TIM PENDAMPING KELUARGA (TPK) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



NO	KABUPATEN/KOTA	TPPS PROVINSI		TPPS KAB/KOTA		TPPS KECAMATAN		TPPS DESA/KELURAHAN	
		Sudah	Belum	Sudah	Belum	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	PROVINSI JAWA BARAT	√							
1	KAB. BOGOR			√		40	40	435	435
2	KAB. SUKABUMI			√		47	47	386	386
3	KAB. CIANJUR			√		32	32	360	360
4	KAB. BANDUNG			√		31	31	280	280
5	KAB. GARUT			√		42	42	442	442
6	KAB. TASIKMALAYA			√		39	39	351	351
7	KAB. KUNINGAN			√		27	27	265	265
8	KAB. CIREBON			√		32	32	376	376
9	KAB. MAJALENGKA			√		40	40	424	424
10	KAB. SUMEDANG			√		26	26	343	343
11	KAB. INDRAMAYU			√		26	26	277	277
12	KAB. SUBANG			√		31	31	317	317
13	KAB. KARAWANG			√		30	30	253	253
14	KAB. BANDUNG BARAT			√		17	17	192	192
15	KAB. BEKASI			√		30	30	309	309
16	KOTA BEKASI			√		23	23	187	187
17	KOTA DEPOK			√		16	16	165	165
18	KOTA BANDUNG			√		10	10	93	93
19	KAB. CIAMIS			√		6	6	68	68
20	KAB. PURWAKARTA			√		7	7	33	33
21	KOTA BOGOR			√		30	30	151	151
22	KOTA CIMAHI			√		5	5	22	22
23	KOTA TASIKMALAYA			√		12	12	56	56
24	KOTA CIREBON			√		11	11	63	63
25	KOTA SUKABUMI			√		3	3	15	15
26	KAB. PANGANDARAN			√		10	10	69	69
27	KOTA BANJAR			√		4	4	25	25
	TOTAL	1	0	27	0	627	627	5957	5957

NO	KABUPATEN/KOTA	TPK YANG SUDAH TERBENTUK	JUMLAH TPK (ORANG)
1	KAB. BOGOR	4.179	12.537
2	KAB. SUKABUMI	2.100	6.300
3	KAB. CIANJUR	1.908	5.724
4	KAB. BANDUNG	2.792	8.376
5	KAB. GARUT	1.991	5.973
6	KAB. TASIKMALAYA	1.436	4.308
7	KAB. KUNINGAN	899	2.697
8	KAB. CIREBON	1.749	5.247
9	KAB. MAJALENGKA	1.006	3.018
10	KAB. SUMEDANG	888	2.664
11	KAB. INDRAMAYU	1.413	4.239
12	KAB. SUBANG	1.229	3.687
13	KAB. KARAWANG	1.879	5.637
14	KAB. BANDUNG BARAT	1.377	4.131
15	KAB. BEKASI	2.398	7.194
16	KOTA BEKASI	1.959	5.877
17	KOTA DEPOK	1.584	4.752
18	KOTA BANDUNG	1.883	5.649
19	KAB. CIAMIS	947	2.841
20	KAB. PURWAKARTA	768	2.304
21	KOTA BOGOR	804	2.412
22	KOTA CIMAHI	438	1.314
23	KOTA TASIKMALAYA	552	1.656
24	KOTA CIREBON	257	771
25	KOTA SUKABUMI	266	798
26	KAB. PANGANDARAN	327	981
27	KOTA BANJAR	155	465
	TOTAL	37.184	111.552



REKAP SK DESA/KELURAHAN LOKUS 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN 2022	SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DESA/KELURAHAN LOKUS
1	KAB. BOGOR	37	SK Bupati Bogor Nomor : 444/384/Kpts/Per-UU/2021 tentang Penetapan Lokasi Intervensi Stunting di Kabupaten Bogor Tahun 2022
2	KAB. SUKABUMI	70	SK Bupati Sukabumi Nomor : 050/KEP-494/BAPPEDA/2021 tentang Lokus Prioritas tentang Pencegahan dan Penurunan stunting Terintegrasi Tahun 2022
3	KAB. CIANJUR	50	SK Bupati Cianjur Nomor 441.8/Kep.206-Dinkes/2020 tentang Penetapan Desa Lokus Intervensi Penurunan dan Pencegahan Stunting di Kab. Cianjur (lokus 2022 = Lokus 2021)
4	KAB. BANDUNG	65	SK Bupati Bandung Nomor : 463/Kep.189-DP2KBP3A tentang Penetapan Lokus Stunting Kabupaten Bandung Tahun 2022 , tanggal 21 Maret 2022.
5	KAB. GARUT	20	SK Bupati Garut No : 440/KEP.19-DINKES/2022 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Sebagai Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Tahun 2022
6	KAB. TASIKMALAYA	22	SK Bupati Tasikmalaya Nomor : 440/Kep.153 - Dinkes/2022 tentang Penetapan Desa Lokasi Khusus Konvergensi Intervensi Stunting Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.
7	KAB. KUNINGAN	48	SK Bupati Kuningan No : 050/KTPS.559-BAPPEDA/2022 tentang Penetapan Wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Lokus Penanggulangan Stunting Tahun 2022 di Kab. Kuningan.
8	KAB. CIREBON	59	SK Bupati Cirebon Nomor : 441.7/Kep.214-Dinkes/2021 tentang Penetapan Desa Lokus Tahun Intervensi 2022 Penurunan dan Pencegahan stunting
9	KAB. MAJALENGKA	37	SK Bupati Majalengka Nomor: 444/Kep.417-Dinkes/2021 tentang Penetapan Desa Lokus Penurunan dan Pencegahan stunting di Kabupaten Majalengka Tahun 2022
10	KAB. SUMEDANG	16	SK Bupati Sumedang Nomor : 151 Tahun 2021 tentang Penetapan perluasan desa Lokasi Fokus Intervensi Penurunan stunting Terintegrasi di Kab. Sumedang Tahun 2022
11	KAB. INDRAMAYU	11	SK Bupati Indramayu No : 444/Kep.230-Dinkes/2021 tentang Penetapan Nama desa Prioritas Pencegahan dan Penanggulangan stunting Tingkat Kab. Indramayu Tahun 2022
12	KAB. SUBANG	26	SK Bupati Subang No : KS.03.01.01/KEP.320-BP4D/2022 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokus Penurunan dan Percepatan Stunting Tahun 2022-2023 di Kab. Subang
13	KAB. KARAWANG	22	SK Bupati Karawang Nomor : 147/Kep . 243 - Huk/ 2022 tentang Penetapan Desa Lokus Penurunan dan Pencegahan Stunting Kab. Karawang Tahun 2022.
14	KAB. BANDUNG BARAT	20	SK Bupati Bandung Barat No : 188.45/Kep.288-Bappelitbangda/2021 tentang Penetapan Lokasi Prioritas Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kab. Bandung Barat Tahun 2022
15	KAB. BEKASI	75	SK Bupati Bekasi No : 050/Kep.262-Abpepda/2020 tentang Desa/Kelurahan Prioritas Penanganan Intervensi Penurunan Stunting di Kab. Bekasi tahun 2022-2022
16	KOTA BEKASI	29	SK Walikota Bekasi Nomor : 440/339.A-Bapelitbangda/V.2020 Ttentang Penetapan Kelurahan Untuk Penurunan dan Pencegahan Stunting Tahun 2021 & 2022
17	KOTA DEPOK	25	SK Walikota Depok Nomor:591/332/Kpts/Bappeda/Huk/2021 tentang Penetapan Kelurahan Lokus Penurunan dan Pencegahan Stunting Tahun 2022.
18	KOTA BANDUNG	30	SK Walikota Bandung No : 050/Kep.750-Bappelitbang/2021 tentang Perluasan Kelurahan Lokus Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Kota Bandung Tahun 2022
19	KAB. CIAMIS	20	SK Bupati Ciamis Nomor : 440/Kpts.483-Huk/2021 tentang Penetapan desa Lokasi Penurunan dan Pencegahan Stunting Kab. Ciamis Tahun 2022
20	KAB. PURWAKARTA	27	SK Bupati Purwakarta Nomor : 463/kep.731/Bappelitbangda/2021 tentang Penetapan Desa Lokasi Fokus (Lokus) Penurunan stunting di Kabupaten Purwakarta tahun 2022.
21	KOTA BOGOR	12	SK Wali Kota Bogor Nomor 440/kep.226-Bappeda/2021 tentang Penetapan Lokasi Kelurahan untuk Program Penurunan dan Pencegahan Stunting di Kota Bogor Tahun 2022
22	KOTA CIMAHI	15	Proses
23	KOTA TASIKMALAYA	27	SK Walikota Tasikmalaya No : 050.13/Kep.579-Bappelitbangda/2021 tentang Penetapan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Kota Tasikmalaya Tahun 2022.
24	KOTA CIREBON	11	SK Walikota Cirebon Nomor : 440/Kep . 210/BAPPEDA/2021 tentang Penetapan Lokasi Kelurahan Untuk Program Penurunan dan Pencegahan Stunting Kota Cirebon.
25	KOTA SUKABUMI	10	SK Walikota Sukabumi Nomor : 188.45/247- BAPPEDA/2021 tentang Kelurahan Lokasi Fokus Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting Kota Sukabumi Tahun 2022
26	KAB. PANGANDARAN	20	SK Bupati Pangandaran Nomor : KS.03.01.01/Kpts.177-Huk/2022 tentang Penetapan Lokus Prioritas Stunting Tahun 2022
27	KOTA BANJAR	4	SK Bupati No : 410/124/2021 tentang Penetapan Desa Lokus prioritas Pencegahan dan penurunan Tsunting Kota Banjar Tahun 2022



REKAP SK DESA/KELURAHAN LOKUS 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN 2023	SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DESA/KELURAHAN LOKUS
1	KAB. BOGOR	10	SK Bupati Bogor, No : 444/261/Kpts/Per-UU/2022 tentang Penetapan Lokasi Intervensi Stunting Di Kab. Bogor Tahun 2023
2	KAB. SUKABUMI	71	SK BUPATI SUKABUMI NOMOR K5.16/Kep. 410/BAPPELIBANGDA/2022 TENTANG LOKUS PRIORITAS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
3	KAB. CIANJUR	37	SK Bupati Cianjur No : 441.1/KEP.135-BAPPELIBANGDA/2022 tentang Penetaan Desa/Kleurahan Lokus Prioritas Pencegahan Stunting Kab. Cianjur Tahun 2023
4	KAB. BANDUNG	55	SK Bupati Bandung No : 463/Kep.301-DP2KBP3A/2022 tentang Penetpaan Desa Lokus Prioritas Penurunan dan Pencegahan Stunting di Kab. Bandung Tahun 2023
5	KAB. GARUT	18	SK Bupati Garut Nomor : 440/KEP.355DINKES/2022 tentang Penetpan Desa/Kelurahan Lokus Fokus Intervensi Penurunan dan Pencegahan Stunting Tahun 2023
6	KAB. TASIKMALAYA	67	Proses
7	KAB. KUNINGAN	60	Proses
8	KAB. CIREBON	28	SK Bupati Cirebon, No : 441/Kep.340-Dinkes/2022 tentang Penetapan desa Lokasi Khusus Intervensi Penurunan dan Pencegahan Stunting
9	KAB. MAJALENGKA	51	SK Bupati Majalengka Nomor: KS.02.00.00/KEP.293-DP3AKB/2022 tentang Desa Lokus Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023
10	KAB. SUMEDANG	28	SK Bupati Sumedang Nomor 220 Tahun 2022 tentang Penetapan Perluasan Desa Lokasi Fokus Intrvensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kab. Sumedang Tahun 2023
11	KAB. INDRAMAYU	14	SK Bupati Indramayu NOMOR : 444/Kep.152-Dinkes/2022 tentang Desa Prioritas Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kab. Indramayu Tahun 2023.
12	KAB. SUBANG	44	SK Bupati Subang No : KS.03.01.01/KEP.320-BP4D/2022 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokus Penurunan dan Percepatan Stunting Tahun 2022-2023 di Kab. Subang
13	KAB. KARAWANG	16	SK Bupati Karawang No : 147/Kep.287-Huk/2022 tentang Penetapan Desa Loku Penurunan dan Pencegahan Stunting Kab. Karawang Tahun 2023
14	KAB. BANDUNG BARAT	20	SK Bupati Bandung Barat No : 188.45/Kep.284-Bappelitbangda/2022 tentang Penetapan Lokasi Prioritas Percepatan Penurunan Stunting di Kab. Bandung Barat Tahun 2023.
15	KAB. BEKASI	39	Proses
16	KOTA BEKASI	17	SK Walikota Bekasi Nomor: 476/Kep-DPPKB/IV/2022 Tentang Penetapan Kelurahan Lokasi Fokus Penurunan dan Pencegahan Penurunan Stunting Kota Bekasi Tahun 2023
17	KOTA DEPOK	63	SK Walikota Depok Nomor : 591/49/Kpts/Bappeda/Huk/2022 Tentang Penetapan Kelurahan Lokasi Fokus Penurunan dan Pencegahan Stunting Tahun 2023 di Kota Depok
18	KOTA BANDUNG	56	SK Walikota Bandung No : 050/Kep.2092-Bappelitbang/2022 tentang Perluasan Kelurahan Lokasi Percepatan Penurunan Stunting Kota Bandung Tahun 2023
19	KAB. CIAMIS	10	SK Bupati Ciamis No : 444/Kpts.543-Huk/2022 tentang Penetapan Desa Lokasi Penurunan dan Pencegahan Stunting di Kab. Ciamis Tahun 2023.
20	KAB. PURWAKARTA	30	SK Bupati Purwakarta, No : 463/Kep-240-Bappelitbangda/2022 tentang Penetapan Desa Lokasi Fokus Penurunan Stunting Kab. Purwakarta Tahun 2023
21	KOTA BOGOR	8	Proses
22	KOTA CIMAHI	15	Proses
23	KOTA TASIKMALAYA	20	SK Walikta Tasikmalaya No : 050.13/Kep.402-DPPKBP3A/2022 tentang Penetapan Lokasi Fokus Stunting Terintegrasi Tahun 2023
24	KOTA CIREBON	15	SK Walikota Cirebon No : 400/Kep. 187-Bappelitbangda/2022 tentang Penetpan Loaksi Fokus Kelurahan untuk program Penurunan Stunting di Kota Cirebon Tahun 2023.
25	KOTA SUKABUMI	6	SK Walikota Sukabumi No : 188.45/157-BAPPEDA/2022 tentang Kelurahan Lokasi Fokus Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kota Sukabumi tahun 2023
26	KAB. PANGANDARAN	13	SK Bupati Pangandaran No : KS.03.01.01/Kpts.202-Huk/2022 tentang Penetapan Loku Prioritas Stunting Tahun 2023
27	KOTA BANJAR	5	SK Walikota Banjar No : 410/173/2022 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokus Percepatan Penurunan Stunting Kota Banjar Tahun 2023

KAITAN RAN PASTI DAN 8 AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING



#1. Analisis situasi

Koordinator: Bappeda

1. Dilakukan penyesuaian form analisis situasi dari **20 menjadi 29 indikator**.esensial , juga indikatif supply
2. Sasaran **catin dan utamanya 1000 HPK**
3. Memetakan program dan kegiatan berdasarkan perpres dan RAN PASTI

#3. Rembuk Stunting

Kabupaten/Kota

Koordinator: Sekretaris Daerah

Komitmen rencana aksi menjawab upaya pencapaian 64 indikator untuk dimuat dalam RKPD/Renja OPD tahun berikutnya.

#5. Pembinaan kader

Koordinator: Delegasi OPD

1. Sinkronisasi tugas KPM, TPK & kader lainnya.
2. Legalitas dan peningkatan kapasitas KPM & TPK
3. Skema insentif

#7. Pengukuran & publikasi

Koordinator: Dinas Kesehatan

1. Dilakukan pemantauan (tidak saja pertumbuhan) tetapi juga perkembangan balita dengan Kartu Kembang Anak (KKA).
KKA menjadi parameter gangguan perkembangan baduta/balita stunting.
2. Menjadi bahan audit kasus stunting

Jan

Feb

Mar

Aprl

Mei

Juni

Juli

Ags

Sept

Okt

Nov

Des

#2, Menyusun rencana kegiatan

Koordinator: Bappeda

Memasikan rekomendasi program & kegiatan hasil analisis situasi dituangkan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran kabupaten/kota dan OPD

#4. Perbup/perwali ttg kewenangan desa

Koordinator:

Pemrakarsa/delegasi

Berdasarkan hasil analisis situasi, min 10% APBDes, peran camat, penguatan kelembagaan (TPK, posyandu, BKB), capaian konvergensi layanan berbasis keluarga berisiko stunting*

#6. Manajemen data

Koordinator: Bappeda

1. Kebutuhan & kesenjangan data dan indikator
2. Perluasan jangkauan & peningkatan kualitas surveilans keluarga berisiko stunting-elsimil & eppgbm
3. Berbagipakai data/interoperabilitas antar system data


#8 reviu tahunan

Koordinator: Sekretaris Daerah dan Bappeda

Fokus pada konvergensi tingkat keluarga dan rencana percepatan ke depan.

#7. Pengukuran & publikasi

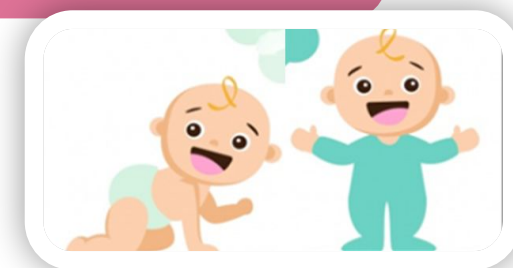
- Pelaksanaan Rembuk Stunting sejatinya diselenggarakan sebelum atau bersamaan dengan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota;
- Jika pelaksanaan Rembuk Stunting dilaksanakan setelah penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten/Kota, diharapkan momen ini dapat menjadi wadah untuk mengkonfirmasi *cross cutting* program percepatan penurunan stunting dan keterpaduan sasaran di lintas sektor perangkat daerah pada RKPD Kabupaten/Kota.



CAPAIAN INDIKATOR SPESIFIK PENURUNAN STUNTING TAHUN 2022 DAN 2023



- Ibu hamil mendapat TTD minimal 90 tablet: 90.44% (target 82%)
- Ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan 85,70% (target 80%)



- Balita <6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif 71,11% (target 70%)
- Baduta mendapat MP-ASI 75,46%* (target 80%)
- Balita Gizi Kurang Mendapat Makanan Tambahan 63,28% (Target 80%)
- Balita Gizi Buruk Mendapat Pelayanan Tatalaksana Gizi Buruk 98,36% (Target 86%)
- Balita yang Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya 79,19% (target 75%)
- Imunisasi Dasar Lengkap 101% (target 90%)



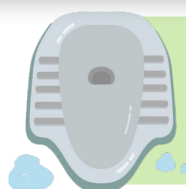
Beberapa indikator cakupan layanan program yang mempengaruhi penurunan stunting belum mencapai target.

Desa/Kel Mendapat Akses air minum layak: 89.77% (target 90%)

- Desa/Kel Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS/ODF): 77,0% (target 70%)
- Rumah Tangga Mendapat akses sanitasi layak: 90,43% (target 87.75%)



Universal Health Coverage (UHC): 83,39% (target 95%)



Penurunan prevalensi stunting sangat dipengaruhi oleh cakupan layanan program dalam implementasi intervensi spesifik. Berdasarkan data laporan program, beberapa indikator layanan yang mempengaruhi target penurunan stunting masih belum mencapai target. Sehingga masih diperlukan upaya akselerasi pencapaian target program intervensi spesifik. Berdasarkan hasil kajian Lancet (2013) menyebutkan jika cakupan layanan akan berdampak jika cakupan bisa mencapai 90% minimal.

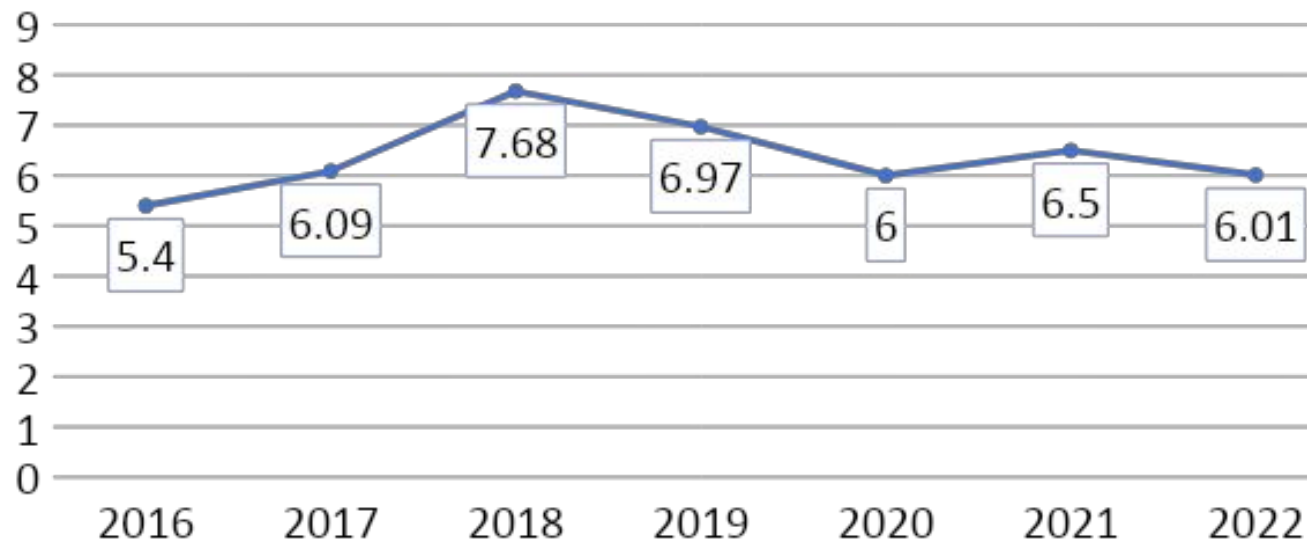
STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Perpes 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting

Target antara percepatan penurunan stunting

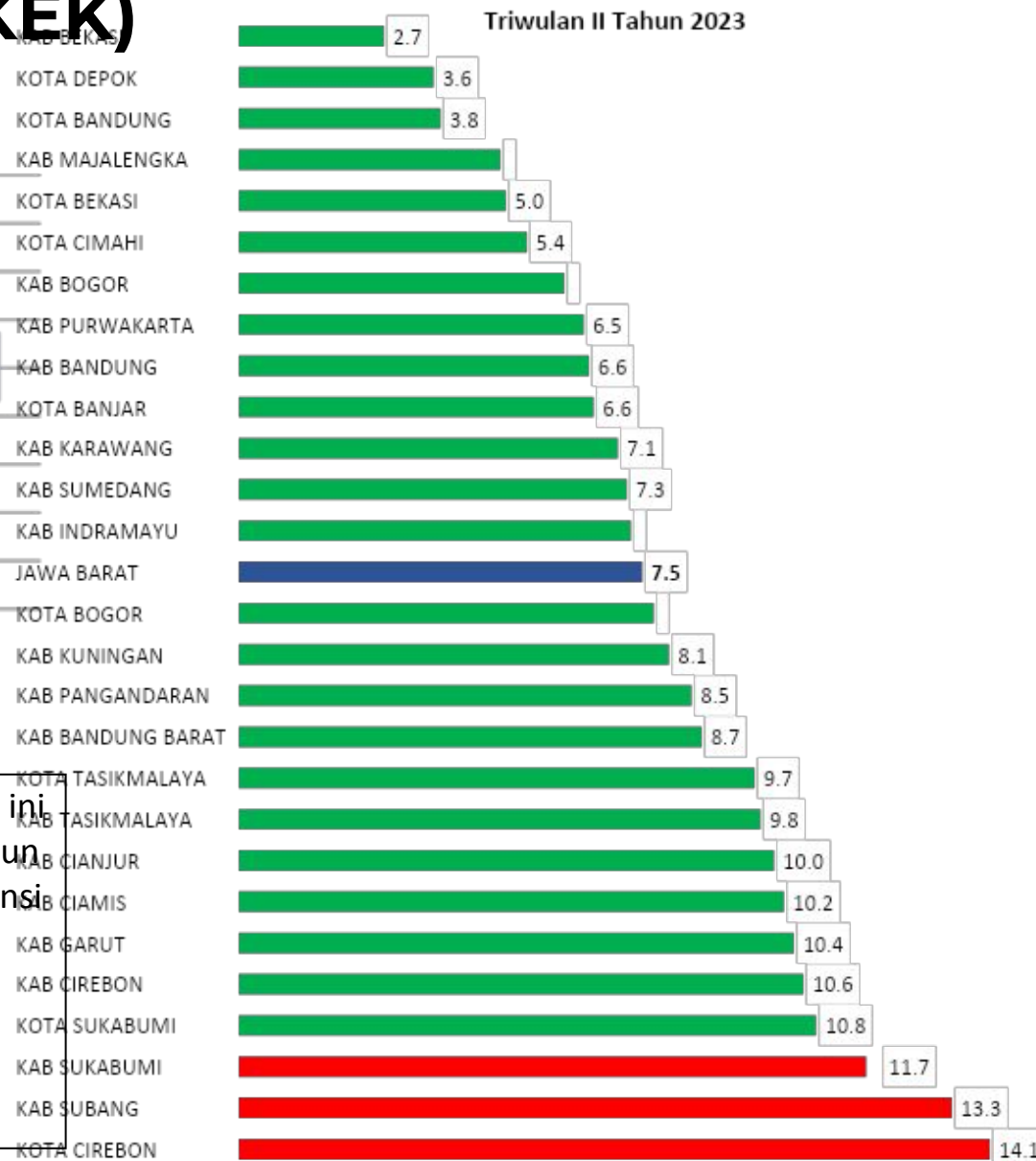
Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan tahun percepatan	Penanggung Jawab	Kementerian /Lembaga/Pihak Pendukung
1. Tersedianya layanan Intervensi Spesifik	1. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Target 90% Tahun 2024	Kementerian Kesehatan (Kesmas)	Kementerian Dalam Negeri, kementyerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Kependududukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemangku Kepentingan

PRESENTASE IBU HAMIL RISIKO KURANG ENERGI KRONIK (KEK)

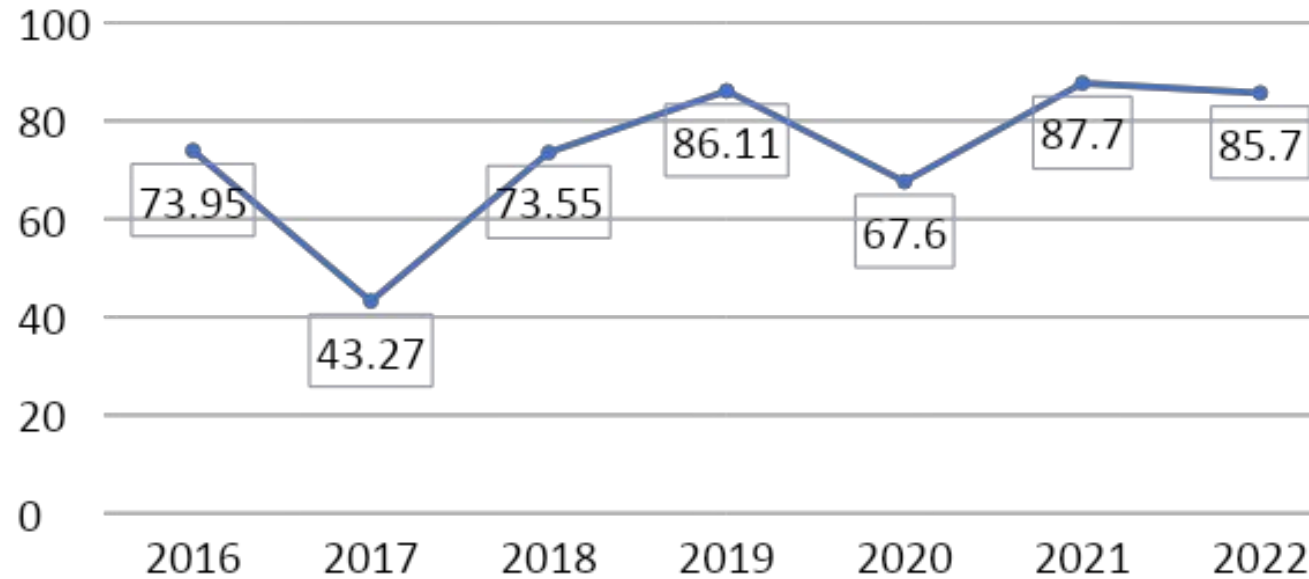


Pada **triwulan II tahun 2023** presentase bumil KEK **sebesar 7,5%**. Hal ini masih menjadi **masalah kesehatan masyarakat** karena masih di atas **5%** walaupun target Jawa Barat pada tahun 2023 (11,5%), sehingga perlu penguatan intervensi spesifik yang lebih optimal.

Sumber data:
 2016-2020 Laporan Kabupaten Kota
 2021 Laporan Kabupaten/Kota Melalui SIGIZI TERPADU data Triwulan IV per 23 Maret 2022
 2022 Laporan Kabupaten Kota Melalui SIGIZI TERPADU data Triwulan IV diunduh 2 FEBRUARI 2023
 2023 Laporan Kabupaten Kota Melalui SIGIZI TERPADU data Triwulan II diunduh 8 Juli 2023

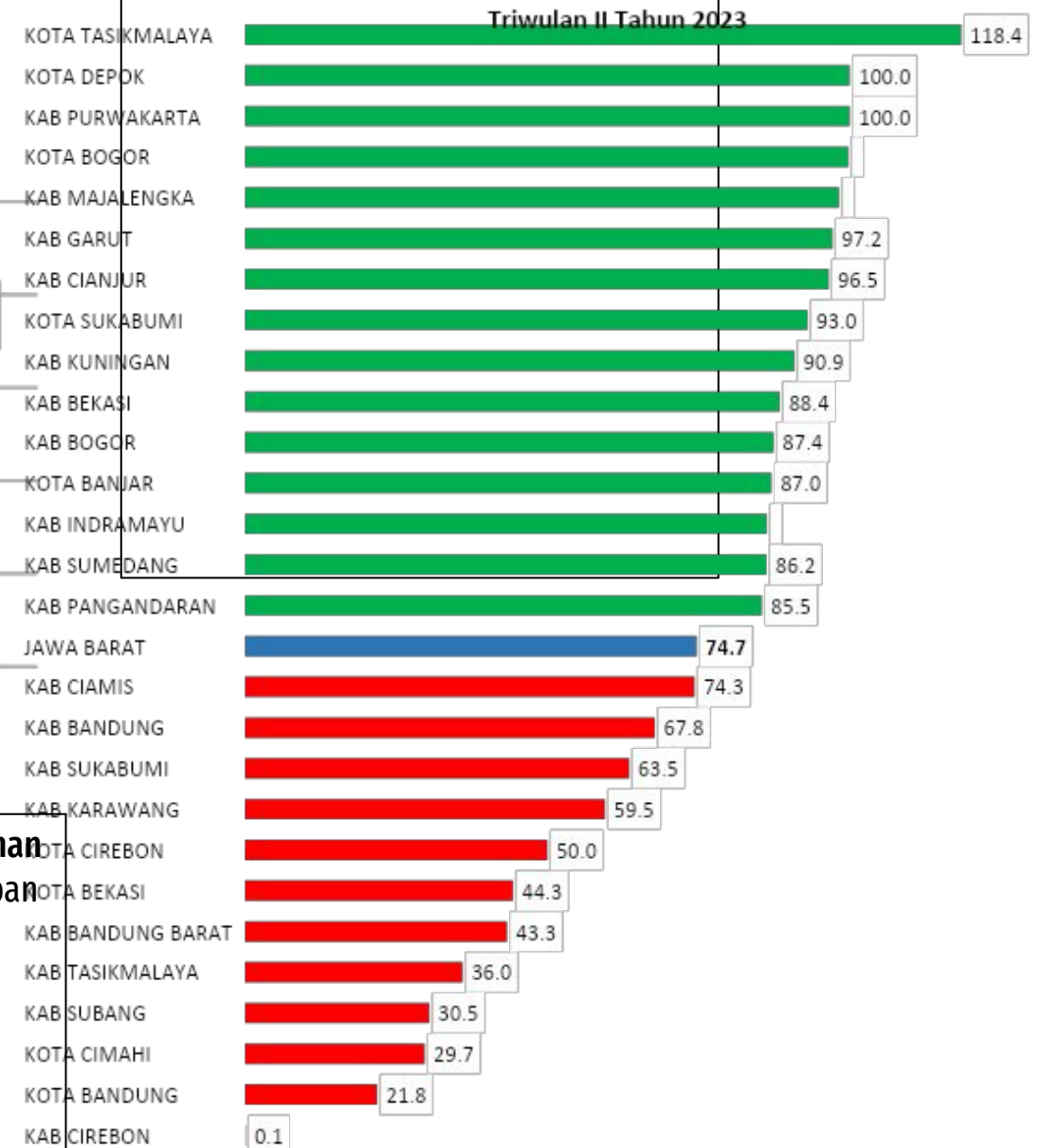


CAKUPAN IBU HAMIL KURANG ENERGI KRONIK (KEK) YANG MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN



Pada Triwulan II tahun 2023, cakupan layanan Ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan di Jawa Barat mencapai **74,7%**, masih dibawah target Jabar (**80%**). 11 kab / kota cakupan makanan tamban kurang dari target dikarenakan distribusi belum optimal.

Sumber data:
 2016-2020 Laporan Kabupaten Kota
 2021 Laporan Kabupaten Kota Melalui SIGIZI TERPADU data Triwulan IV diunduh 23 Maret 2022
 2022 Laporan Kabupaten Kota Melalui SIGIZI TERPADU data Triwulan IV diunduh 2 Februari 2023
 2023 Laporan Kabupaten Kota Melalui SIGIZI TERPADU data Triwulan II diunduh 8 Juli 2023



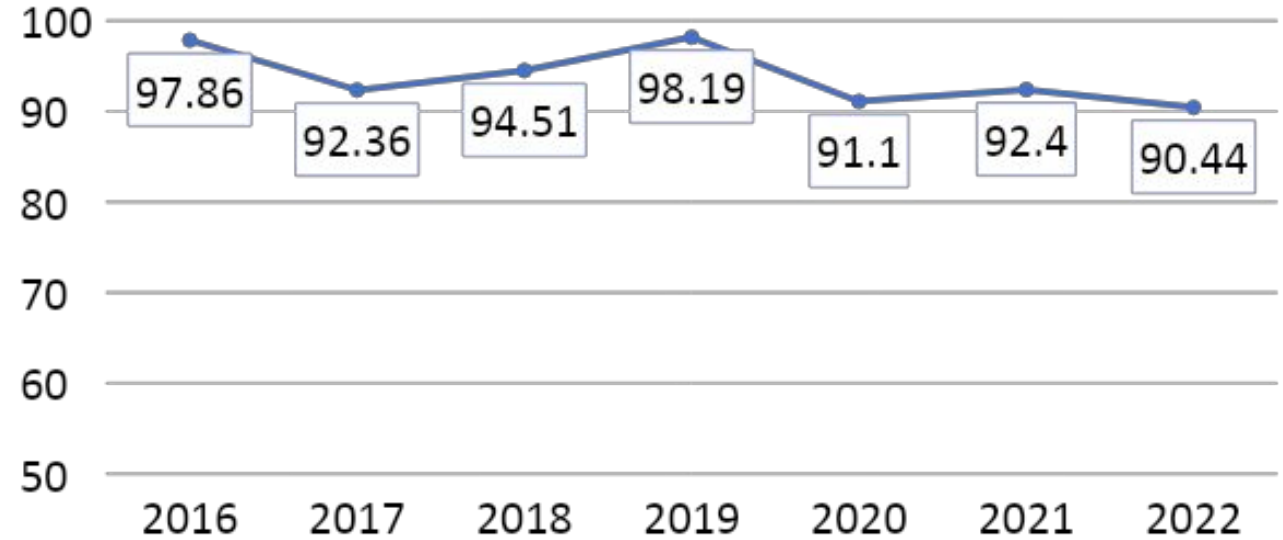
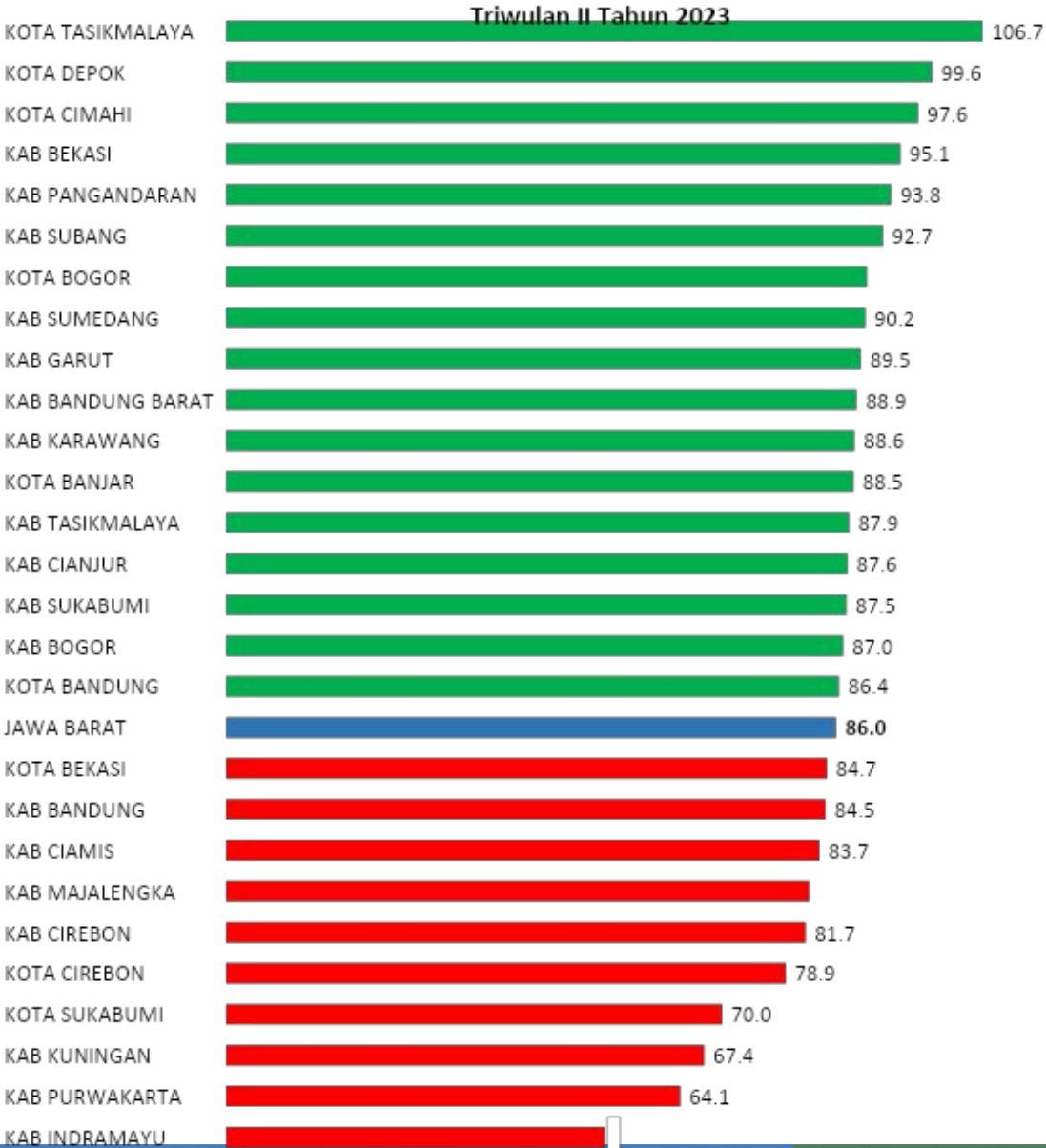
STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Perpes 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting

Target antara percepatan penurunan stunting

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan tahun percepatan	Penanggung Jawab	Kementerian /Lembaga/Pihak Pendukung
1. Tersedianya layanan Intervensi Spesifik	2. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	Target 80% Tahun 2024	Kementerian Kesehatan (kesmas)	Kementerian Dalam Negeri, kementyerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemangku Kepentingan
	3. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	Target : 58% Tahun 2024	Kementerian Kesehatan (kesmas)	Kementerian Dalam Negeri, kementyerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemangku Kepentingan

CAKUPAN IBU HAMIL MENDAPAT TTD MINIMAL 90 TABLET SELAMA MASA KEHAMILAN



Pada **triwulan II tahun 2023** cakupan **86,0%**, sudah mencapai target jawa barat tahun 2023 (**85%**). Namun masih ada 10 Kab/Kota yang masih di bawah target.

Sumber data:

2016-2020 Laporan Kabupaten Kota

2021 Laporan Kabupaten Kota Melalui SIGIZI TERPADU data Triwulan IV diunduh 23 Maret 2022

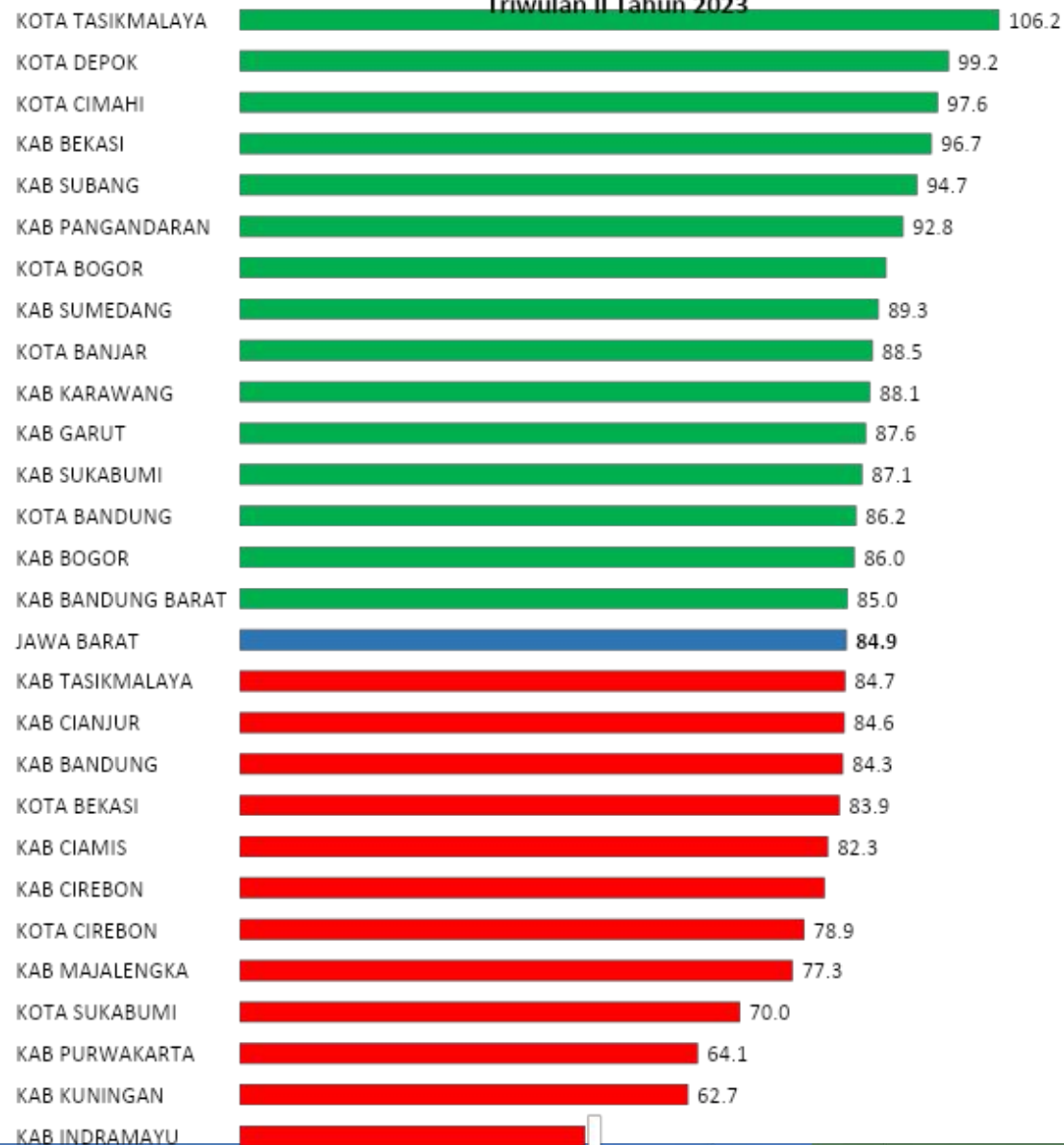
2022 Laporan Kabupaten Kota Melalui SIGIZI TERPADU data Triwulan IV diunduh 2 Februari 2023

2023 Laporan Kabupaten Kota Melalui SIGIZI TERPADU data Triwulan II diunduh 8 Juli 2023

CAKUPAN IBU HAMIL MENGGUNAKAN TTD MINIMAL 90 TABLET SELAMA MASA KEHAMILAN



Triwulan II Tahun 2023



Pada **triwulan II tahun 2023** cakupan **84,9%**, masih di bawah target jawa barat (**85%**). 12 kab / kota masih di bawah target provinsi.

Sumber data:

2016-2020 Laporan Kabupaten Kota

2021 Laporan Kabupaten Kota Melalui SIGIZI TERPADU data Triwulan IV diunduh 23 Maret 2022

2022 Laporan Kabupaten Kota Melalui SIGIZI TERPADU data Triwulan IV diunduh 2 Februari 2023

2023 Laporan Kabupaten Kota Melalui SIGIZI TERPADU data Triwulan I diunduh 8 Juli 2023

CAKUPAN REMAJA PUTRI MENDAPAT TABLET TAMBAH DARAH (TTD)

REMATERI YANG MENDAPAT TTD TRIWULAN 1 TAHUN 2023



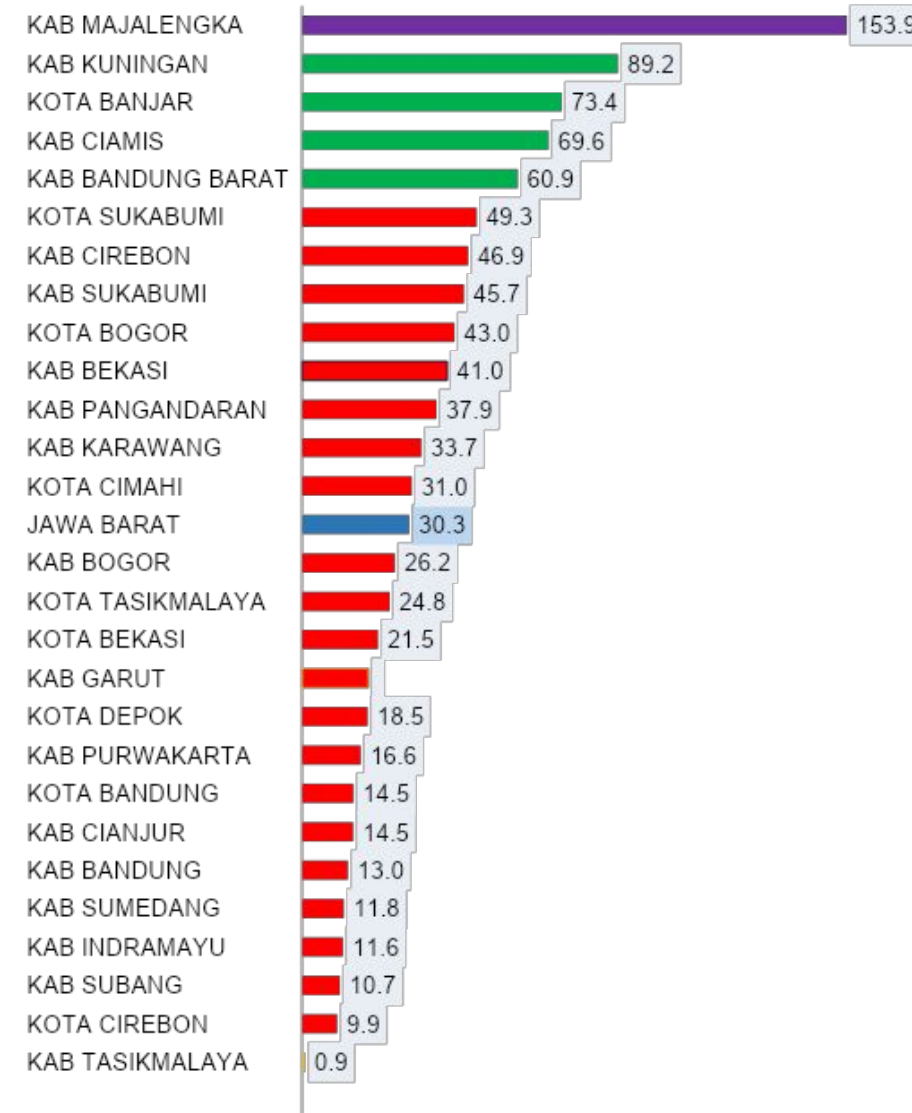
- Tren pemberian TTD rematri di Jawa Barat mengalami penurunan. Paling rendah tahun 2017 dikarenakan kurangnya logistic yang ada. Di tahun 2020 mengalami keterlambatan distribusi logistik dari pusat (TW IV) dan SFH. Sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan karena masa pandemic masih menjadi penghambat dalam pendistribusian serta pencatatan dan pelaporan di beberapa Kab/Kota
- Cakupan rematri mendapat TTD di Jawa Barat pada triwulan 1 tahun 2023 sebesar 30,3% jauh dibawah target provinsi (56%). Hanya 4 kab/kota yang mencapai target cakupan dan 1 kab/kota memiliki data ekstrim diatas target.

Sumber data:

2016-2021 Laporan Kabupaten Kota

2022 Laporan Kabupaten Kota Melalui SIGIZI TERPADU data Triwulan IV diunduh 2 Februari 2023

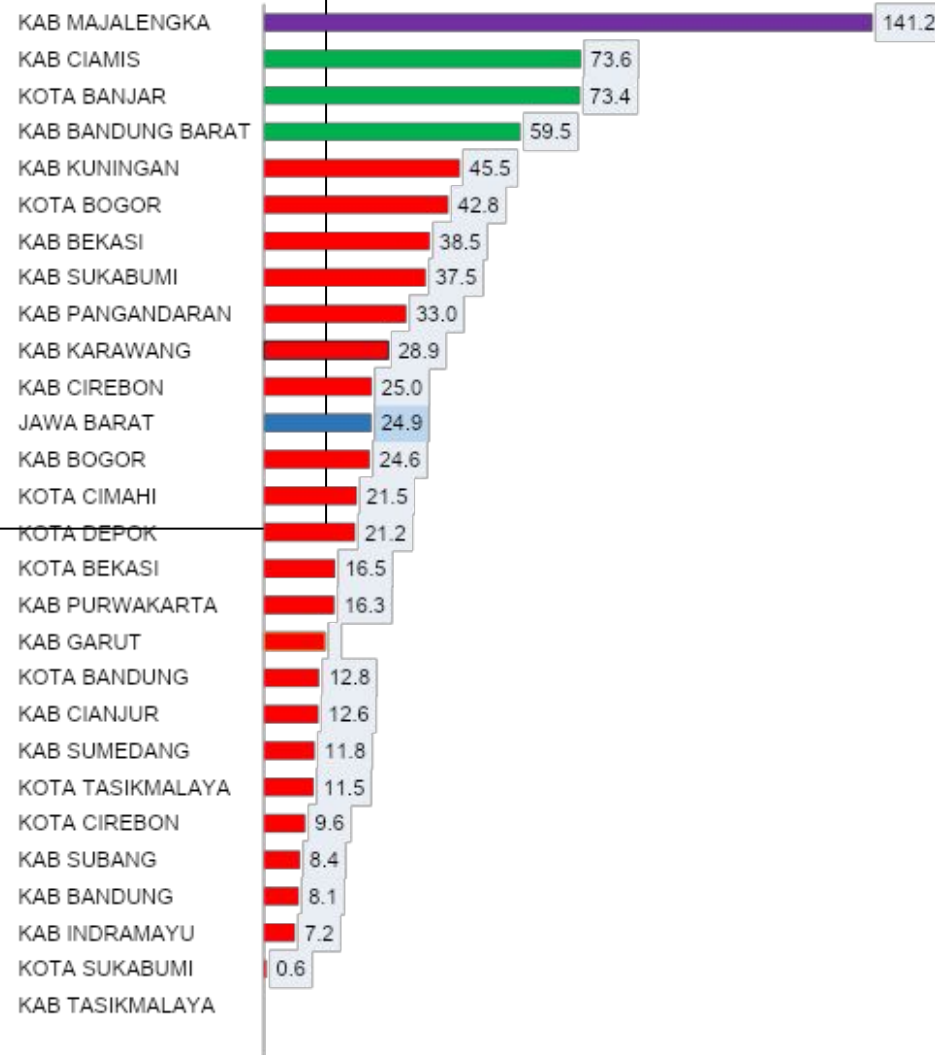
2023 Laporan Kabupaten/Kota Melalui SIGIZI TERPADU data Triwulan I per 27 April 2023



PRESENTASE REMAJA PUTRI MEMINUM TTD SESUAI



REMAJRI YANG MENDAPAT TTD DAN MINUM TTD



- Dari hasil laporan Triwulan 1 Tahun 2023 didapatkan hasil cakupan provinsi sebesar 24,9% masih dibawah target provinsi (56%)
- Terdapat 4 Kab/Kota yang mencapai target
- Terdapat 1 Kab yang mempunyai nilai ekstrim

Sumber data:

Laporan Kabupaten/Kota Melalui SIGIZI TERPADU data Triwulan I per 27 April 2023

STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Perpes 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting

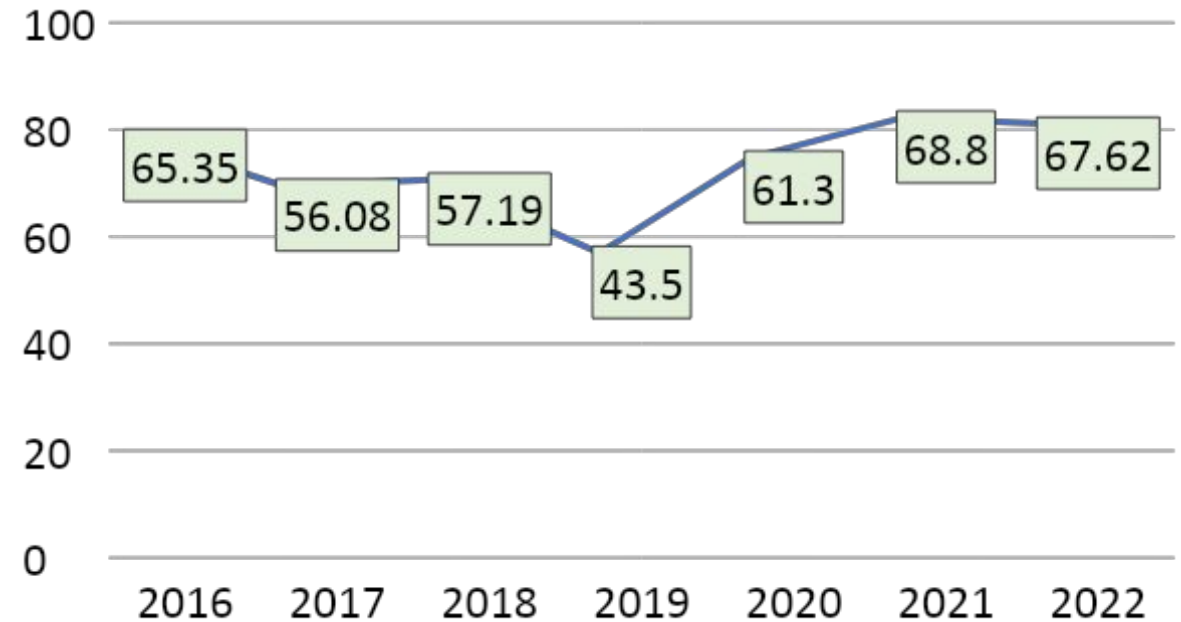
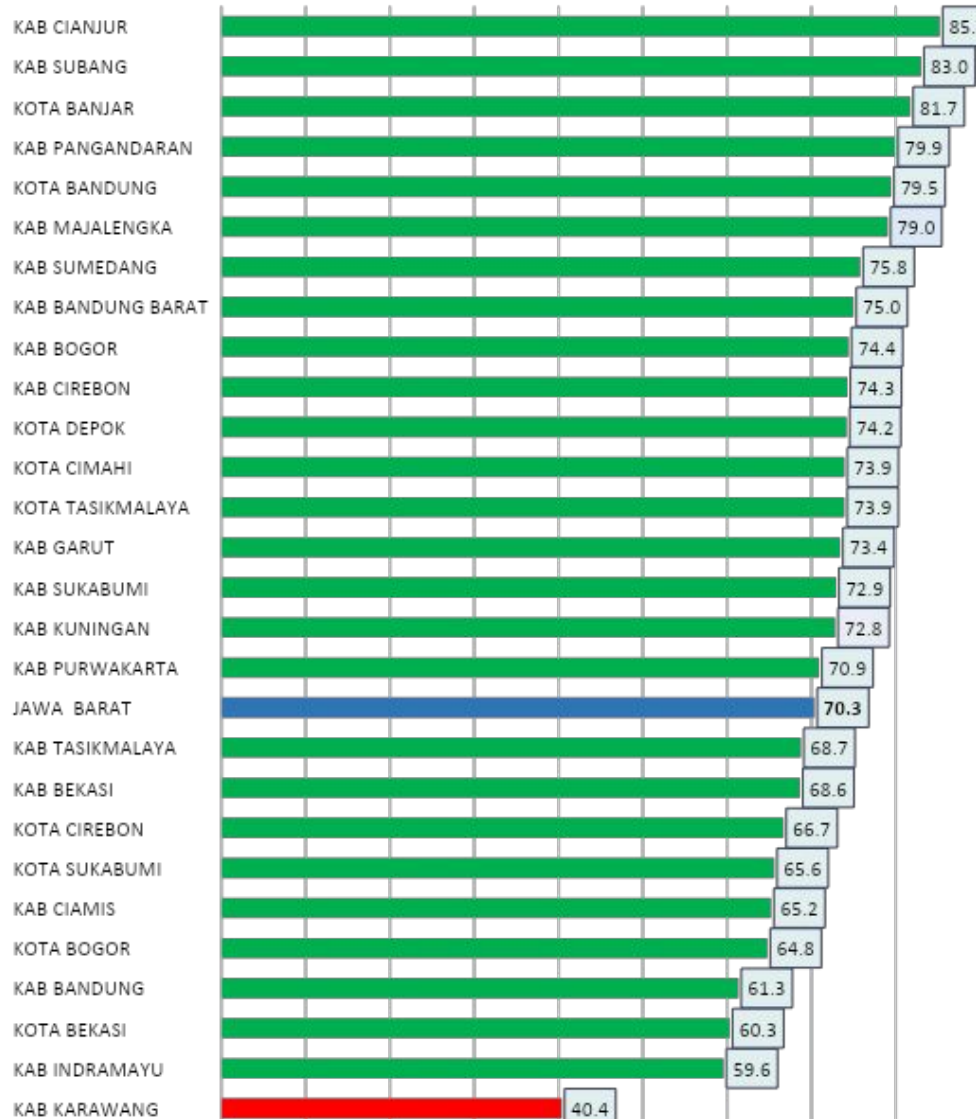
Target antara percepatan penurunan stunting

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan tahun percepatan	Penanggung Jawab	Kementerian /Lembaga/Pihak Pendukung
1. Tersedianya layanan Intervensi Spesifik	4. Persentase Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	Target 80% Tahun 2024	Kementerian Kesehatan (Kesmas)	Kementerian Dalam Negeri, kementyerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Kependududukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemangku Kepentingan
	5. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	Target : 80% Tahun 2024	Kementerian Kesehatan (Kesmas)	Kementerian Dalam Negeri, kementyerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Kependududukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemangku Kepentingan

CAKUPAN BAYI KURANG DARI 6 BULAN MENDAPAT ASI EKSKLUSIF



Triwulan II Tahun 2023



Pada Triwulan II tahun 2023 cakupan Bayi < 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif 70,3%, Sudah mencapai target Provinsi (55%), tetapi masih ada 1 Kab yang belum mencapai target

Sumber data:

2016-2020 Laporan Kabupaten Kota

2021 Laporan Kabupaten Kota Melalui SIGIZI TERPADU data Triwulan IV diunduh 23 Maret 2022

2022 Laporan Kabupaten Kota Melalui SIGIZI TERPADU data Triwulan IV diunduh 2 Februari 2023

2023 Laporan Kabupaten Kota Melalui SIGIZI TERPADU data Triwulan II diunduh 28 Juli 2023

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
1	KAB BOGOR	68941
2	KAB SUKABUMI	90293
3	KAB CIANJUR	48173
4	KAB BANDUNG	86666
5	KAB GARUT	1665
6	KAB TASIKMALAYA	26059
7	KAB CIAMIS	41833
8	KAB KUNINGAN	1011
9	KAB CIREBON	23058
10	KAB MAJALENGKA	12977
11	KAB SUMEDANG	16274
12	KAB INDRAMAYU	24561
13	KAB SUBANG	28579
14	KAB PURWAKARTA	14571
15	KAB KARAWANG	15160
16	KAB BEKASI	52859
17	KAB BANDUNG BARAT	18533
18	KAB PANGANDARAN	13076
19	KOTA BOGOR	24410
20	KOTA SUKABUMI	2787
21	KOTA BANDUNG	34558
22	KOTA CIREBON	6414
23	KOTA BEKASI	29901
24	KOTA DEPOK	9386
25	KOTA CIMAHI	785
26	KOTA TASIKMALAYA	10940

Persentase Anak Usia 6-23 Bulan yang Mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)

- Jumlah anak usia 6-23 bulan yang mendapat MP-ASI di Jawa Barat mencapai **710.0948 balita**.
- Saat ini MP-ASI yang memenuhi didefinisikan sebagai makanan yang memenuhi minimal 5 dari 8 komponen makanan dan frekuensinya cukup sesuai umurnya
- Data yang ada baru data di triwulan II

Sumber data:

2022 Laporan Kabupaten/Kota melalui SIGIZI TERPADU data Triwulan IV diunduh 9 JULI 2023

STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Perpes 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting

Target antara percepatan penurunan stunting

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan tahun percepatan	Penanggung Jawab	Kementerian /Lembaga/Pihak Pendukung
1. Tersedianya layanan Intervensi Spesifik	6. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	Target 90% Tahun 2024	Kementerian Kesehatan (Kesmas)	Kementerian Dalam Negeri, kementyerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemangku Kepentingan
	7. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang di pantau pertumbuhan dan perkembangannya	Target : 90% Tahun 2024	Kementerian Kesehatan (Kesmas)	Kementerian Dalam Negeri, kementyerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemangku Kepentingan

CAKUPAN KASUS BAYI 0-59 BULAN GIZI BURUK MENDAPAT PERAWATAN PERTAMA KALI

- Pada Triwulan II tahun 2023 cakupan bayi 0-59 bulan dengan status gizi buruk mendapat perawatan pertama kali sebesar 95,4%, Sudah mencapai target Provinsi. (88%). Namun terdapat 2 kab dengan data ekstrim dengan cakupan 198,2 % dan 103,2%%.
- Perlu dilihat kembali apakah penanganan/perawatanya sudah sesuai dengan Tatalaksana Gizi buruk dan validasi data kembali ke Kab/Kota.
- Terdapat 2 Kb/kota yang capaiannya 0%, perlu di koordinasikan Kembali apakah memang tidak ada kasus atau belum melaporkan

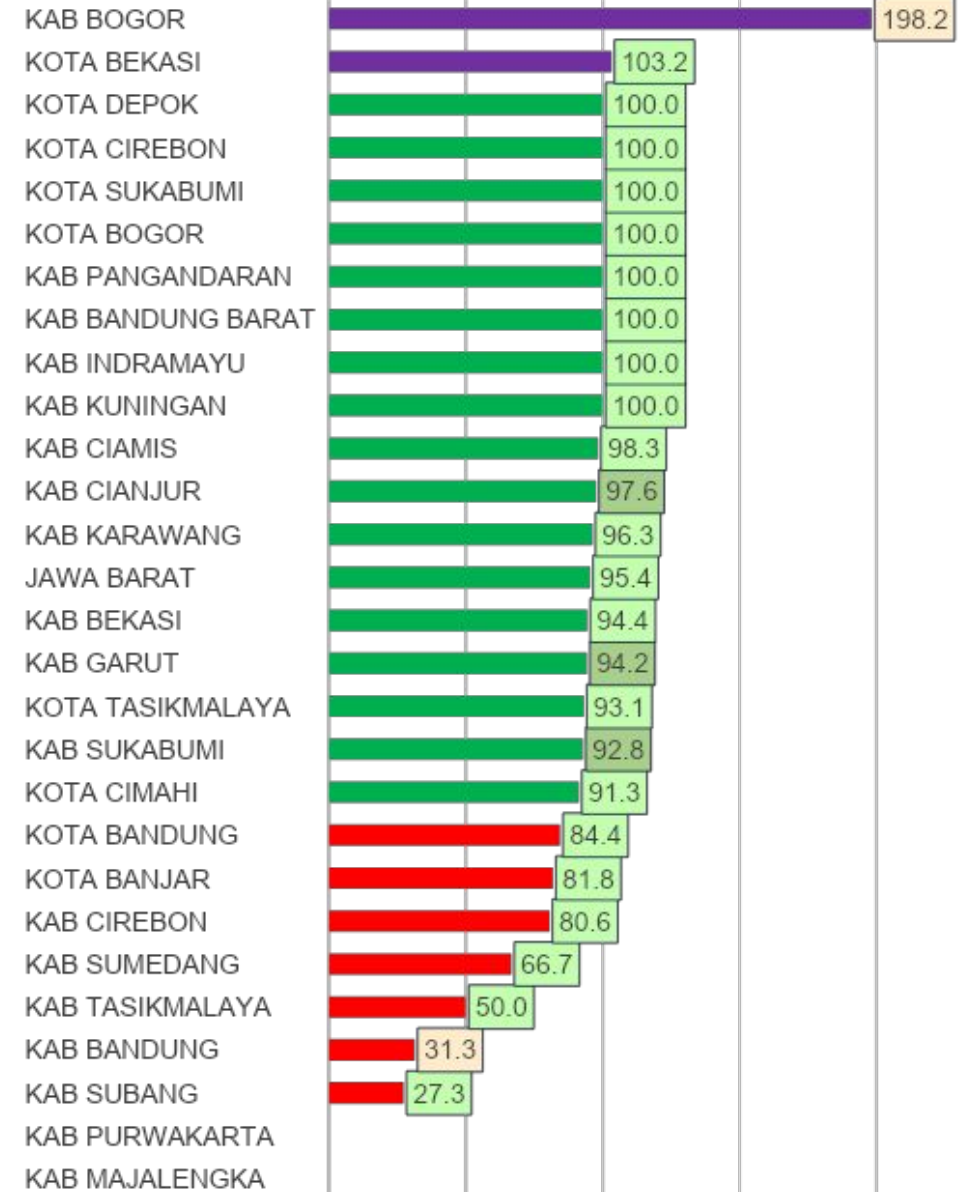
Sumber data:

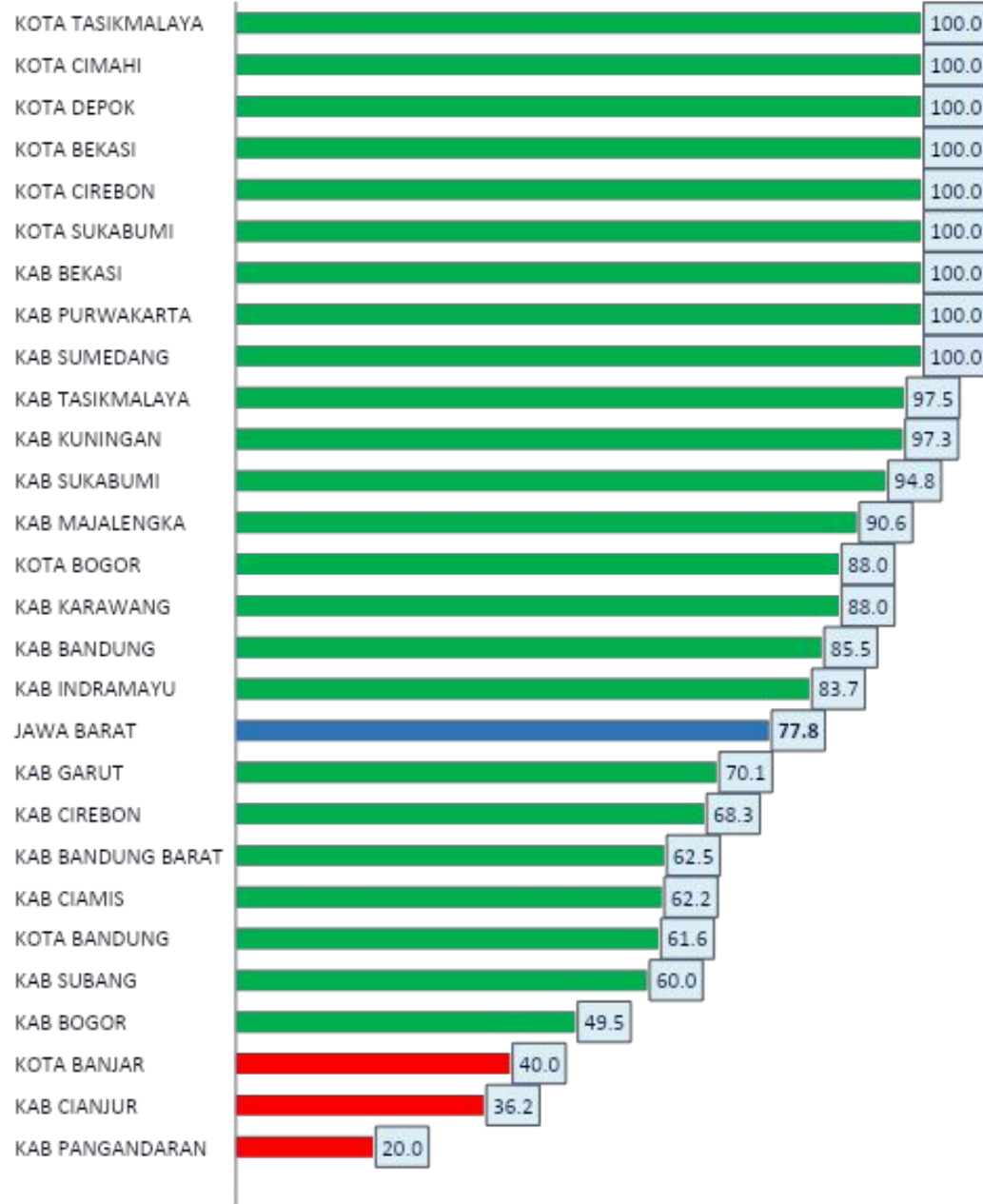
2016-2020 Laporan Kabupaten Kota

2021 Laporan Kabupaten Kota Melalui SIGIZI TERPADU data Triwulan IV diunduh 23 Maret 2022

2022 Laporan Kabupaten/Kota melalui SIGIZI TERPADU data Triwulan IV diunduh 2 Februari 2023

2023 Laporan Kabupaten Kota Melalui SIGIZI TERPADU data Triwulan II diunduh 8 Juli 2023





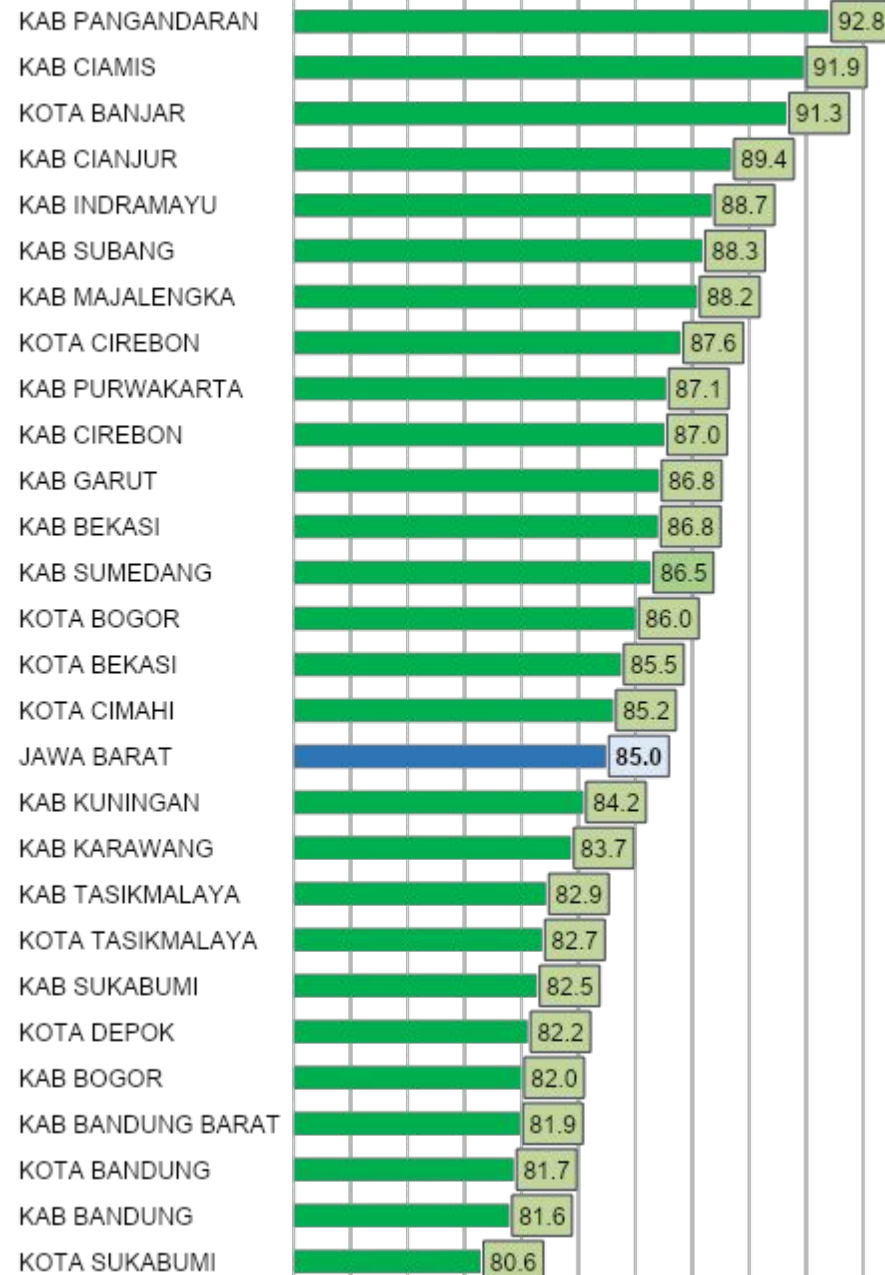
PERSENTASE PUSKESMAS MAMPU TATALAKSANA GIZI BURUK

Persentase PKM mampu tatalaksana gizi buruk berdasarkan SOP yang sudah diupload di Jawa Barat **sebesar 77,8%**, di atas angka target Jabar (45%), dan hanya 3 kab / kota belum mencapai target capaian. Namun tetap perlu berkoordinasi dan memastikan terkait SOP sudah sesuai dan di upload rutin ke SIGIZI TERPADU.

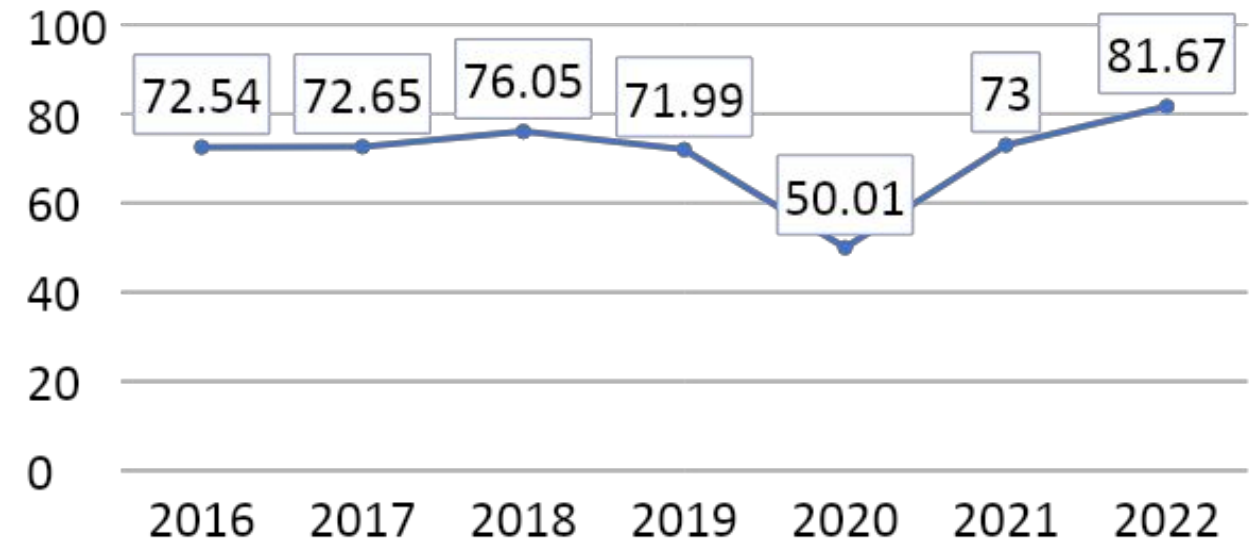
Sumber data:

Laporan Kabupaten/Kota Melalui SIGIZI TERPADU data Triwulan II per 8 Juli 2023

Triwulan II Tahun 2023



CAKUPAN BALITA YANG DITIMBANG BERAT BADANNYA (D/S)



Cakupan D/S pada Triwulan II tahun 2023 sebesar 85,0% sudah mencapai capaian provinsi (80%)

Sumber data:

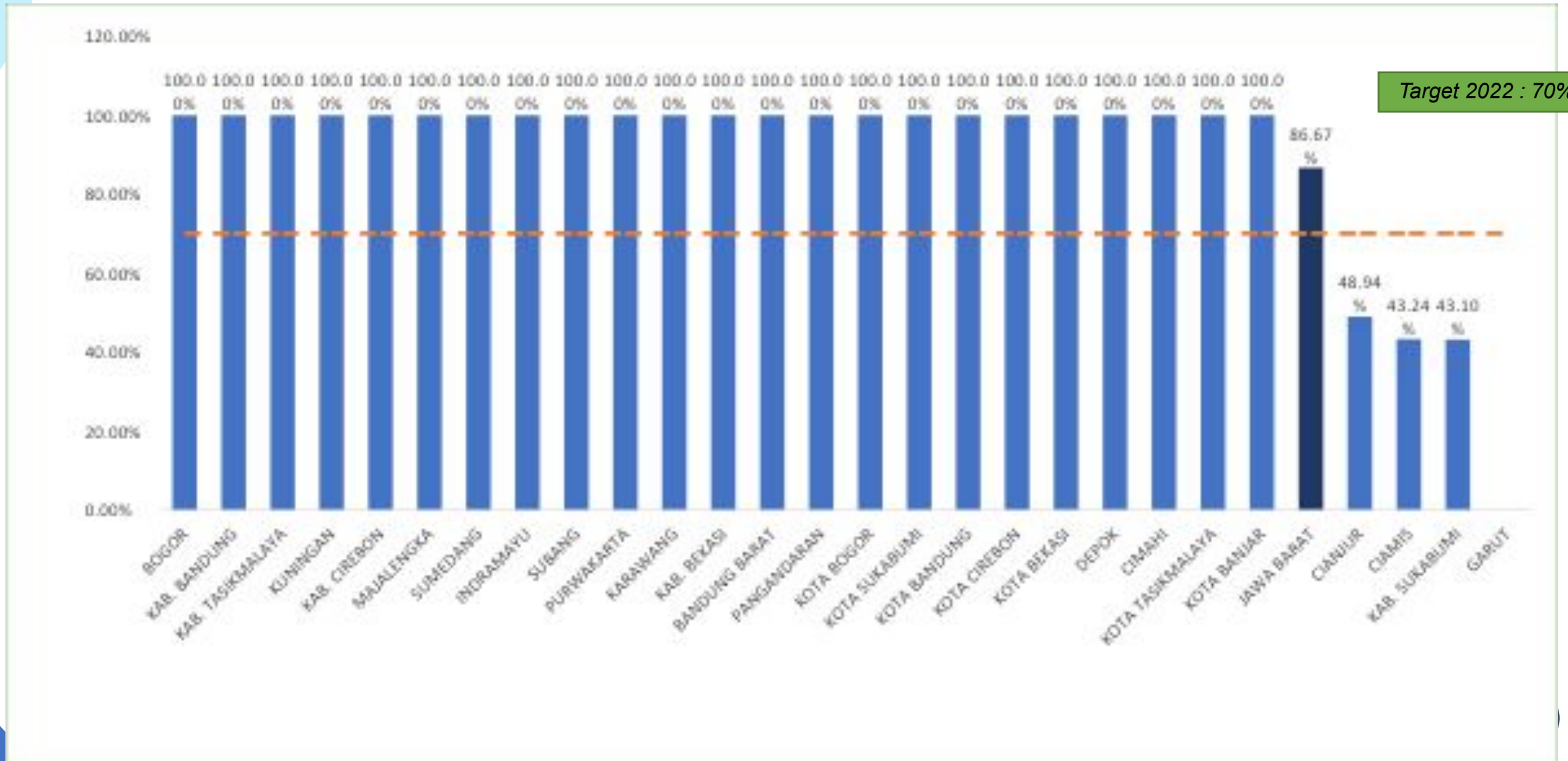
2016-2021 Laporan Kabupaten Kota

2021 Laporan Kabupaten Kota Melalui SIGIZI TERPADU data Triwulan IV diunduh 23 Maret 2022

2022 Laporan Kabupaten/Kota melalui SIGIZI TERPADU data Triwulan IV diunduh 2 FEBRUARI 2023

2023 Laporan Kabupaten Kota Melalui SIGIZI TERPADU data Triwulan II diunduh 8 Juli 2023

Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya Per Kabupaten/Kota Tahun 2022



Sumber : Data Komdat diunduh tanggal 16 Januari 2023

STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

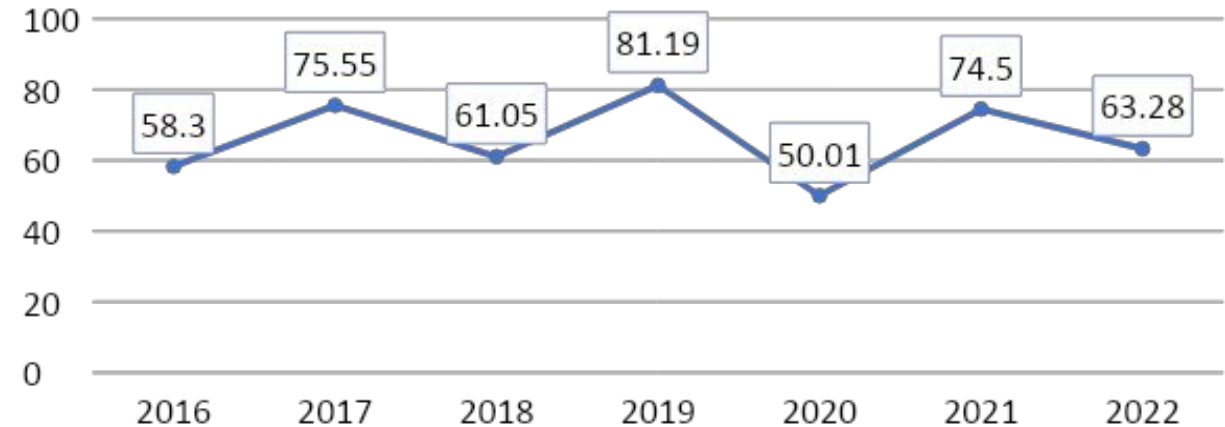
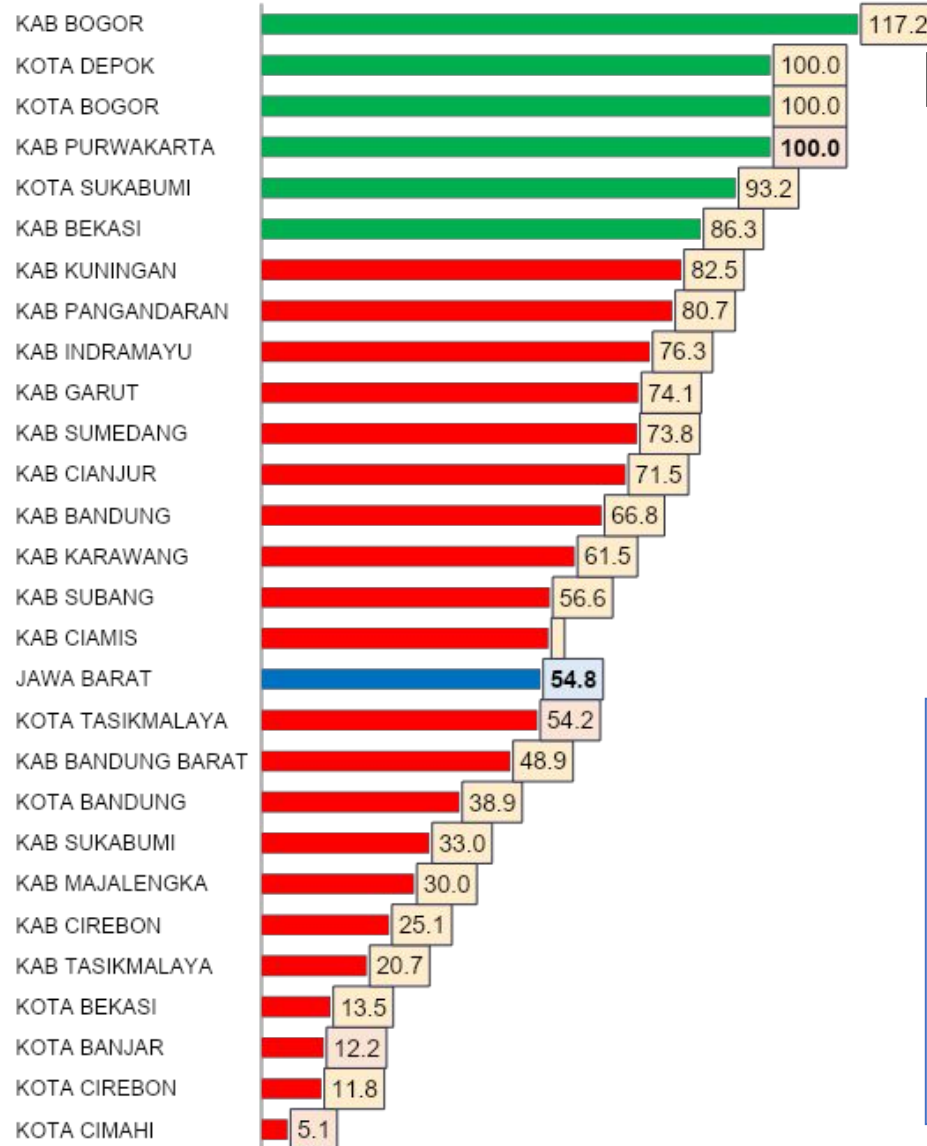
Perpes 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting

Target antara percepatan penurunan stunting

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan tahun percepatan	Penanggung Jawab	Kementerian /Lembaga/Pihak Pendukung
1. Tersedianya layanan Intervensi Spesifik	8. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	Target 90% Tahun 2024	Kementerian Kesehatan (Kesmas)	Kementerian Dalam Negeri, kementyerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Kependududkan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemangku Kepentingan
	9. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	Target : 90% Tahun 2024	Kementerian Kesehatan (Kesmas)	Kementerian Dalam Negeri, kementyerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Kependududkan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemangku Kepentingan

Triwulan II Tahun 2023

CAKUPAN BALITA GIZI KURANG MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN



Pada Triwulan II Tahun 2023 cakupan balita dengan status gizi kurang mendapat makanan DI Provinsi Jawa Barat sebesar 54,8%. Masih di bawah target provinsi (85%), terdapat 21 Kab / Kota yang belum mencapai target hal ini terkait dengan distribusi PMT di kab / kota tersebut yang belum optimal.

Sumber data:

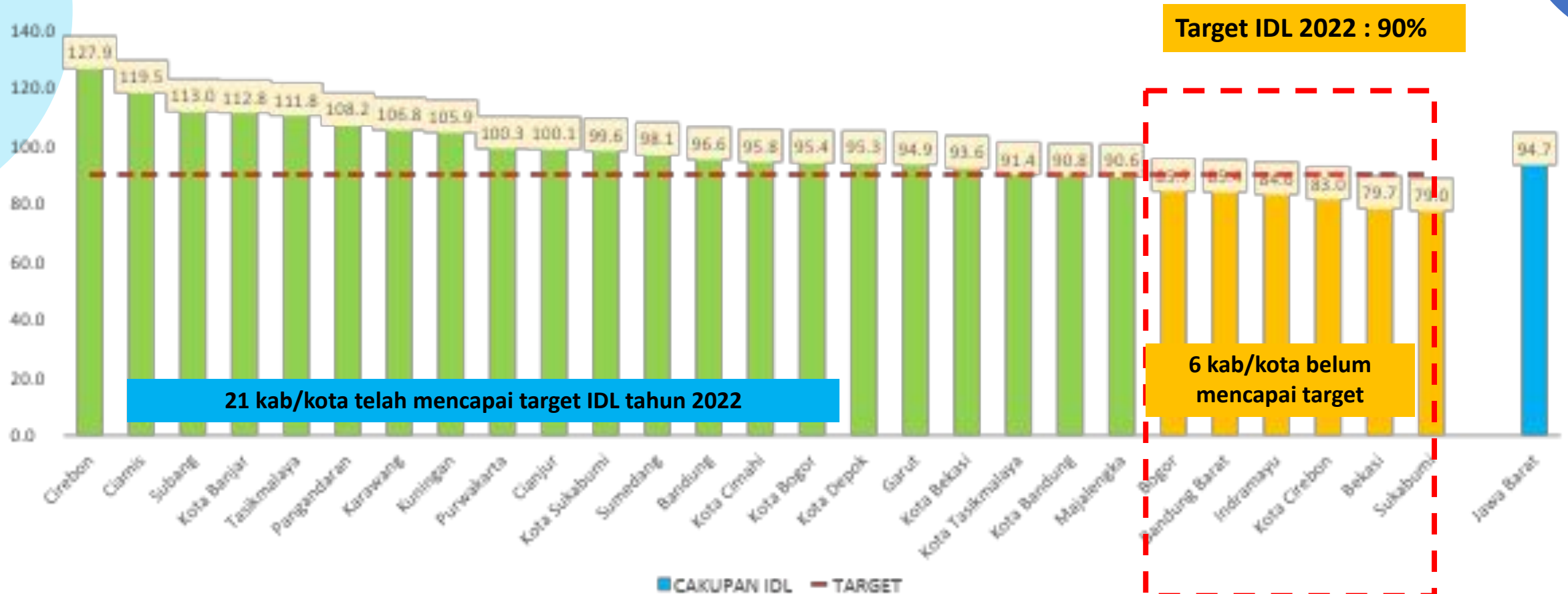
2016-2020 Laporan Kabupaten Kota

2021 Laporan Kabupaten Kota Melalui SIGIZI TERPADU data Triwulan IV diunduh 23 Maret 2022

2022 Laporan Kabupaten/Kota melalui SIGIZI TERPADU data Triwulan IV diunduh 2 Februari 2023

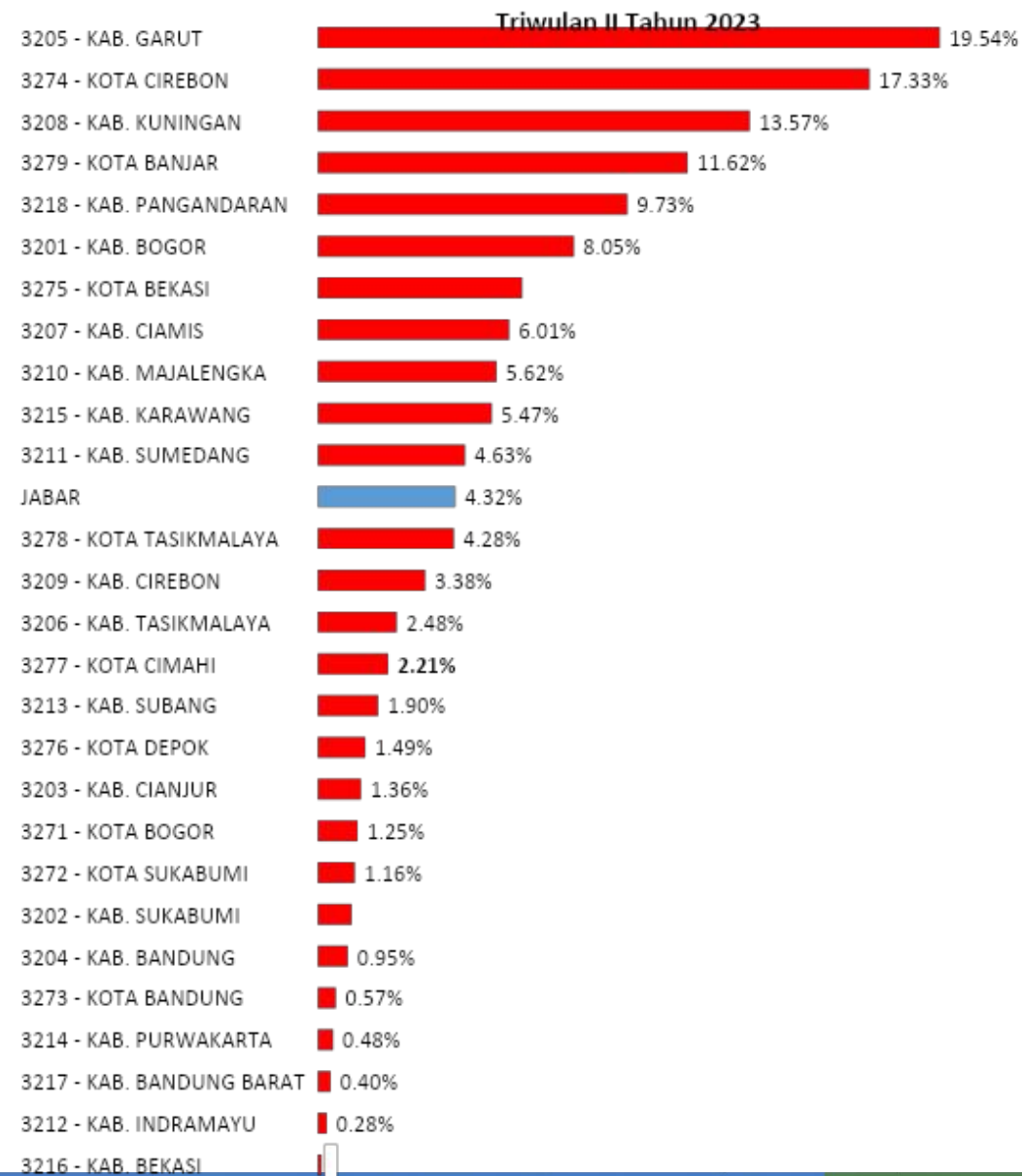
2023 Laporan Kabupaten Kota Melalui SIGIZI TERPADU data Triwulan II diunduh 8 Juli 2023

CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP KAB/KOTA TAHUN 2022



- Pemberian imunisasi pada bayi dapat memberikan kekebalan baik pada individu maupun kelompok, sehingga dapat terhindar dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan dapat menyebabkan stunting
- Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan imunisasi di Jawa Barat yaitu dengan melaksanakan imunisasi kejar dengan cara DOFU (*Drop Out Follow UP*) dan *sweeping* untuk melengkapi status imunisasi anak yang belum atau tidak lengkap status imunisasinya
- Kerja sama LP dan LS untuk mensosialisasikan pentingnya imunisasi kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan cakupan imunisasi.

CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP KAB/KOTA TAHUN 2023



Pada **triwulan II tahun 2023** cakupan **4,32%**, masih di bawah target jawa barat **dikarenaka under reported. Ada kendala impelementasi ASIK**

Sumber data:

2016-2020 Laporan Kabupaten Kota

2021 Laporan Kabupaten Kota Melalui SIGIZI TERPADU data Triwulan IV diunduh 23 Maret 2022

2022 Laporan Kabupaten Kota Melalui SIGIZI TERPADU data Triwulan IV diunduh 2 Februari 2023

2023 Laporan Kabupaten Kota Melalui SIGIZI TERPADU data Triwulan 1 diunduh 8 Juli 2023

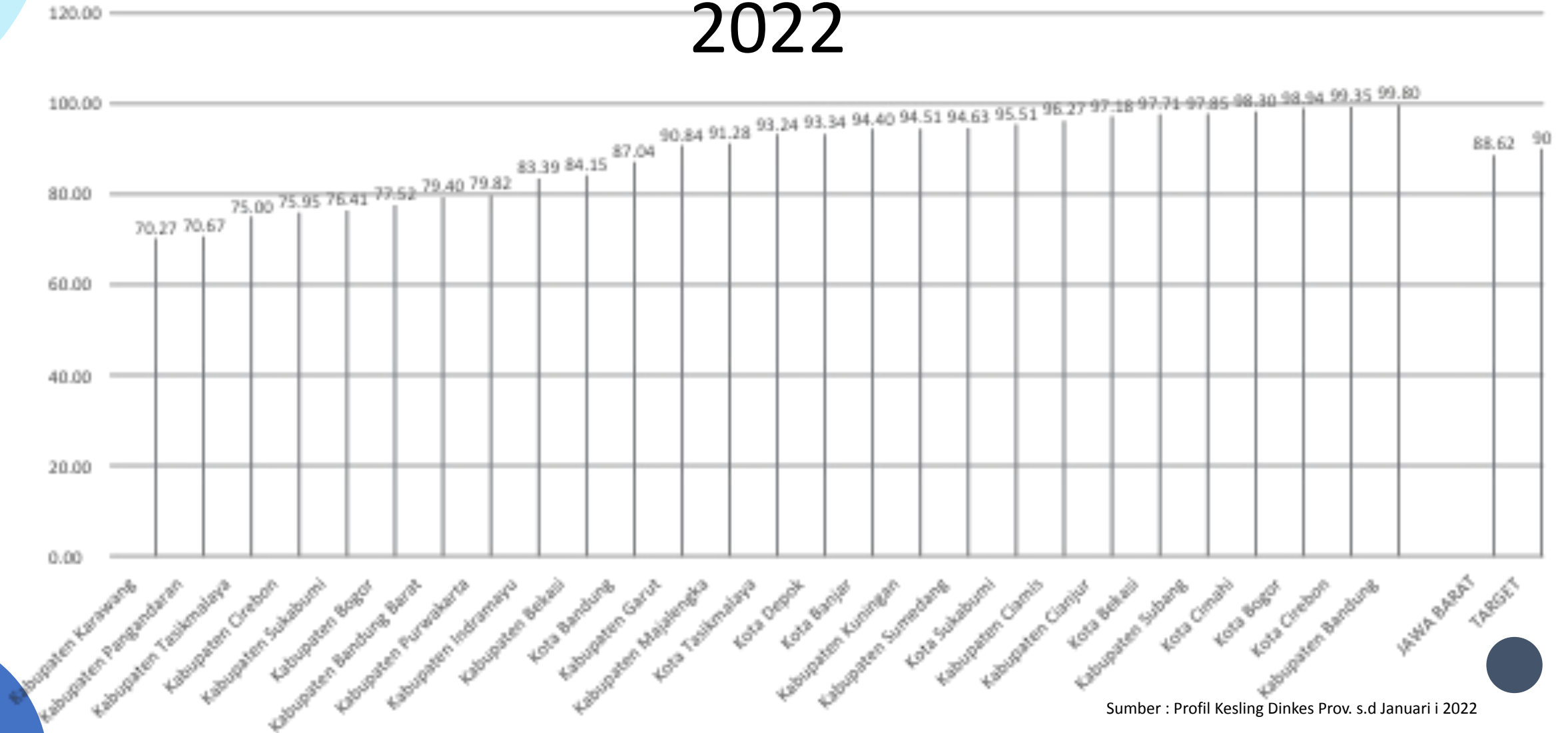
STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Perpes 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting

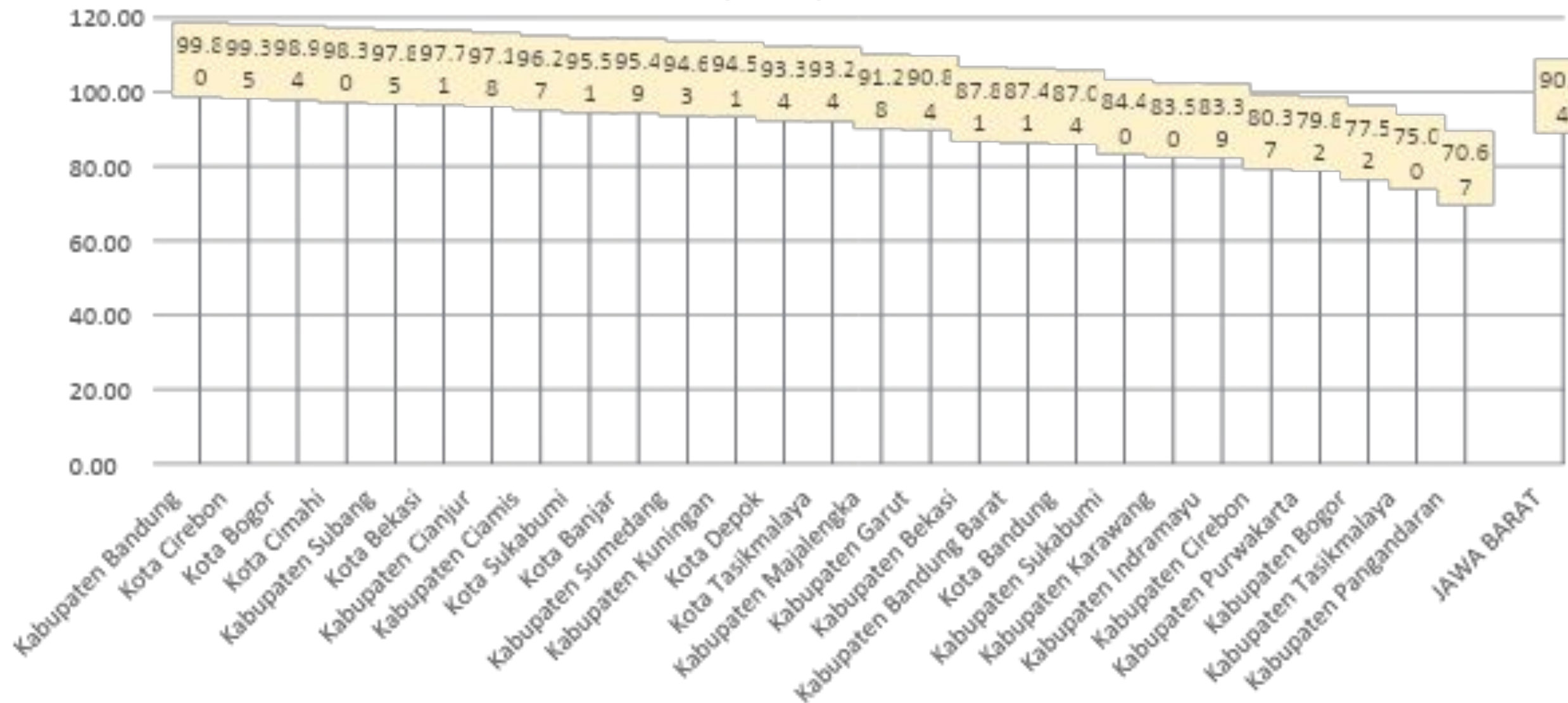
Target antara percepatan penurunan stunting

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan tahun percepatan	Penanggung Jawab	Kementerian /Lembaga/Pihak Pendukung
2.Tersedianya layanan Intervesi Sensitif	4. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di Kab/Kota lokasi prioritas.	Target 100% Tahun 2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kesmas, Diskimrum)	Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.

DENGAN AKSES BERKELANJUTAN TERHADAP AIR MINUM BERKUALITAS (LAYAK) TAHUN 2022



PERSENTASE PENDUDUK DI KAB/KOTA DENGAN AKSES TERHADAP AIR MINUM BERKUALITAS (LAYAK)



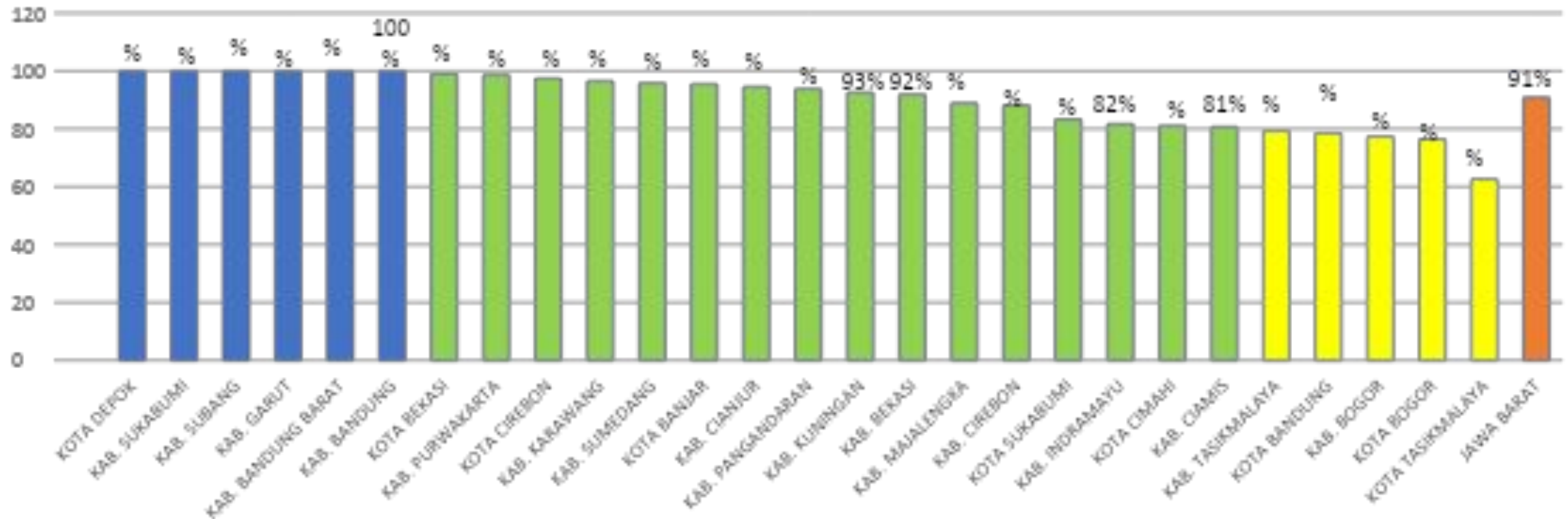
STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Perpes 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting

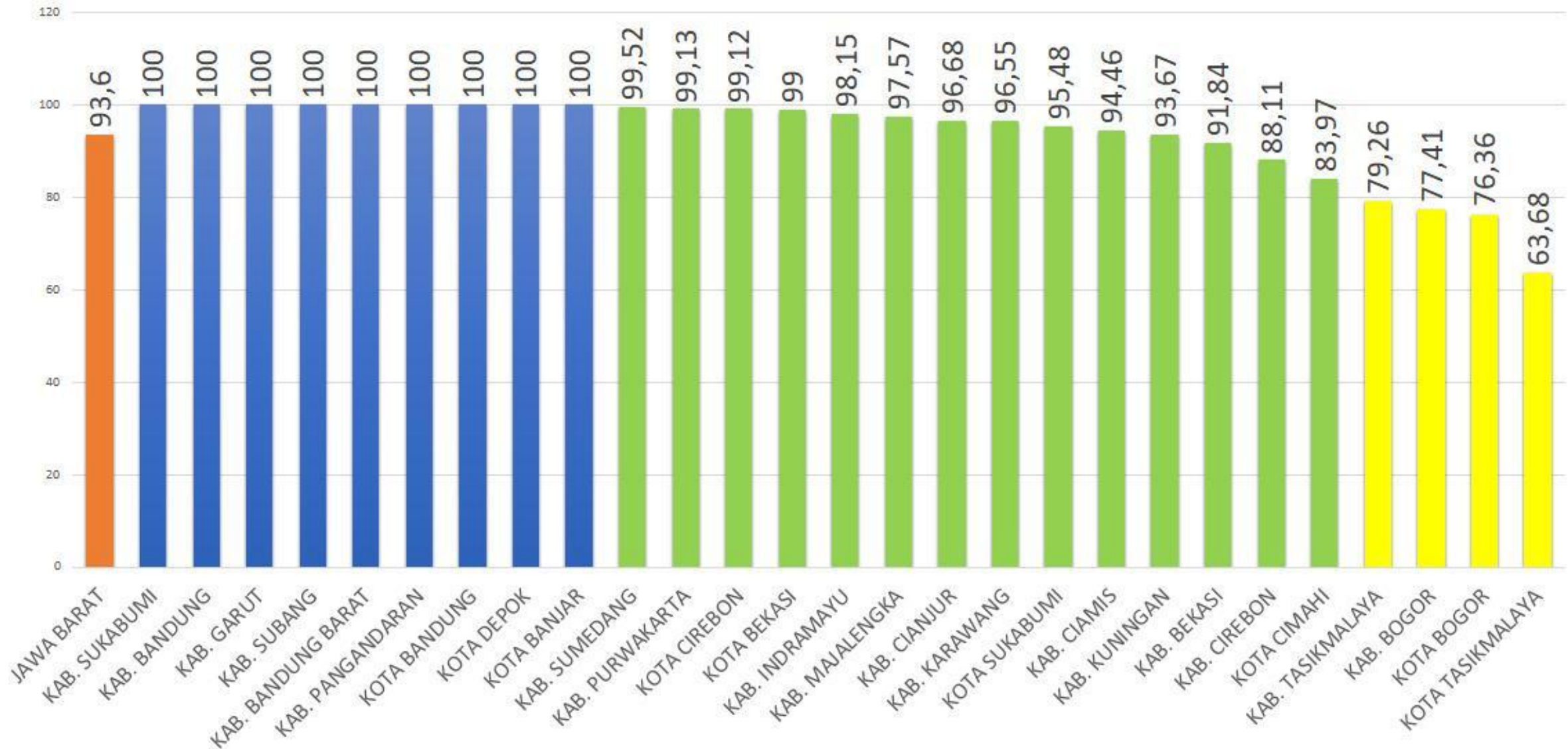
Target antara percepatan penurunan stunting

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan tahun percepatan	Penanggung Jawab	Kementerian /Lembaga/Pihak Pendukung
2.Tersedianya layanan Intervensi Sensitif.	5.Persentase rumah tangga yang Mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di Kabupaten/ kota lokasi prioritas.	Target 90% Tahun 2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kesmas, Diskimrum)	Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.
	6. Cakupan Bantuan Jaminan Nasional. Penerima Iuran (PBI) Kesehatan	Target: 112,9 juta penduduk Tahun: 2024	Kementerian Kesehatan (Kesmas, SDK, Dinsos)	Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah kabupaten kota, dan Pemangku Kepentingan. Negeri, Daerah

Persentase Penduduk Dengan Akses Terhadap Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022



**PERSENTASE PENDUDUK DENGAN AKSES TERHADAP SANITASI YANG LAYAK
(JAMBAN SEHAT)
DI PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2023**



Universal Health Coverage (UHC) s.d Bulan Septemberr 2022

KABUPATEN/KOTA	Jumlah penduduk Dukcapil kemendagri Smt I Tahun 2022 (Sumber BI BPJS Kes)	Sudah JKN	% UHC
Kota Cirebon	344.030	345.364	100,39
Kota Cimahi	562.160	553.074	98,38
Kota Bandung	2.530.448	2.483.121	98,13
Kab. Bekasi	3.079.730	3.010.160	97,74
Kab. Purwakarta	1.008.058	970.020	96,23
Kota Bekasi	2.470.972	2.375.837	96,15
Kab. Cirebon	2.380.074	2.273.193	95,51
Kota Sukabumi	355.735	337.415	94,85
Kota Bogor	1.099.422	1.042.143	94,79
Kab. Sukabumi	2.733.402	2.578.950	94,35
Kota Tasikmalaya	737.244	694.464	94,20
Kab. Pangandaran	433.091	399.734	92,30
Kota Depok	1.902.159	1.745.050	91,74
Kab. Karawang	2.462.492	2.199.340	89,31
JAWA BARAT	48.637.180	42.983.098	88,37
Kab. Subang	1.599.318	1.396.181	87,30
Kab. Bogor	5.385.219	4.589.781	85,23
Kab. Cianjur	2.472.052	2.101.255	85,00
Kab. Sumedang	1.176.018	999.472	84,99
Kab. Bandung	3.655.878	3.106.441	84,97
Kab. Kuningan	1.204.584	1.012.827	84,08
Kab. Indramayu	1.888.890	1.586.917	84,01
Kab. Garut	2.675.547	2.221.260	83,02
Kab. Bandung Barat	1.799.495	1.470.030	81,69
Kab. Majalengka	1.328.894	1.077.675	81,10
Kota Banjar	206.370	160.069	77,56
Kab. Ciamis	1.264.017	930.384	73,61
Kab. Tasikmalaya	1.881.881	1.322.941	70,30

Sumber data: Laporan Kab/Kota
Data dan Informasi Perencanaan s.d
Bulan September 2022

**JUMLAH PENDUDUK PROVINSI JAWA BARAT VS CAPAIAN PESERTA JKN
SAMPAI DENGAN 1 Juli 2023**

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PENDUDUK (Sem 2 Th 2022)	PESERTA JKN-KIS S.D 1 JULI 2023	% thd Jumlah Penduduk	% <i>Treshold</i> Sem 2 Tahun 2022	% Keaktifan (APC)
			Jumlah Peserta			
1	KOTA SUKABUMI	358.854	360.629	100,49%	74,45%	74,08%
2	BEKASI	3.147.268	3.161.770	100,46%	83,61%	83,23%
3	KOTA CIREBON	346.438	347.845	100,41%	89,11%	88,75%
4	KOTA BEKASI	2.486.251	2.481.337	99,80%	79,68%	79,83%
5	KOTA CIMAHI	566.537	565.141	99,75%	78,46%	78,65%
6	KOTA BANDUNG	2.545.005	2.524.878	99,21%	77,60%	78,22%
7	KOTA BOGOR	1.114.018	1.092.402	98,06%	79,02%	80,59%
8	KOTA TASIKMALAYA	746.710	732.158	98,05%	79,24%	80,82%
9	PANGANDARAN	436.748	427.784	97,95%	82,70%	84,43%
10	PURWAKARTA	1.020.994	997.291	97,68%	74,74%	76,52%
11	SUKABUMI	2.762.500	2.695.109	97,56%	71,39%	73,18%
12	CIREBON	2.411.302	2.351.363	97,51%	73,08%	74,94%
13	BANDUNG	3.708.344	3.600.632	97,10%	73,25%	75,44%
14	KOTA DEPOK	1.920.182	1.817.782	94,67%	72,56%	76,65%
15	KARAWANG	2.509.839	2.337.202	93,12%	69,67%	74,82%
16	SUBANG	1.618.380	1.498.825	92,61%	65,74%	70,98%
17	KUNINGAN	1.218.332	1.126.232	92,44%	68,32%	73,91%
18	CIANJUR	2.506.384	2.263.036	90,29%	63,35%	70,16%
19	KOTA BANJAR	207.625	186.793	89,97%	73,77%	82,00%
20	SUMEDANG	1.187.620	1.063.558	89,55%	69,96%	78,12%
21	BOGOR	5.473.476	4.887.750	89,30%	66,83%	74,84%
22	MAJALENGKA	1.340.016	1.188.895	88,72%	68,94%	77,70%
23	BANDUNG BARAT	1.826.946	1.588.680	86,96%	64,63%	74,32%
24	INDRAMAYU	1.912.850	1.642.905	85,89%	63,54%	73,98%
25	GARUT	2.759.490	2.367.014	85,78%	61,21%	71,35%
26	CIAMIS	1.267.878	996.545	78,60%	62,24%	79,19%
27	TASIKMALAYA	1.939.683	1.431.112	73,78%	54,91%	74,42%
TOTAL PROV JABAR		49.339.670	45.734.666	92,69%	70,50%	76,06%

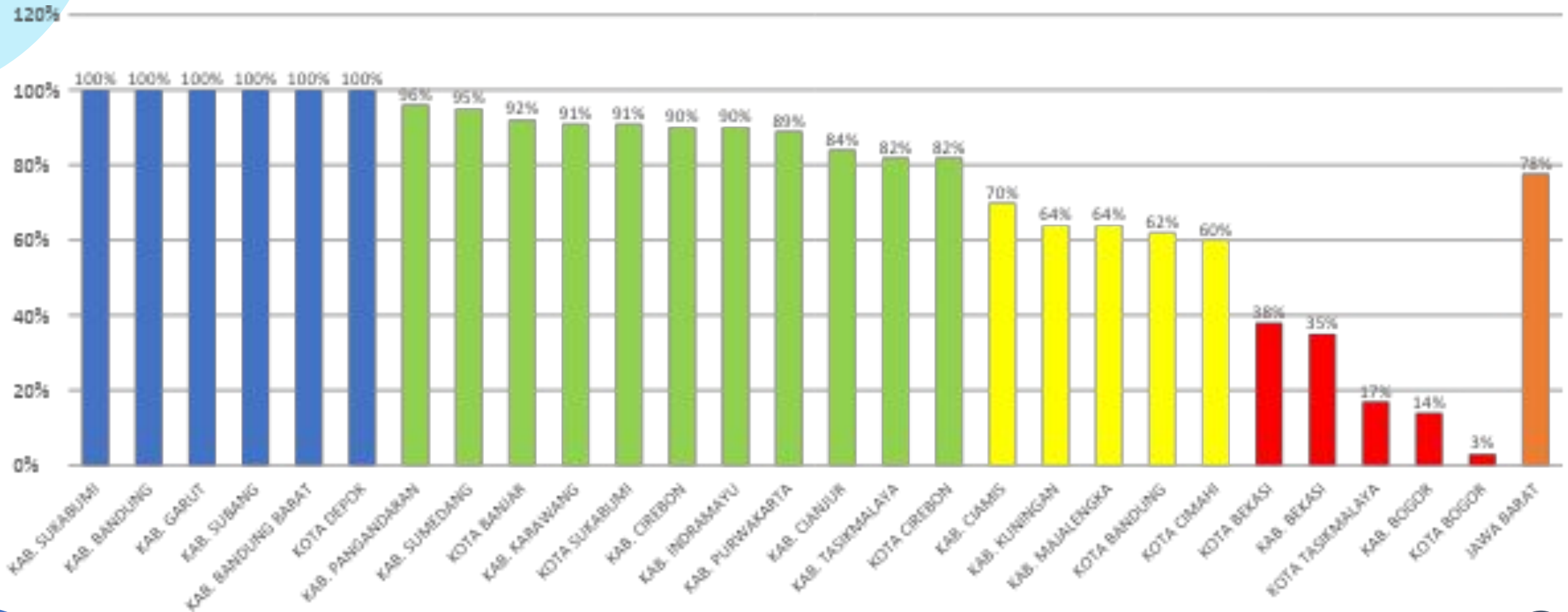
STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Perpes 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting

Target antara percepatan penurunan stunting

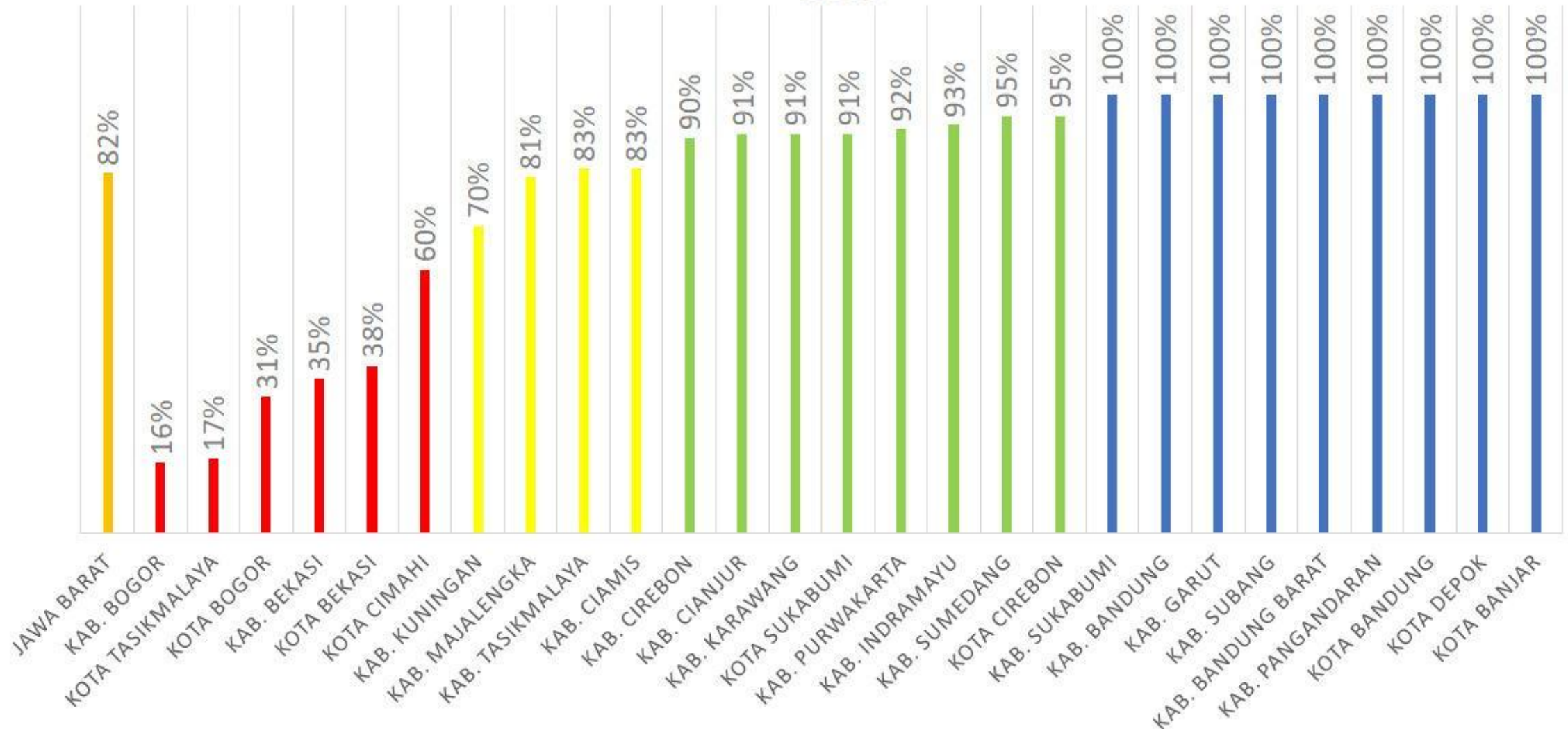
Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan tahun percepatan	Penanggung Jawab	Kementerian /Lembaga/Pihak Pendukung
2.Tersedianya layanan Intervensi Sensitif.	11. Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau <i>Open Defecation Free (ODF)</i>	Target 90% Tahun 2024	Kementerian Kesehatan (Kesmas)	Kementerian Dalam Negeri, kementyerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Kependududukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemangku Kepentingan

Presentase Desa yang Telah *Open Defecation Free (ODF)* dan *Verified* di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022



SUMBER : link.kemkes.go.id/CapaianSanitasi s.d
Desember 2022 data pre 23 Januari 2023

PERSENTASE DESA/KELURAHAN DENGAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) TAHUN 2023



STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Perpes 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting

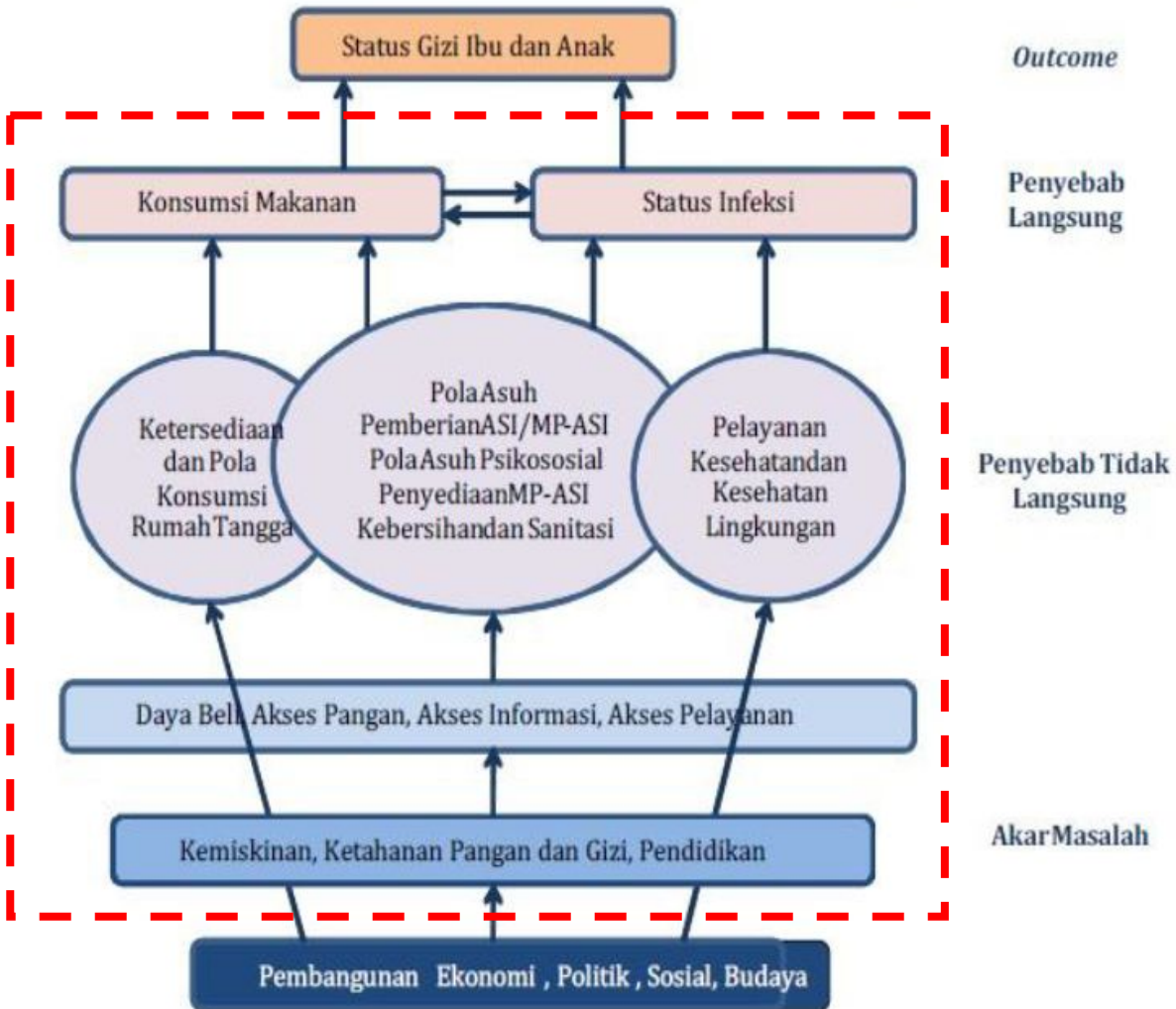
Target antara percepatan penurunan stunting

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan tahun percepatan	Penanggung Jawab	Kementerian /Lembaga/Pihak Pendukung
a. Melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan.	Terlaksananya nasional Stunting. kampanye pencegahan	Target: 3 kanal/ metode Tahun: setiap bulan	Pemerintah Daerah kabupaten/kota (Kesmas, diskominfo, BKKBN)	Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.
b. Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting.	Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	Target:90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten/kota (Kesmas)	Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.

FAKTOR DETERMINAN STUNTING



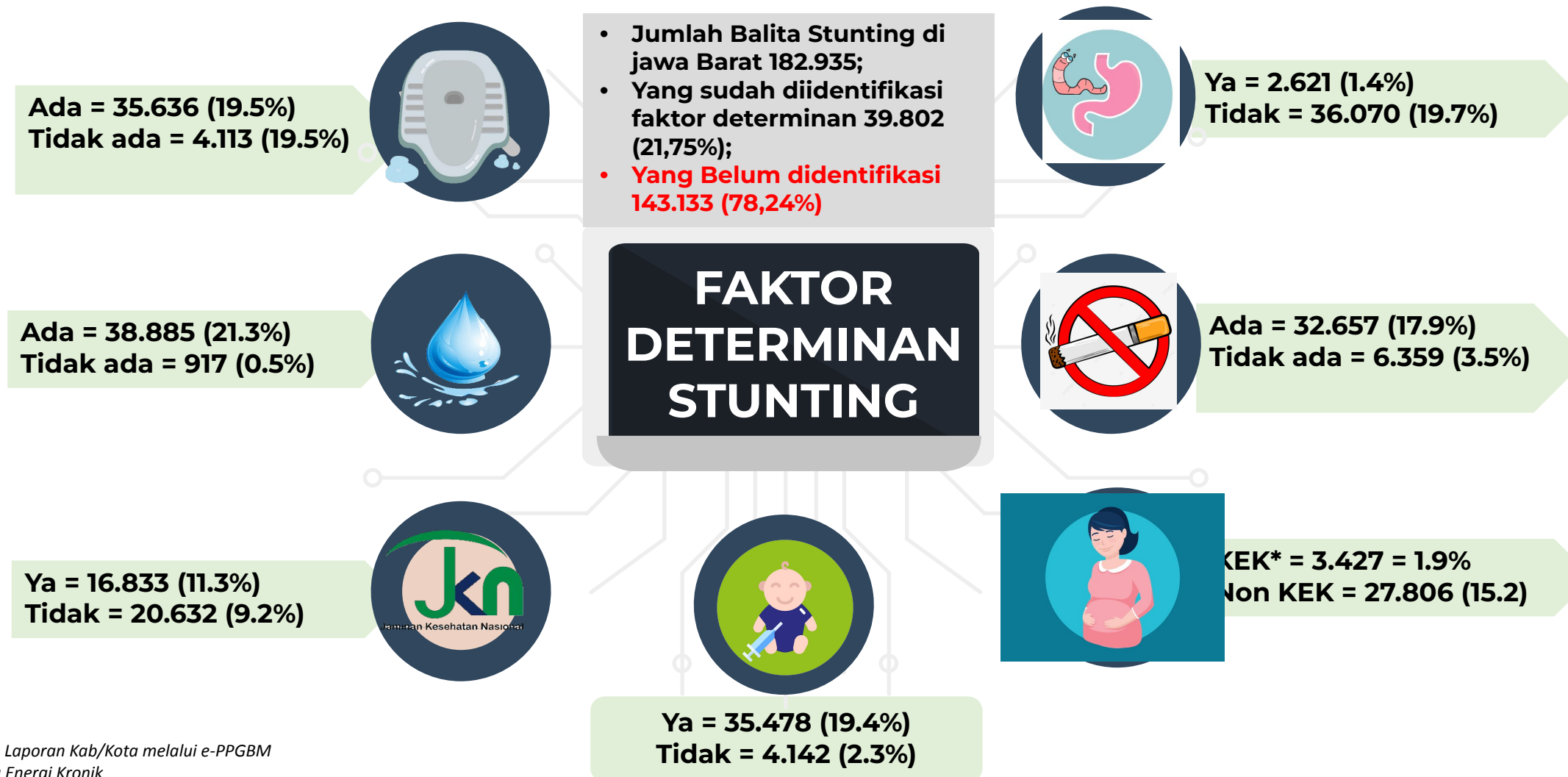
KERANGKA PIKIR MASALAH GIZI



FAKTOR DETERMINAN STUNTING DALAM e-PPGBM:

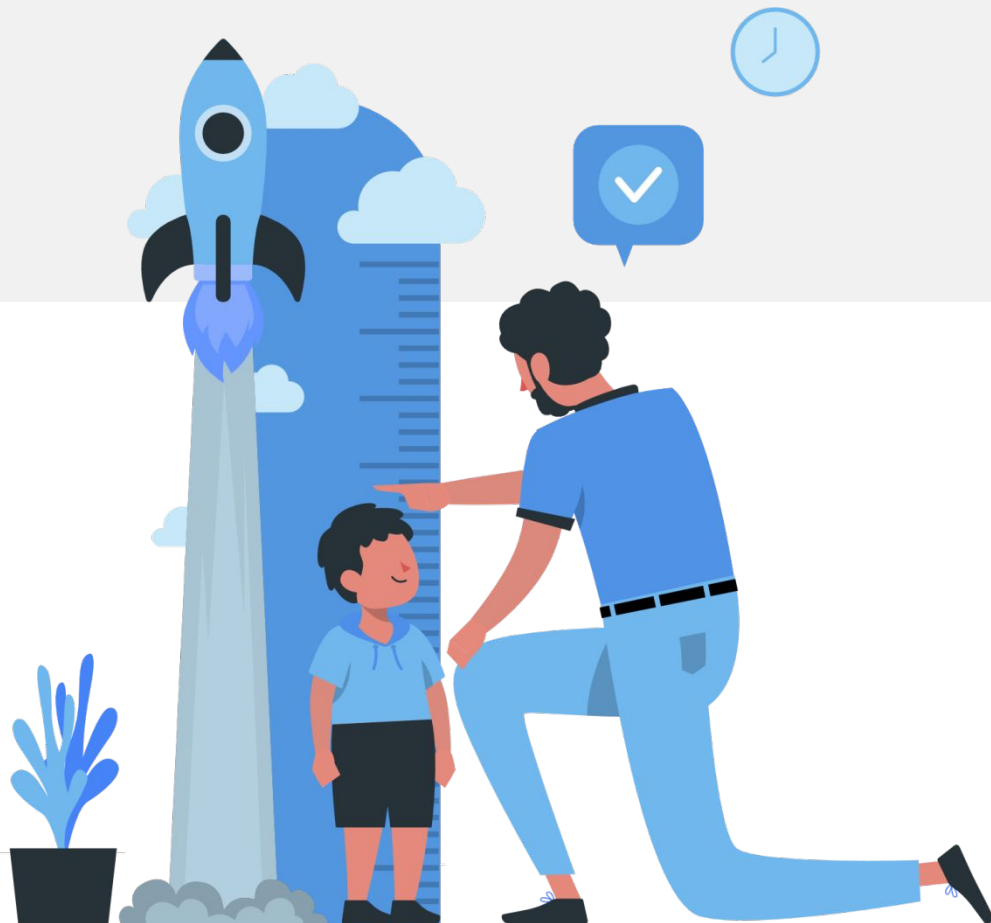
1. JKN/BPJS
2. Air Bersih
3. **Kecacingan**
4. Jamban Sehat
5. **Imunisasi**
6. Merokok (Keluarga)
7. Riwayat Ibu Hamil
8. Penyakit Penyerta

IDENTIFIKASI FAKTOR DETERMINAN STUNTING



Sumber: Laporan Kab/Kota melalui e-PPGBM

*Kurang Energi Kronik



◀ STRATEGI DAN TINDAK LANJUT DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

STRATEGI INTERVENSI DALAM KONVERGENSI STUNTING

INTERVENSI SPESIFIK

- Tablet tambah darah
- Promosi & konseling menyusui
- Promosi & konseling PMBA
- Suplemen gizi makro (PMT)
- Tata Laksana Gizi Buruk
- Pemantauan & promosi pertumbuhan
- Suplementasi kalsium
- Suplementasi vitamin A
- Suplementasi Zinc untuk diare
- Pemeriksaan kehamilan
- Imunisasi
- Suplemen gizi mikro (Taburia)
- Pemberian Obat Cacing
- Manajemen Terpadu Balita Sakit

GERAKAN BERSAMA
PEMDA - CAMAT – KADES/LURAH

IBU HAMIL
ANEMIA

Remaja

STUNTING

IBU HAMIL
KEK

BALITA
STUNTING

MONITORING TERPADU OPD TERKAIT

INTERVENSI SENSITIF

Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan (70%)

Kehamilan yang tidak diinginkan (15,5%)

Cakupan PUS yang memperoleh pemeriksaan kesehatan □ bagian dari pelayanan pranikah (90%)

rumah tangga yg mendapatkan akses air minum layak di kab/kota lokasi prioritas (100%)

rumah tangga yg mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestic) layak di kab/kota lokus prioritas (90%)

penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (112,9 juta)

keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan (90%)

Jumlah keluarga miskin dan rentan dan memperoleh bantuan tunai bersyarat (10 Juta)

target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas (70%)

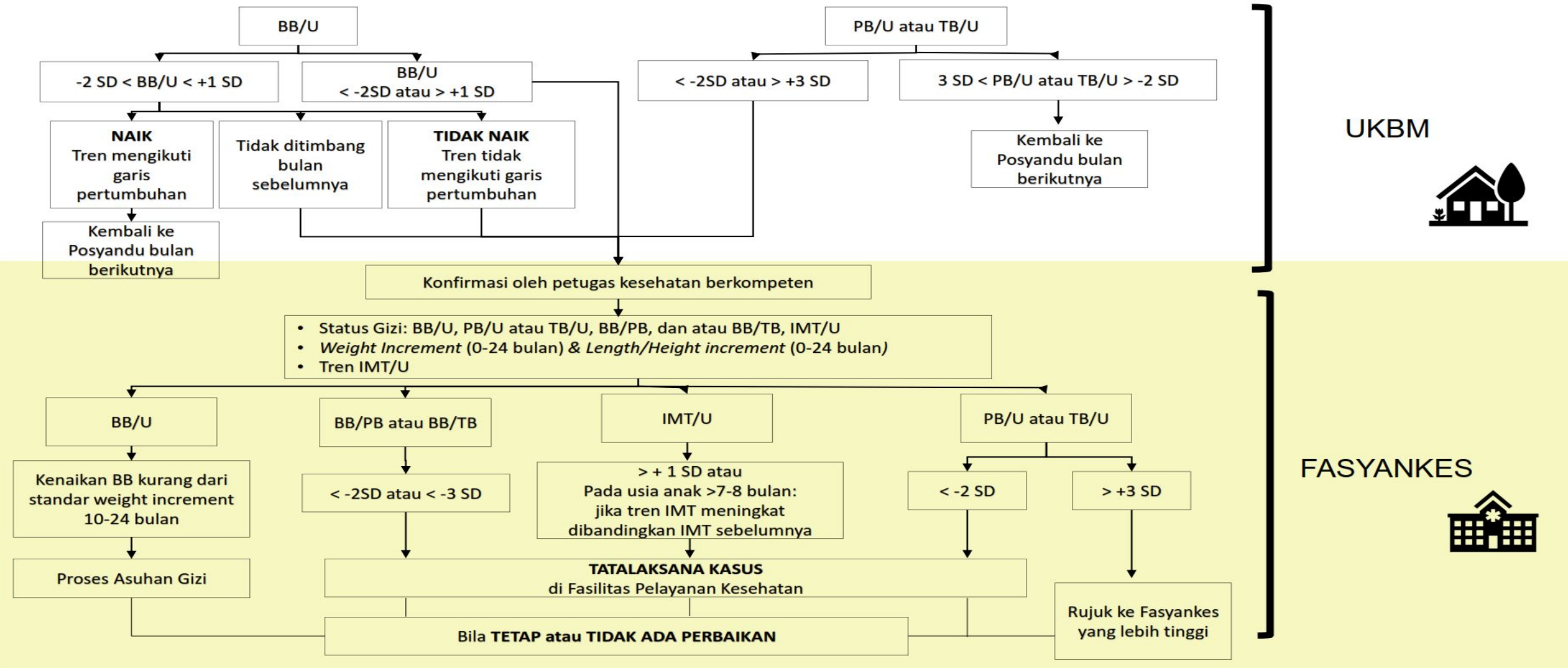
Jumlah keluarga miskin dan rentan dan memperoleh bantuan tunai Pangan (15,6 Juta)

Desa/kelurahan Stop BABS atau ODF (90%)

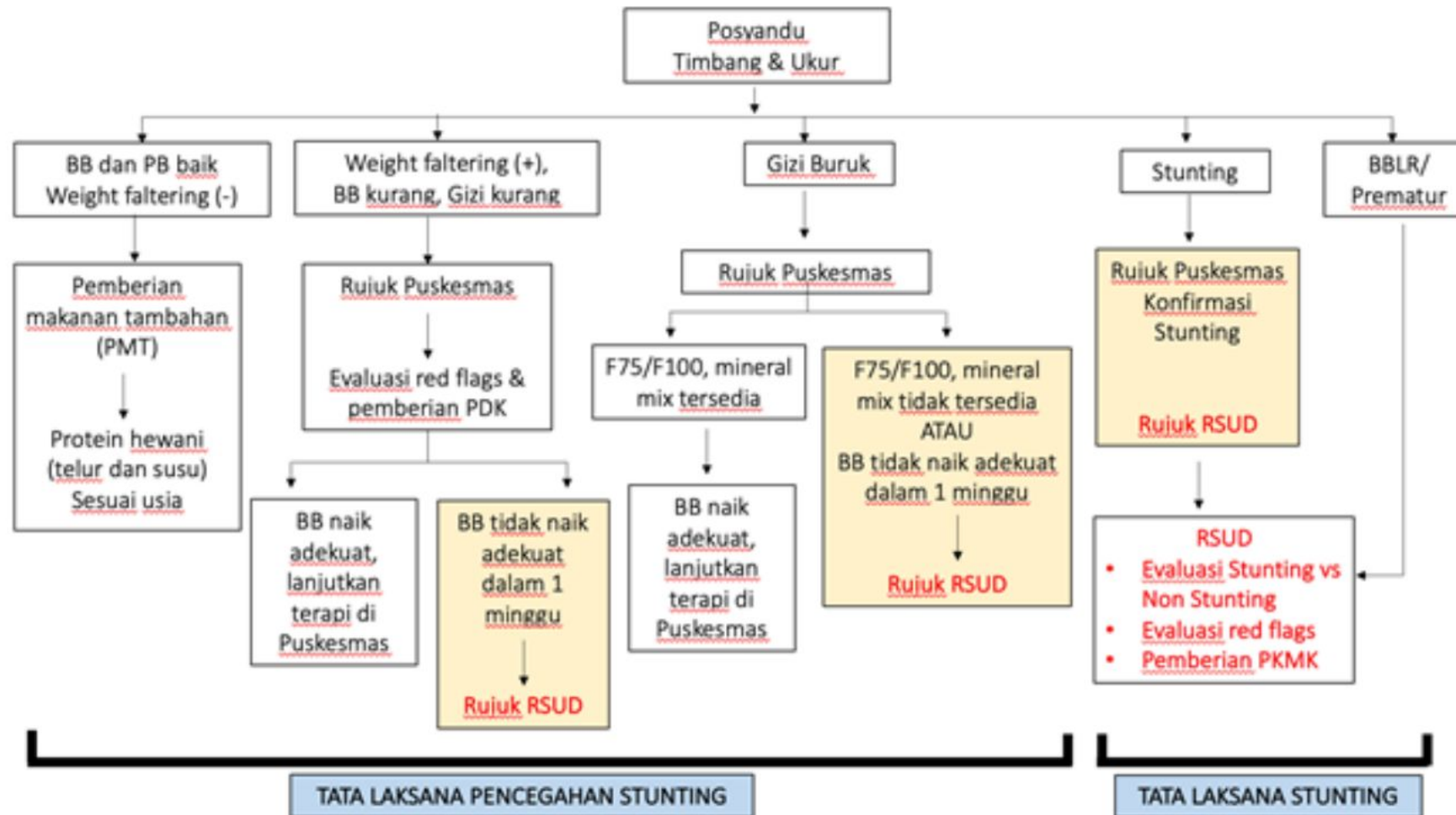
ZERO NEW STUNTING

TATALAKSANA MASALAH GIZI SESUAI STANDAR

ALUR RUJUKAN HASIL PENGUKURAN ANTROPOMETRI (PERMENKES NO 2 TAHUN 2020)



**ALOGARITME PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING BERSASRKAN KEPUTUSAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/1928/2022
TENTANG PEDOMAN NASIONAL PELAYANAN KEDOKTERAN TATA LAKSANA STUNTING**



Gambar 11. Algoritme pencegahan dan penanganan **stunting** (Sjarif, 2022)



PENCEGAHAN DAN PENANGAN STUNTING BERSASRKAN KEPUTUSAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
HK.01.07/MENKES/1928/2022 TENTANG PEDOMAN NASIONAL PELAYANAN
KEDOKTERAN TATA LAKSANA STUNTING

Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat



Pencegahan Stunting

- dilakukan mulai dari pencegahan primer di tingkat posyandu, pencegahan sekunder di FKTP oleh dokter, dan
- pencegahan tersier oleh dokter spesialis anak di FKRTL.

Tatalaksana Stunting

- tata laksana medis sesuai kondisi yang mendasari, tata laksana nutrisi, tata laksana non-nutrisi, perbaikan kualitas tidur dan aktivitas fisik.

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM PERCEPATAN PENURUNAN ◀ STUNTING



Perencanaan
penganggaran



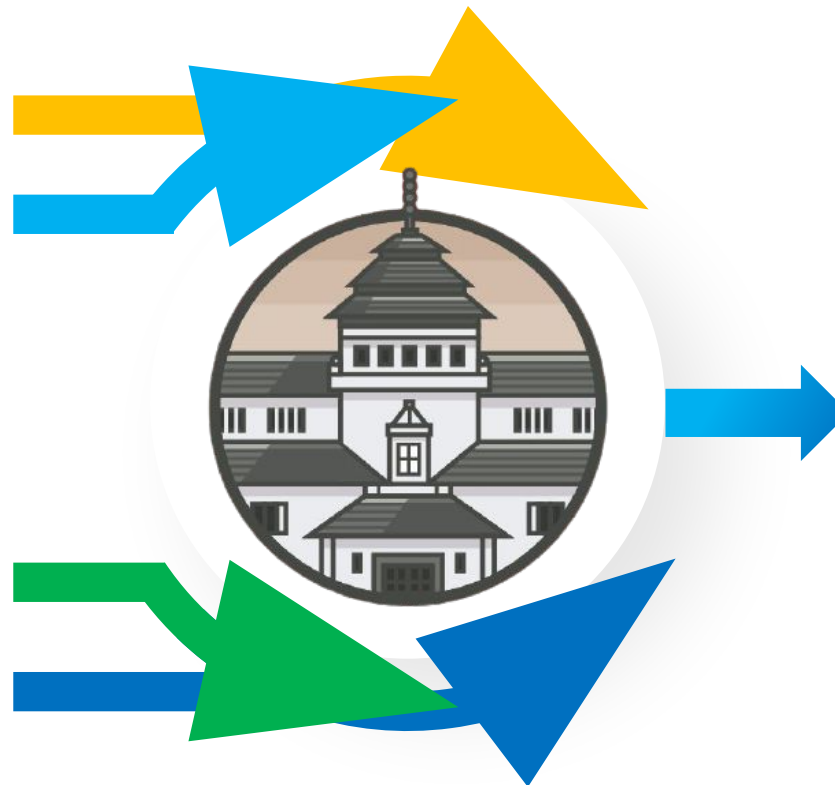
Intervensi Pencegahan dan
Penanggulangan

MONITORING & EVALUASI TERPADU OPD TERKAIT



KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DAN HIBAH TAHUN 2023 dan 2024

- Pencapaian target indikator makro Kabupaten/Kota yang menunjang pencapaian target indikator makro provinsi;
- Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat;
- Mendukung Program-program Strategis Provinsi Jawa Barat;
- Mendukung Kebijakan Kewilayahan.



Skema Pendanaan

- **Pendanaan Kompetitif**
- **Pergub No. 13 dan 14 Tahun 2021;**

TEMA DAN SUB TEMA PENDANAAN KOMPETITIF 2023

2. TEMA

PENANGANAN KEMISKINAN & MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

SUB TEMA

1. Peningkatan kualitas layak hidup bagi masyarakat miskin sektor perumahan dan permukiman.
2. Peningkatan kualitas layak hidup bagi masyarakat miskin sektor sumber daya air.
3. Peningkatan kualitas layak hidup bagi masyarakat miskin sektor pendidikan.
4. Peningkatan kualitas layak hidup bagi masyarakat miskin sektor energi.
5. Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin sektor sosial.
6. Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin sektor koperasi dan usaha kecil.
7. Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin sektor pertanian.
8. Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin sektor kelautan dan perikanan.
9. Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin sektor kehutanan.
10. Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin sektor peternakan.
11. Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin sektor perdagangan.
12. Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin sektor ketenagakerjaan.
13. Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin sektor pemberdayaan masyarakat dan desa.
14. Inovasi pencegahan pernikahan dini.
15. Inovasi penanganan kekerasan pada perempuan dan anak.
16. Peningkatan akses gizi Balita, Ibu Hamil dan remaja putri.
17. Peningkatan akses kesehatan Balita, Ibu Hamil dan remaja putri.
18. Peningkatan akses pangan bagi Balita, Ibu Hamil dan remaja putri.
19. Peningkatan akses pendidikan kesehatan bagi remaja putri.
20. Penyediaan Akses Sanitasi dan Air Minum Layak (Komunal).

Kamus Tema Percepatan Penurunan *Stunting*

TEMA DAN SUB TEMA PENDANAAN KOMPETITIF 2024



No	Tema	Ruang Lingkup	Aspek	Kamus SIPD (Hibah Kompetitif)	Perangkat Daerah
3	Percepatan Penurunan Stunting	Intervensi Gizi Spesifik	Kelompok Sasaran 1.000 HPK (Bumil dan Anak 6-23 bulan)	1 #HB Kompetitif - Makanan pendamping ASI bergizi untuk Anak 6-23 bulan	DINKES
				2 #HB Kompetitif - Peningkatan gizi ibu hamil dan ibu menyusui	DINKES
			Kelompok Sasaran Usia Lainnya (Anak 24-59 bulan dan Remaja Putri)	3 #HB Kompetitif - Tatalaksana gizi dan pencegahan infeksi Anak 24-59 bulan	DINKES
				4 #HB Kompetitif - Inovasi Pemberian Tablet Tambah Darah bagi remaja putri	DINKES
		Intervensi Gizi Sensitif	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi	5 #HB Kompetitif - Penyediaan Air Minum dan Sanitasi di lokus stunting	DISPERKIM
			Akses dan Kualitas Pelayanan Gizi dan Kesehatan	6 #HB Kompetitif - Konseling kesehatan bagi remaja putri	DP3AKB
				7 #HB Kompetitif - Pemantauan tumbuh kembang anak	DPMD
				8 #HB Kompetitif - Edukasi gizi dan kesehatan di PAUD	DISDIK
		Akses pangan bergizi		9 #HB Kompetitif - Peningkatan konsumsi protein hewani (ikan)	DKP
				10 #HB Kompetitif - Peningkatan konsumsi protein hewani (telur dan daging)	DKPP
			Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak	11 #HB Kompetitif - Edukasi peningkatan pengasuhan dan gizi ibu dan anak	DP3AKB



Kegiatan Stunting 2023

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

- Advokasi dan sosialisasi pembentukan Pos Kesehatan di Pesantren (Poskestren)
- Evaluasi dan deklarasi pembentukan Pos Kesehatan di Pesantren (Poskestren)
- Musyawarah masyarakat pesantren dalam rangka pembentukan Pos Kesehatan di Pesantren (Poskestren)
- Pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat rumah tangga
- Fasilitasi penguatan PHBS rumah tangga di Kab/Kota
- Pembinaan dan penguatan desa/kelurahan siaga aktif
- Penguatan mitra kerja promkes forum komunikasi (FORKOM) kesehatan dalam pencegahan stunting
- Perkemahan bakti daerah saka bakti husada (SBH) tingkat Provinsi Jawa Barat
- Fasilitasi penguatan Desa/Kelurahan siaga aktif bagi 27 Kab/Kota



Kegiatan Stunting 2023

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

- Pemantapan kelas ibu hamil dan edukasi gizi seimbang bagi ibu hamil
- Pertemuan skrining layak hamil bagi PUS dan CATIN
- Pertemuan penyusunan rencana kontigensi gizi bencana
- Sosialisasi buku KIA Cetakan tahun 2022 bagi petugas dan LP/LS
- Monev terpadu percepatan penanggulangan stunting
- Rakor dan evaluasi pelayanan kesehatan gizi masyarakat
- Bintelk pengelolaan pelayanan. Kesehatan gizi masyarakat
- Evaluasi penilaian kinerja konvergensi stunting
- Studi komperatif intervensi spesifik dalam percepatan penanggulangan stunting



Kegiatan Stunting 2023

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

- Workshop K3 perkantoran
- Bintek kesehatan olahraga masyarakat
- Pendampingan mitra bakhti husada (MBH)
- Orientasi pengelolaan limbah medis fasyankes
- Rapat koordinasi PKAM
- Workshop evaluasi citarum harum dan STBM
- Monev PKAM
- Monitoring dan evaluasi jejaring tempat fasilitas umum
- Monitoring dan evaluasi pendampingan kegiatan STBM dalam rangka Citarum Harum
- Monitoring dan evaluasi pengelolaan limbah medis
- Pendampingan verifikasi KKS
- Pendampingan verifikasi ODF
- Pengawasan Higiene sanitasi pangan (food safety) dalam rangka food security/KLB keracunan pangan/TFU/TPP



Kegiatan Stunting 2023

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

- Pertemuan pencegahan stunting melalui peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap
- Pertemuan penguatan POPM cacingan dan diare
- Pertemuan peningkatan kapasitas P2 PISP dalam pencatatan dan pelaporan berbasis WEB SIHEPI
- Pertemuan peningkatan kapasitas sumber daya manusia P2 PISP (manajemen Zink pada balita diare dalam upaya penanggulangan stunting)
- Pendampingan penguatan skrining cacingan pada ibu hamil anemia
- Workshop peningkatan kapasitas petugas kab/kota dalam pengendalian kecacingan
- Kegiatan P2 Cacingan
- OJT pemeriksaan cacingan
- Assesment pengendalian cacingan dalam upaya intervensi stunting
- Konsultasi teknis P2 cacingan ke pusat
- Monitoring dan evaluasi data cakupan imunisasi dasar lengkap untuk pencegahan stunting
- Monitoring dan evaluasi P2 diare pada balita dalam upaya penanggulangan stunting



Dropping pusat

TAHUN 2022	TAHUN 2023
1. Antropometri : (Dropping ke Kab/Kota) <ul style="list-style-type: none"> • Kota Cimahi 30 set • Kota Banjar : 30 Set 	1. Buku KIA : Dropping Kab/Kota
2. Alat Skrining Anemia : 27 Kab/kota (Dropping ke Kab/Kota) <ul style="list-style-type: none"> • HB Meter : 1086 • Strip HB : 732,576 • Blood Lancet : 4.035 • Glove Dan Swab Alcohol 4035 • Pen Lancing : 1086 	2. Antropometri : 24 Kab/Kota □ usulan ;: 15365
	3. USG : Jumlah usulan : 370

TANTANGAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH



PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN DARI HASIL BIMTEK KE KAB/KOTA

Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat



- Belum semua sekolah tingkat SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat melaksanakan minum TTD.
- Belum semua CATIN melakukan pemeriksaan ke Faskes
- Pengetahuan dan perilaku remaja dalam implementasi gizi seimbang



REMAJA



IBU HAMIL

- Pemantauan konsumsi TTD Ibu hamil belum menyeluruh, pemeriksaan kehamilan (ANC) belum rutin 6x
- Tidak semua Puskesmas memiliki tenaga terlatih USG (skrining)
- Tidak semua memiliki anggaran PMT bagi ibu hamil KEK



**BAYI DAN
BALITA**

- Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan belum rutin setiap bulan
- kurangnya pemanfaatan PMT lokal, konsumsi MP-ASI kaya protein hewani masih rendah
- Tidak adanya anggaran untuk intervensi Balita bermasalah gizi (PMT local)



**IBU
ENYUSUI**

- Kualitas IMD masih rendah (minimal 1 jam), asupan gizi seimbang bagi Ibu menyusui masih rendah, pemberian ASI eksklusif pada bayi (PMBA)

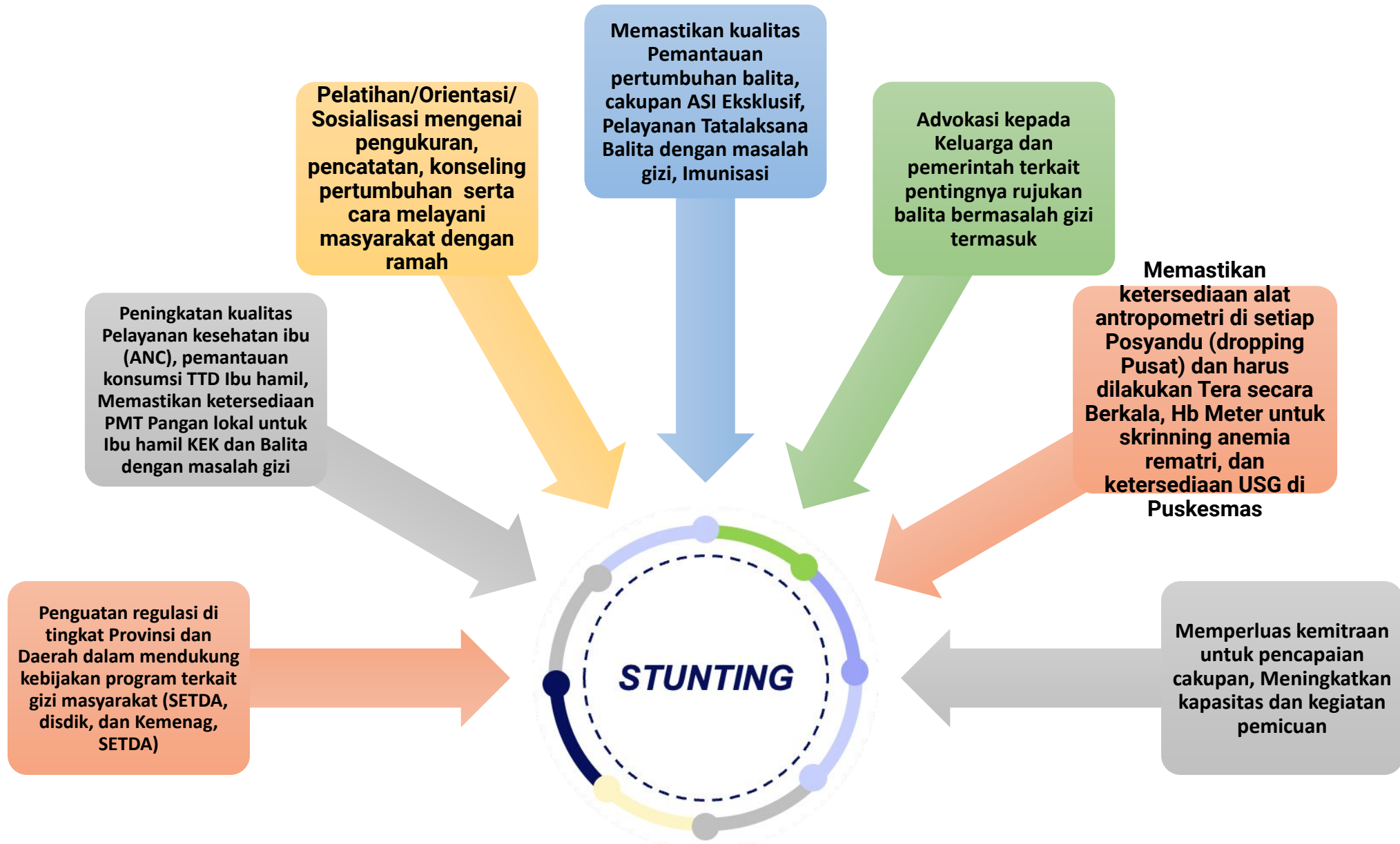
IBU NIFAS



Pemantauan ibu nifas (lost follow up), Mitos di masyarakat terkait larangan konsumsi protein hewani

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat



STRATEGI PEMECAHAN MASALAH



Bappeda/Bapelitbangda Kab/Kota

Dukungan kebijakan dan anggaran kegiatan intervensi spesifik



Dinas Kesehatan Kab/Kota

Melaksanakan program intervensi spesifik



BKKBN & Dinas PPPA dan KB Kab/Kota

Pendampingan remaja, catin dan keluarga muda, Penggerakan masyarakat, Edukasi 1000 HPK, Sinergitas dalam pelaksanaan pelayanan, Peningkatan kompetensi petugas/fasilitator pendamping keluarga melakukan audit stunting kepada seluruh balita yang memiliki Panjang atau tinggi badan kurang



Dinas Sosial Kab/Kota

Layanan jaminan kesehatan bagi kasus masalah gizi, memprioritaskan bantuan kepada Rumah Tangga yang memiliki balita stunting & gizi kurang



Dinas Pendidikan Kab/Kota

Melaksanakan program penjangkauan anak sekolah, mensukseskan program pemberian TTD rematri



Dinas Ketahanan Pangan Kab/Kota

Akses penyediaan bahan pangan local dan berkontribusi dalam penyediaan makanan tambahan local bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab/Kota

Poporsional pemanfaatan dana desa dalam intervensi spesifik dengan pemenuhan sarpras, tenaga di posyandu, penggerakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pemantauan pertumbuhan balita



Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Kab/Kota

Penyediaan sarana dan akses air bersih serta jamban sehat



EVALUASI

Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022



Pemantauan pertumbuhan balita harus dilakukan setiap bulan dan perlu dukungan dari sisi pemberdayaan masyarakatnya untuk memastikan semua sasaran balita terukur .

Masih terdapat cakupan indikator yang belum dilaporkan di semua desa/kelurahan dikarenakan belum dilakukan pemantauan atau data laporan pemantauan belum terkoordinasikan dengan baik

Masih banyak terdapat capaian indikator yang capaiannya masih rendah

Sumber data cakupan indikator yang bersumber dari lintas OPD , perlu dikolaborasikan untuk mendapatkan data yang akurat.

Pemahaman terhadap tupoksi TPPS di Kecamatan dan Desa/Kelurahan perlu diperkuat.

Perlu peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan peran para pihak di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dalam percepatan penurunan stunting



DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN UNTUK INTERVENSI YANG BELUM OPTIMAL, YAITU :



1. Anggaran penyediaan PMT lokal bagi ibu hamil KEK dan balita dengan masalah gizi terutama untuk kabkota yang tidak ada alokasi anggaran yang memadai
2. Penggerakan sasaran untuk skrinning anemia rematri dan pemberian serta konsumsi TTD Rematri, terintegrasi dengan kegiatan AKSI Bergizi, serta penggerakan untuk pelaporan aksi Bergizi
3. Penyediaan sarana skrinning anemia rematri (BMHP, HB Meter, Hemato Analyzer dan Tenaga Pelaksana)
4. Peningkatan kapasitas kader dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di tingkat masyarakat (posyandu)
5. Dibentuknya Jejaring tatalaksana rujukan kasus stunting termasuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
6. Koordinasi dan kolaborasi kegiatan yang melibatkan LS/Mitra terkait baik Pemerintah maupun swasta



INOVASI & KOLABORASI PENTAHHELIX DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

TPPS JABAR *EVENT HIGHLIGHT*

Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat



GEMAZ (Generasi Emas Bebas Anemia dan Zero New Stunting) dan Pemecahan Rekor Muri Minum TTD Serentak



ODADING (Obrolan Daring Stunting) Series



MORING (Monitoring Aksi Stunting)



JSS

Jabar Stunting Summit (JSS) merupakan event yang diselenggarakan dengan maksud sebagai event besar/rembuk stunting di tingkat provinsi untuk menunjukkan komitmen percepatan penurunan stunting di Jawa Barat. Event JSS terdiri dari :

- Stand Expo Inovasi dan Best Practise
- Talkshow (Pakar dan Best Practise)
- Penghargaan 8 Aksi Konvergensi
- Lomba Karya Tulis, Jingle, Pantu, Tiktok, Instagram, Foto, dll
- Walking Galery Stunting dan lain-lain

BAAS (Bapak Asuh Anak Stunting), NGABRING (Ngawal Jabar Zero New Stunting), dan Dashboard Stunting

KOLABORASI PENTAHELIX ZERO NEW STUNTING

Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat



Universitas & Organisasi

Dunia Usaha

- Pelatihan untuk dokter spesialis anak dalam pencegahan dan penanganan stunting
- Pendampingan stunting kader posyandu



Mitra Pembangunan

- Pendampingan Pemberian Tablet Tambah darah
- Pemberian KIE Progran Gizi Micro
- Pembacaan label Makanan untuk remaja

Media

- Lokakarya strategi pentahelik dalam penanganan stunting
- Kalan layanan Masyarakat mengenai stunting
- Edukasi bumil dan balita dalam pencegahan stunting



Masyarakat Madani

Makanan Tambahan Edukasi Pencegahan stunting

- Penyuluhan Gizi PMT dan Gizi seimbang
- Audiensi IPDN terkait peninjauan lokasi bakti karya praja dengan tingkat stunting tinggi
- Desiminasi telemedicine UI
- Ratas potensi Kerjasama PT melalui KKN tematik dalam percepatan penurunan stunting di Jabar

TPPS JABAR EVENT TIMELINE



Selasa, 4 Januari 2022

Rapat Pembahasan Identifikasi Riset Program Stunting



Selasa, 25 Januari 2022

Penghargaan Penilaian Kinerja 8aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021



Kamis 03 Februari 2022

Rapat Pembahasan Pemetaan Kerjasama Stunting Daerah Provinsi Jawa Barat



Jumat, 4 Februari 2022

Rapat Terbatas Potensi Kerjasama Perguruan Tinggi melalui "KKN TEMATIK" Dalam Percepatan Penurunan Stunting Di Jawa Barat dan Rapat Div R&D TPPS Jabar



Senin, 07 Februari 2022

Rapat Koordinasi Tindak Lanjut kerjasama CSR dalam Program Jabar Zero New Stunting



Jumat, 11 Februari 2022

Rapat Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran serta Tagging Program/Kegiatan Pendukung Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jawa Barat

TPPS JABAR EVENT TIMELINE

Provincial Government
Of West Java



Jumat, 18 Februari 2022
Forum Wakil Kepala Daerah se-Indonesia “Penanganan Stunting dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem”



Selasa, 22 Februari 2022
Audiensi IPDN terkait Penjajakan Lokasi Bhakti Karya Praja dengan Tingkat Stunting Tinggi



23 Februari 2022
Bimbingan Teknis 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting



Jumat, 4 Maret 2022
Diseminasi Telemedicine UI sebagai Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Jawa Barat



Jumat, 11 Maret 2022
Sosialisasi RAN PASTI



19 – 20 Mei 2022
DESK OP PROVINSI PEMBAHASAN MAJOR PROJECT PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DAN PENANGANAN KEMISKINAN

RAPAT KOORDINASI TEKNIS, MONITORING & EVALUASI “ROAD TO JABAR ZERO NEW STUNTING, CREATING GOLDEN GENERATION IN 2045”



RAKORTEK KOTA SUKABUMI
(Kab. Sukabumi & Kota Sukabumi)



RAKORTEK KAB. PANGANDARAN
(Kab. Pangandaran, Kota Banjar Kab. Ciamis)



RAKORTEK KAB. TASIKMALAYA (Kab. Garut ,
Kab. Tasikmalaya , Kota Tasikmalaya,)



RAKORTEK KAB. KARAWANG
(Kab. Karawang, Kab. Bekasi, Kota Bekasi

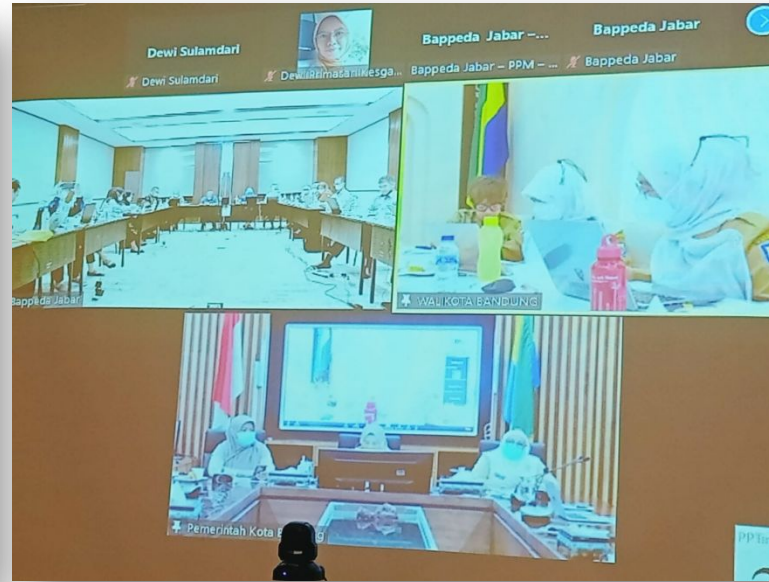


RAKORTEK KAB. SUBANG
(Kab. Subang, Kab. Kuningan, Kab. Indramayu)



**KONVERGENSI LINTAS PROGRAM DAN LINTAS
SEKTOR DALAM UPAYA PERCEPATAN
PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT**

PENILAIAN KINERJA AKSI KONVERGENSI STUNTING TAHUN 2022



MONITORING KEGIATAN REMBUK STUNTING KABUPATEN/KOTA



REMBUK STUNTING KOTA BOGOR



REMBUK STUNTING KAB. MAJALENGKA



REMBUK STUNTING KOTA BANDUNG



REMBUK STUNTING KAB. GARUT



REMBUK STUNTING KOTA SUKABUMI



REMBUK STUNTING KOTA BEKASI

“ODADING” Obrolan Daring Stunting



NO	JADWAL	KAB/KOTA	TEMA	INOVASI
1	29 Juli 2022	Kab. Sumedang	Manajemen Data	Aplikasi e-Simpat
2	05-Agu-22	Kota Bandung	Ketahanan Pangan	Buruan Sae
3	05-Agu-22	Kota Depok	Peran PKK	D Sunting Menara
4	05-Agu-22	Kab. Purwakarta	Ketahanan Pangan	Bantuan Beras Nutrisiink
5	05-Agu-22	Kab. Bandung Barat	Pemenuhan Gizi Ibu Hamil	GETOL MIELING (Gerakan Makan Telur untuk Ibu Hamil)
6	02-Sep-22	Kota Bogor	Continuum of care	TALEUS BOGOR (Tanggap Leungitken Stunting di Kota Bogor)
7	09-Sep-22	Kab. Cianjur	PAUD	MENGAGAS TAUCO
8	16-Sep-22	Kab. Bekasi	Kolaborasi pentahelix	KABETING (Kampung Bebas Stunting)
9	23-Sep-22	Kab. Bandung	Integrasi Perencanaan Pembangunan	BEDAS (Bersama Hadapi Stunting)
10	30-Sep-22	Kab. Subang	Kolaborasi pentahelix	Dukungan Dana BKUDK, Kapolres, BRIN, dll
11	07-Okt-22	Kab. Garut	Kolaborasi pentahelix	Gagah Ti Garut (Gerakan Cegah Stunting ti Kabupaten Garut)
12	14-Okt-22	Kab. Ciamis	TTD Rematri	Si Keren Halo Cinta
13	21-Okt-22	Kab. Tasikmalaya	Kolaborasi organisasi profesi/Sanitasi	Jas Dolis Payung/Dokter Masuk Kampung/JI MAT (Jamban Idaman Masyarakat Tasikmalaya)
14	28-Okt-22	Kab. Indramayu	Kolaborasi pentahelix	GESIT (Gerakan Penurunan Stunting Indramayu Terpadu)
15	04-Nov-22	Kota Cimahi	Kolaborasi pentahelix	KP ASI Macan Oces
16	11-Nov-22	Kab. Bogor	Kolaborasi pentahelix	Go Best (Kab. Bogor Bebas Stunting)
17	18-Nov-22	Kab. Sukabumi	Kolaborasi Organisasi Profesi	Dokter Masuk Kampung
18	25-Nov-22	Kab. Majalengka	Kolaborasi pentahelix	Majalengka D' Best Stunting (Desa Bebas Stunting)
19	02-Des-22	Kab. Kuningan	Kolaborasi pentahelix	Dukungan dari Perusahaan, Akademisi, Organisasi Profesi, Organisasi Masyarakat
20	09-Des-22	Kab. Cirebon		
21	16-Des-22	Kota Bekasi		
22	23-Des-22	Kab. Karawang		
23	30-Des-22	Kota Tasikmalaya		
24	06-Jan-23	Kab. Pangandaran		
25	13-Jan-23	Kota Banjar		
26	20-Jan-23	Kota Cirebon		
27	27-Jan-23	Kota Sukabumi		



◀ **PENUTUP**

STUNTING DI JAWA BARAT

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Jawa Barat dilaksanakan melalui Pendekatan 5 K



Konsep Penganggungan yang baik
Kolaborasi seluruh Stakeholder Pembangunan
Komitmen yang kuat
Konsisten dalam Berbagai Program dan Aktivitas
Kontinu (Berkelanjutan) dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi

-BAPPEDA-



HATUR NUHUN

***“Makan capcay pakai kepitng
Minumnya jus alpukat
Bersama kita tanggulangi stunting
Wujudkan Jabar Juara Indonesia kuat”***